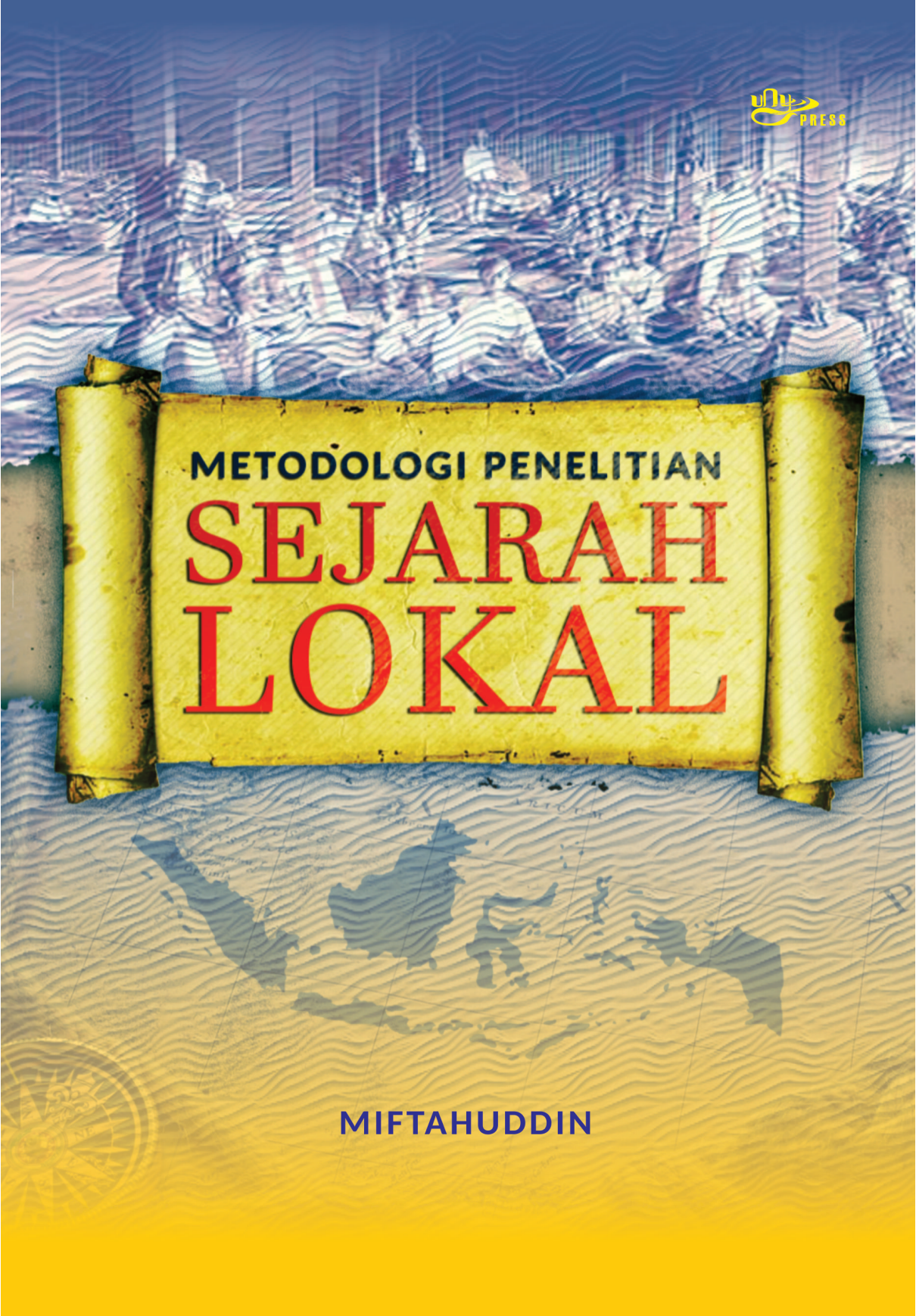
PRESS
METODOLOGI PENELITIAN
SEJARAH
LOKAL
MIFTAHUDDIN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
uny

METODOLOGI PENELITIAN

SEJARAH LOKAL

Miftahuddin

UIN PRESS

Metodologi Penelitian Sejarah Lokal
©Miftahuddin

Cetakan I, Maret 2020

Penulis : Miftahuddin
Penyunting Bahasa : Shendy Amalia
Tata Letak & Cover : Arief Mizuary

Diterbitkan dan dicetak oleh:

UNY Press
Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp : 0274–589346
Mail : unypenerbitan@uny.ac.id

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

ISBN : 978-602-498-139-6

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

DAFTAR ISI

Daftar Isi iii
Prakata V
Pendahuluan 1

BAB I Kajian Sejarah Lokal 3
A. Studi Sejarah Lokal 3
B. Posisi dan Arti Penting Penulisan Sejarah Lokal 7
C. Sejarah Lokal dan Permasalahan Konseptual 9
D. Sejarawan Profesional, Sejarawan Amatir, dan Historiografi Sejarah Lokal 12

BAB II Sejarah dan Peneliti Sejarah 15
A. Pengertian Sejarah 15
B. Epistemologi Sejarah 18
1. Arti Penting Filsafat Sejarah Spekulatif dan Kritis 19
2. Pendekatan Multidimensional dalam Historiografi 25
C. Menjadi Peneliti Sejarah 31

BAB III KAJIAN SEJARAH LOKAL DAN MASALAH METODOLOGI 35
A. Metodologi Sejarah 35
B. Korelasi Sejarah Lokal dengan Sejarah Struktural 39
C. Sejarah Lokal dan Pendekatan Multidemensional 42
1. Pendekatan Sosiologi dalam Penulisan Sejarah 42
2. Metode Antropologi dalam Penulisan Sejarah 43
3. Pendekatan Politik dalam Penulisan Sejarah 45

4. Pendekatan Psikologi dalam Penulisan Sejarah 46
D. Ruang Lingkup Kajian Sejarah Lokal..... 47
1. Sejarah Sosial 48
2. Sejarah Pedesaan..... 50
3. Sejarah Kota 51
4. Sejarah Ekonomi 54
5. Sejarah Politik 55
6. Sejarah Orang Kebanyakan 58

BAB IV REKONSTRUKSI SEJARAH LOKAL 59
A. Tema Sejarah Lokal 59
B. Sumber Sejarah Lokal..... 63
1. Arti Penting Historiografi Tradisional 64
2. Arti Penting Sumber Lisan Untuk Sejarah Lokal 67
3. Tradisi Lisan 70
4. Sumber- Sumber Terkait Untuk Sejarah Lokal 73
C. Kritik Sumber: Dari Realita ke Fakta dan dari Fakta ke Data . 76
D. Interpretasi..... 80
E. Historiografi 81
F. Beberapa Contoh Kajian Sejarah Lokal..... 83

DAFTAR PUSTAKA 91
BIOGRAFI SINGKAT..... 97

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga berkat keteguhan dan kesabaran tulisan ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan dan telah memberikan bimbingan moral dan akhlak kepada umat manusia.

Buku ini adalah bagian dari sumbangan pemikiran penulis dalam cara bagaimana menulis sejarah dan melakukan kajian sejarah yang benar, khususnya sejarah lokal. Tentu saja, hasil sumbangan pemikiran yang ada dalam buku ini bukanlah sama sekali hal yang baru, hanya saja penulis berharap dengan hadirnya buku ini dapat memudahkan, khususnya bagi para peneliti pemula dalam bidang sejarah. Kehadiran buku ini diharapkan juga dapat melengkapi panduan-panduan dalam kajian sejarah.

Tentu saja, buku yang berada di hadapan pembaca, tidak mungkin hadir tanpa bangtuan-bantuan dari beberapa pihak. Pertama, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UNY yang telah menerima usulan hibah penulisan buku bagi dosen tahun 2019 di lingkungan UNY. Kedua, rasa terima kasih penulis ucapkan secara khusus kepada guru, pembimbing, dan sekaligus kolega, bapak Drs. Djumarwan yang telah menginspirasi penulis, khususnya ketika penulis bersama-sama dengan beliau mengajar mata kuliah Sejarah Lokal. Ketiga, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para kolega di Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY yang

telah meluangkan waktunya untuk diajak berdiskusi, khususnya terkait dengan wacana-wacana metodologi sejarah. Keempat, tidak lupa penulis ucapkan kepada istri tercinta, Lutfi Malihah, dan anak-anak tersayang, Najla Afiqotul Wafa, Rif'at Hazimatun Nawa, dan Alzam Faqih Mubarok, karena mereka penulis selalu bersemangat untuk berkarya.

Akhirnya, dengan segala kelemahan dan kekurangan serta kemampuan yang penulis miliki, tentu saja kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sewajarnya penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga kritik dan saran para pembaca dapat memberi manfaat dan menjadi bekal pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, serta para pembaca umumnya untuk menyempurnakan penulisan ini di masa yang akan datang. Amin Ya Rabbal 'alamien.

Yogyakarta, 12 Maret 2020
Penulis,

Miftahuddin

PENDAHULUAN

Tidak ada yang jelek dengan masa lalu, dan yang jelek adalah orang yang tidak mau belajar pada masa lalu. Bagaimana masa lalu dapat diketahui, tentu saja harus ada orang yang merekam dan merekonstruksinya. Oleh karena itu, penulis sejarah adalah penyelamat sejarah itu sendiri. Artinya, hasil tulisannya dapat dijadikan pembelajaran bagi manusia untuk menciptakan sejarahnya. Tulisan sejarah menunjukkan kepada manusia tentang kesadaran masa lalu, masa kini, dan kesadaran tentang apa yang harus diperbuat untuk masa yang akan datang. Sejarah akan baik kepada kita, karena kita mau belajar dari sejarah. Sementara itu, sejarah masa lalu dapat diketahui apabila ia ditulis dan ada yang mau menulisnya. Tentu saja, dapat diterjemahkan bahwa penulis sejarah adalah pahlawan, karena dengan hasil tulisannya ia dapat menyelamatkan umat manusia dari kesesatan.

Indonesia yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, dan keunikan tentu harus dikenalkan, dan disinilah salah satu peran penulis sejarah. Keberagaman adalah bagian dari kekayaan Indonesia yang harus disadari oleh masyarakat bangsa demi kesatuan Indonesia. Untuk menjadikan bangunan Indonesia yang utuh, maka unsur-unsur yang mendukungnya harus saling dapat mempererat dan dapat disatukan. Oleh karena itu, Indonesia yang mempunyai keragaman kearifan lokal ini harus dipahamkan kepada masing-masing unsur agar dapat menerimanya. Sekali lagi, di sinilah peran yang dapat dimainkan oleh penulis sejarah untuk mengungkapkan dan merekonstruksi banyak kearifan lokal yang dimiliki Indonesia.

Untuk menyampaikan informasi masa lalu yang benar dan falid memang ini tugas berat yang harus dijalani penulis sejarah. Banyak unsur yang harus dipenuhi penulis sejarah. Selain harus ulet, sabar, jujur, dan tulus, maka penguasaan metodologi tentu saja bagian yang pokok yang harus dikuasai penulis sejarah. Penulisan sejarah yang dilandasi dengan penguasan metodologi tentu akan menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika yang ditulis adalah tentang lokalitas tertentu yang dilandasi dengan penguasaan metodologi, maka generasi yang terdapat di lokal tersebut atau pembaca pada umumnya akan memperoleh pencerahan. Untuk mengantarkan para penulis, khususnya sejarah lokal, menghasilkan tulisan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bab 1 dalam buku ini mengungkap seluk beluk dan permasalahan sejarah lokal itu sendiri. Bab 2 menjelaskan tentang permasalahan sejarah dan problematik menjadi penulis atau peneliti sejarah. Bab 3 mencoba menjelaskan perangkat apa yang harus dimiliki penulis sejarah lokal agar hasil tulisannya valid, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena penguasan metodologi sebagai kuncinya, maka dalam bagian ini kajian sejarah lokal dan permasalahan metodologi. Dalam bagian terakhir, Bab 4 dijelaskan tentang tahapan-tahapan dalam penulisan sejarah lokal. Dalam bagian ini juga disuguhkan beberapa contoh tentang hasil kajian sejarah lokal.

BAB I
KAJIAN SEJARAH LOKAL

A. STUDI SEJARAH LOKAL

Sejarah lokal bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Keterbatasan lingkup itu terutama biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah (unsur spatial). Menurut Alan J. Lichtman, sejarah lokal adalah sejarah yang membicarakan lingkungan sekitar, seperti suatu desa, kota, atau provinsi. Sejarah lokal berkaitan dengan kompleks yang tunggal atau lingkungan tertentu, seperti kota kecil atau desa, komunitas pertanian, atau bahkan seluruh kota atau kabupaten.[1] Jadi, kata lokal dapat merujuk baik pada suatu komunitas atau unit administrasi tertentu seperti pedesaan atau perkotaan maupun suatu ikatan sosio-kultural tertentu sebagai sebuah masyarakat.[2]

Menurut definisi, perhatian yang pokok dari sejarah lokal adalah "orang-orang yang menciptakan dunia sosial yang berada tempat-tempat tertentu," dan bagaimana mereka membentuk "tempat-tempat yang khusus dalam merespon rangsangan baik dari dalam komunitas maupun dari dunia yang lebih luas." Melalui studi kasus tentang area dan tema tertentu, sejarah lokal memberikan wawasan tentang, misalnya, bagaimana kehidupan di tempat tertentu di masa lalu yang berevolusi dalam berbagai pengaturan, baik di perkotaan maupun pedesaan.

[1] Alan J. Lichtman dan V. Frenc, *Historian and The Living Past*, Arlington Height: Harlan Davidson, 1978, hlm. 168.

[2] Bambang Purwanto, "Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia", dalam Sri Margana dan Widya Fitriyaningsing (ed.), "*Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*, Yogyakarta: Ombak, 2010, hlm. 295.

Karenanya, penelitian sejarah lokal memungkinkan pandangan sekilas ke dunia yang beragam dan saling berinteraksi yang merupakan dasar dari pengalaman historis.[3]

Yang penting untuk diperhatikan, bahwa sejarah lokal bukanlah pengumpulan fakta atau penyajian "bahan sumber" dalam bentuk narasi, melainkan pertanyaan yang ketat dari sumber-sumber yang diperoleh agar dapat memberikan informasi. Mengajukan pertanyaan yang tepat adalah bagian utama bagaimana sejarah lokal dituliskan. Hal ini merupakan kunci yang tepat dalam penggunaan imajinasi historis yang dapat menghidupkan masa lalu, dan membuat studi lokal tentang relevansi batas-batas di luar kota dengan kota atau kabupaten yang merupakan fokus utama.[4]

Sejarah lokal dapat menjadi lapangan studi yang menyenangkan bagi pencari kekayaan makna pada masa lalu. Sejarah lokal berkaitan dengan suatu kompleks atau lingkungan sekitar, seperti kota kecil atau desa, suatu komunitas pertanian atau agrikultur, atau bahkan seluruh kota atau kabupaten. Sejarah lokal mencakup semua sejarah lokalitas tertentu dari mulai ada sampai sekarang, atau mungkin menggarap bagian kecil saja dari waktu. Sejarah lokal mencoba menghadirkan sejarah lokalitas secara keseluruhan, yang mempertimbangkan hubungan dari berbagai aspek pengalaman, baik konflik maupun persatuan komunitas karena suatu kepentingan. Sejarah lokal terfokus pada proses pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Mungkin juga, sejarah lokal menekankan pada salah satu tema sejarah yang telah berlaku, seperti pada sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah politik, atau sejarah intelektual. Sejarah lokal juga dapat mengangkat tema khusus, misalnya tentang anggota komunitas pertanian yang menjual hasil panen, hubungan antar etnis di wilayah sekitar urban (kota), atau reformasi prosedur pemerintahan di suatu kota kecil. Demikian pula, sejarah lokal dapat mengeksplorasi kejadian khusus atau peristiwa dalam sejarah masyarakat, misalnya tentang pendirian pabrik, penemuan atau penggalian tambang emas, pecahnya kerusuhan antar suku, atau tentang kerusakan akibat banjir dan kebakaran.[5]

---

[3] Jacinta Prunty dkk., "The Local History Project: Co-operating North and South," A Report for the Centre for Cross Border Studies, Oktober 2001, hlm. 9.

[4] *Ibid.,* hlm. 10.

[5] Alan J. Lichtman dan V. Frenc, *Historian..*, hlm. 174-175.

Sugeng Priyadi[6] menyebutkan, bahwa studi sejarah lokal memiliki empat corak, yaitu peristiwa khusus, struktur, tematis, dan sejarah umum. *Pertama,* yang dimaksud peristiwa khusus adalah bahwa corak kajiannya difokuskan pada peristiwa terntentu, atau studi peristiwa khusus. Studi peristiwa khusus adalah peristiwa yang sudah diterima kenyataannya. *Kedua,* studi struktur dalah memfokuskan persoalan struktur tetapi bukan peristiwa yang dilahirkan dari struktur. Misalnya, persoalan struktur yang bisa diangkat adalah struktur sosial, sistem pelapisan sosial, struktur budaya, struktur birokrasi, dan lainnya.

Ketiga, studi tematis yang dimaksud adalah studi yang mengangkat perkembangan aspek tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Aspek-aspek yang dapat dikaji, misalnya, terkait dengan pendidikan, keintelektualan, ide-ide, mentalitas, perkotaan, pedesaan, perdagangan, dan lain-lain. *Keempat*, yang dimaksud dengan studi sejarah umum adalah studi yang menguraikan perkembangan lokal tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan. Studi sejarah umum tentu saja penulisan sejarah lokal yang menyeluruh yang pada praktiknya perlu disokong dengan peristiwa yang khusus, struktur, dan tematis.

Sejarah lokal juga dapat berbagi ruang dengan banyak bidang akademik termasuk studi etnis, studi kasus sejarah nasional, sejarah publik, sejarah regional, sejarah perkotaan, tempat-tempat sejarah yang spesifik, sejarah lingkungan, sejarah lisan, dan sejarah mikro. Oleh karena itu, untuk dianggap sejarah lokal, sejarah lokal tidak harus disebut sejarah lokal oleh penulisnya.[7]

Sejalan dengan pandangan ini, maka diperlukan definisi formal dari bidang akademik sejarah lokal yang memperluas batas-batas sejarah lokal untuk memasukkan berbagai narasi sejarah lokal akademik dan nonakademik. Seperti sejarah publik atau sejarah politik, sejarah lokal adalah sebuah konsep. Ini dapat dianggap sebagai kiasan narasi atau genre yang mengasumsikan referensi ke tempat terdekat. Tempat geografis ini bervariasi untuk setiap buku dan setiap penulis. Ini bisa

---

[6] Sugeng Priyadi, *Sejarah lokal: Konsep, Metode dan Tantangannya,* Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 77-82.

[7] Stephanie Pasternak, "A New Vision Of Local History Narrative: Writing History In Cummington, Massachusetts," *A Thesis Presented*, Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS, September 2009, hlm. 14.

berupa wilayah multi-negara, jalan, lingkungan, kota, badan air, atau bagian lansekap. Fokus sejarah lokal dapat menjadi tempat itu sendiri, orang-orang yang tinggal di sana atau peristiwa yang terjadi di lokasi tertentu. Studi narasi sejarah lokal juga menyatukan tulisan-tulisan tentang masa lalu, baik amatir dan akademis.[8]

Sejarah lokal dapat berbagi ruang dengan banyak bidang akademik termasuk studi etnis, studi kasus sejarah nasional, sejarah publik, sejarah regional, sejarah perkotaan, banyak tempat sejarah spesifik, sejarah lingkungan, sejarah lisan, dan sejarah mikro. Sejarah lokal juga tidak harus disebut sejarah lokal oleh penulis, karena faktanya, sebagaimana dicatat Barnhart, banyak sejarawan yang menulis sejarah lokal menghindari istilah ini:[9]

Pada tahun 1960 dua fitur utama membentuk kembali lanskap narasi sejarah lokal. *Pertama*, dengan munculnya sejarah sosial "baru," yaitu ada pergeseran fokus dari sejarah nasional ke sejarah yang memeriksa komunitas orang yang lebih kecil untuk menemukan fitur atau pola khas yang kemudian dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan kisah nasional. *Kedua*, sekitar waktu yang sama, gaya penulisan akademik berubah secara dramatis. Sejarawan profesional mulai secara teratur menggunakan metodologi dan bahasa yang menyertainya dari ilmu sosial, seperti antropologi, linguistik, ilmu politik. Itu adalah bahasa yang dimaksudkan untuk dan dapat diakses oleh sejarawan akademis lainnya, tetapi perubahan ini memperburuk jurang pemisah antara sejarawan akademis dan sejarawan amatir (serta kesenjangan antara sejarawan dan publik). Sebagai akibat dari perubahan ini, pada 1960-an banyak sejarawan akademik menerima pemberitahuan dan pujian untuk menulis sejarah komunitas kecil yang dimaksudkan untuk audiens akademik dalam bahasa yang sering tidak dapat diakses oleh anggota komunitas yang diteliti. Ini diikuti pada 1980-an oleh bentuk lain dari studi akademik komunitas kecil, sejarah mikro.[10]

Seperti halnya para sejarawan komunitas, mikrohistorian percaya bahwa pengawasan ketat terhadap tempat atau peristiwa tertentu dalam sejarah dapat mengungkapkan informasi tentang masyarakat dan

[8] *Ibid.*, hlm. 12.
[9] *Ibid.,* hlm. 14.
[10] *Ibid.,* hlm. 43-44.

budaya, yang terkadang oleh sejarah makro, dengan garapan yang luas dan generalisasi, mungkin terlewatkan. Jill Lepore menunjukkan, bahwa berbeda dengan biografi, dalam sejarah mikro sebuah kisah individu diprofilkan untuk mengungkapkan bukan apa yang tunggal tentang kasus itu, tetapi apa yang secara umum benar tentang kelompok orang dan individu itu berasal.[11]

Secara metodologis, sejarah mikro berbeda dari studi komunitas dalam hal itu kurang kuantitatif. Sejarah mikro lebih fokus pada "jaringan hubungan sebab akibat" yang menyebabkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Mikrohistorian memang banyak mengandalkan penelitian kuantitatif dari sejarawan sebelumnya, tetapi kemudian menjalin studi ini menjadi satu kesatuan yang kohesif, mengungkapkan banyak tentang sejarah sosial dan budaya pada masa itu. Sejarah mikro ini ditulis dalam narasi yang dimaksudkan untuk menarik perhatian khalayak populer (non-spesialis terdidik) serta sarjana akademis.[12]

B. POSISI DAN ARTI PENTING PENULISAN SEJARAH LOKAL

Memasukkan sejarah lokal ke dalam sejarah akademik akan menguntungkan banyak pihak, termasuk pengajar, mahasiswa, perguruan tinggi dan universitas yang bersangkutan, serta anggota sekitarnya komunitas. Berlatih sejarah lokal memungkinkan sejarawan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Seperti yang sudah lama dipahami oleh beberapa sejarawan profesional, narasi sejarah lokal sangat populer di kalangan orang awam, dan jauh lebih populer daripada kebanyakan monograf. Louis Mumford menjelaskan dalam esainya tahun 1927 "Nilai Sejarah Lokal," bahwa sejarah lokal adalah menarik karena ini tentang kita. Keyakinan inilah yang memberi nilai pada sejarah lokal, karena kita merasakan hidup kita sendiri, kehidupan nenek moyang, dan tetangga kita. Bahwa peristiwa yang telah terjadi di wilayah tertentu, tempat kita telah menetap, sama pentingnya dengan kehidupan orang-orang yang lebih jauh generasinya dengan kita.[13]

Jadi, penelitian dan penulisan sejarah lokal tidak hanya dirasakan penting bagi orang yang berasal dari daerah bersangkutan saja. Ada

[11] *Ibid.,* hlm. 50.
[12] *Ibid.,* hlm. 50.
[13] *Ibid.*, hlm. 15.

peristiwa yang tetap mempunyai arti lokal saja, tetapi ada pula yang mengandung makna yang lebih luas. Sejarah lokal patut dipelajari dan diteliti agar dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap generalisasi-generalisasi yang sering dibuat dalam penulisan sejarah nasional. Misalnya, adanya generalisasi teori tentang dualisme teknologi di Indonesia yang beranggapan bahwa teknologi tradisional adalah padat karya, sedangkan teknologi modern berupa padat modal. Jika diterapkan di luar pulau Jawa, maka teori ini tidak tahan uji dikarenakan adanya perbedaan bahwa pulau Jawa memang telah mencapai kepadatan penduduk yang meluap.[14]

Lapian menegaskan, kaitannya dengan involusi agraris juga merupakan generalisasi yang kurang tepat. Diketahui, sekarang ini penelitian setempat di pulau Jawa sudah mulai dilakukan untuk melihat paakah teori involusi pertanian ini masih dapat berlaku. Sementara itu, perlu diingat bahwa sistem tanam paksa yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda juga diberlakukan di Sumatra Barat dan Minahasa. Namun, hingga kini belum ada studi tentang daerah-daerah ini dalam hubungannya dengan sistem tanam paksa.[15]

Tentu ada alasan lain mengapa sejarah lokal perlu dipelajari dan digali. Misalnya, solidaritas bangsa biasanya lahir dalam suasana senasib dan sepenanggungan. Dalam sejarah Indonesia ada pengalaman yang dihadapi, dihayati, atau diderita bersama-sama, tetapi dalam hal lain sejarah masing-masing daerah, suku atau kelompok telah menempuh perjalanan yang berbeda, malahan juga bisa bertentangan arah. Seperti halnya dalam satu keluarga, di mana anggota-anggotanya menceritakan pengalamannya masing-masing supaya diketahui dan dipahami oleh seluruh keluarga. Demikian pula, satu daerah dengan daerah yang lain perlu mengenal jalan sejarah yang ditempuh. Mengenal sejarah lokal dari sesama kita berarti mengenal latar belakang sejarah dari sesama bangsa dan memperluas pandangan kita tentang dunia Indonesia.[16]

Ketidakoptimalan dalam menyajikan sejarah juga bisa disebabkan karena tidak digarapnya sejarah lokal dengan serius. Ketika sejarah lokal

[14] A.B. Lapian, "Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal", *Prisma*, No. 8, Agustus 1980, hlm. 6-7.

[15] *Ibid.*, hlm. 7.

[16] *Ibid.*

diabaikan, maka *body of knowledge* sejarah, baik lokal maupun nasional, akan kelihatan banyak lubang-lubangnya yang kosong. Sejarah lokal akan memenuhi kebutuhan untuk menghadirkan masa lampau yang disebut sejarah yang manusiawi atau sejarah sehari-hari. Namun, ketika sejarah lokal terlalu diremehkan, mengakibatkan mikro unit dan mikro-history itu akan benar-benar gagal. Sementara itu, kegagalan sejarah lokal secara bertingkat mengakibatkan kegagalan sejarah nasional yang Indonesiasentrisme, karena diketahui sejarah lokal adalah sejarah yang kaya akan informasi.[17]

Sejarah lokal harus dipandang sebagai penglihatan kita terhadap masa lalu yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup geografis tertentu, akan tetapi juga melihat eksistensi manusia lebih intim tanpa terjebak pada keterlibatan elit dan peristiwa besar sejarah. Oleh karenanya, sejarah lokal dapat berdiri secara otonom. Ia tidak sekedar dilihat sebagai sumbangsihnya di dalam penyusunan sejarah nasional, juga memberikan kita pemahaman tentang pengertian "diri" dan orang lain. Bahwa penulisan sejarah lokal yang membatasi diri dari lokalitas dan periode tertentu lebih menjanjikan terhadap kecermatan dan kedalaman di dalam memahami masyarakat tertentu sebagai bagian dari sejarah sosial dari masyarakat tertentu.[18]

C. SEJARAH LOKAL DAN PERMASALAHAN KONSEPTUAL

Taufik Abdullah[19] mengatakan bahwa istilah sejarah lokal merupakan pengertian yang netral dan diharapkan berarti tunggal. Pengertian kata lokal memang tidaklah berbelit-belit, karena hanyalah bermakna "tempat dan ruang." Jadi, "sejarah lokal" hanyalah berarti sejarah dari suatu "tempat," suatu "*locality,*" yang batasannya ditentukan oleh "perjanjian" yang diajukan penulis sejarah itu sendiri. Sementara itu, batasan geografisnya dapat berupa suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini mungkin telah mencakup dua atau tiga daerah administrasi tingkat dua atau tingkat satu, misalnya suku bangsa Jawa, dan juga dapat pula suatu kota, atau malahan suatu desa. Dari sini dapat dirumuskan

[17] Sugeng Priyadi, *Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2015, hlm. 186-187.

[18] Imam Syafi'i, "Sejarah Lokal adalah Sejarah Maritim (Nasional) Indonesia?," *SEJARAH DAN BUDAYA*, Tahun Kesebelas, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 30.

[19] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia,* Yogyakarta: UGM Press, 1996, hlm. 15.

sebagai kisah kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada "daerah geografis" yang terbatas.

Jika prinsip sejarah sebagai suatu yang unik diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa semua sejarah sebanarnya adalah sejarah lokal. Sementara itu, sejarah nasional tidak lain hanya merupakan representasi politis dari sejarah lokal dalam bingkai dimensi keruangan yang baru, yaitu ketika perkembangan nasionalisme berhasil menciptakan identitas baru dalam konteks identitas bangsa.[20] Jadi, secara historis, dalam pengertian empiris, pada dasarnya "Indonesia" atau "Nasional Indonesia" adalah suatu gejala yang baru muncul di abad ke-20 ini. Jika demikian, maka penamaan "sejarah nasional" atau "sejarah Indonesia" yang mencakup zaman dari selurh daerah yang kini disebut RI (Republik Indonesia) haruslah diterima tak lebih hanyalah nama berdasarkan konsensus saja. Konsensus ini tak pula terlepas dari patokan normatif. Ia ditentukan bukan oleh keharusan logis dari "*subject matter*" atau sasaran studi, tetapi oleh tuntutan ideologis.[21]

Namun demikian, karena perkembangan politik dalam abad ke-19 dan ke-20 menghasilkan banyak sekali negara nasional, maka lembaga politik ini berfungsi sebagai sistem yang mencakup segala aspek kehidupan kesatuan nasional, seperti ekonomi, sosial, politik, kultur, dan lainnya. Demikian pula, unit geopolitik juga mewujudkan unit proses-proses kehidupan bangsa dalam totalitas. Oleh karena itu, mengingat tingkat proses sejarah itu ada pada tingkat makro, maka penyelesaian fakta dari sejarah lokal perlu didasarkan atas kriteria yang relevan dengan maknanya bagi kehidupan pada tingkat nasional. Misalnya, untuk sejarah politik, maka proses politik nasional mencakup kegiatan lembaga-lembaga nasional, seperti kabinet, parlemen, tokoh-tokoh nasional, peristiwa nasional, diplomasi, dan lain sebagainya. Skala kehidupan nasional tidak memunginkan pengungkapan fakta-fakta mikro pada sejarah lokal, kecuali apabila mempunyai dampak nasional atau representatif bagi perkembangan nasional, atau sangat tipikal bagi proses umum dan nasional. Yang jelas, bahwa sejarah nasional bukan kumpulan atau jumlah fakta-fakta sejarah lokal. Untuk dapat menyeleksi secara relevan, maka sejarawan harus bertolak dari

[20] Bambang Purwanto, "Dimensi Ekonomi Lokal …, hlm. 296.
[21] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal*…, hlm. 13.

prinsip tertentu, misalnya, harga beras, gerakan kaum muda, emansipasi wanita, pemilihan umum, penyajian kerja sama kebudayaan, dan lain sebagainya.[22]

Demikian pula, keterkaitan sejarah nasional dengan sejarah lokal tentu saja bukan harus diartikan, bahwa sejarah nasional itu sendiri adalah semata-mata gabungan dari sejarah-sejarah di tingkat lokal. Masing-masing lokalitas memiliki realitas kesejarahannya sendiri yang hanya bisa dimengerti dalam rangka lokalitas itu. Secara umum dapat dirumuskan, bahwa dalam sejarah nasional tekanan terutama diberikan pada gambaran yang lebih meluas serta menyeluruh dari suatu lingkungan bangsa dengan tidak terlalu memperhatikan detail-detail peristiwa lokal (kecuali yang memang diperlukan untuk mendukung gambaran dalam rangka sejarah nasional). Sedangkan dalam sejarah lokal yang mendapat perhatian utama justru peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar suatu lokalitas sebagai suatu kebulatan, dan menempatkan sejarah nasional sebagai latar belakang dari peristiwa-peristiwa khusus di lokalitas tersebut. Suatu kenyataan, bahwa banyak peristiwa sejarah yang bersifat lokal, sebenarnya hanya bisa dimengerti dengan baik apabila dihubungkan dengan dimensi sejarah nasional. Misalnya, hal-hal yang dibawa oleh proses westernisasi, seperti diperkenalkannya sistem pajak, sewa tanah, dan birokrasi modern membawa fenomena baru dalam kehidupan pedesaan.[23] Dalam konteks ini, tampak bahwa sejarah mikro erat kaitannya dengan sejarah makro.

Sementara itu, pengertian sejarah daerah sebaiknya harus ditinjau lebih sungguh-sungguh. Dalam pengertian administratif "daerah" merupakan kesatuan teritorial yang ditentukan jenjang hierarkinya. Dalam hal ini daerah terbawah adalah bagian dari daerah yang di atasnya, misalnya kabupaten adalah bagian dari provinsi. Sedangkan dalam pengertian politik, daerah biasanya dipertentangkan dengan pusat, yang dianggap nasional. Kesulitan sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa daerah sebagai unit administrasi sering tidak sesuai dengan daerah dalam pengertian etnis kultural. Misalnya, daerah administrasi Bali mungkin masih dapat dianggap sebagai kesatuan etnis-kultural,

[22] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 76.

[23] I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 36-38.

dan demikian pula Aceh, walaupun Gayo mungkin akan keberatan. Akan tetapi, daerah administrasi Sumatra Utara adalah jelas kumpulan dari beragam daerah etnis-kultural. Minangkabau, misalnya, tidaklah identik dengan "sejarah Sumatra Barat," karena yang pertama adalah pengertian etnis kultural, sedangkan yang ke dua ditentukan oleh politik administrasi.[24]

Jadi, penamaan sejarah daerah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dimaksud. Ketidakjelasan pengertian ini, di satu pihak menimbulkan harapan yang tidak sesuai dari sudut keragu-raguan dalam memutuskan sasaran studinya. Oleh karena itu, pemakaian istilah "sejarah daerah" yang tidak diikuti oleh pembatasan yang jelas sebaiknya ditinggalkan. Jika regional masih bisa dipakai dalam pengertian etnis-kultural, mungkin istilah tersebut bisa dipakai dalam arti yang lebih sempit dan tunggal dari pada "sejarah daerah," Akan tetapi, pengertian yang lebih populer dari regional sekarang melampaui batas politik nasional, umpamanya konsep ASEAN. Untuk itu, istilah "sejarah lokal," sebagimana telah disinggung, adalah lebih netral[25] dan tepat untuk digunakan sebagai istilah suatu kajian.

D. SEJARAWAN PROFESIONAL, SEJARAWAN AMATIR, DAN HISTORIOGRAFI SEJARAH LOKAL

Sejarawan profesional atau sering disebut dengan sejarawan akademik adalah sejarawan yang berasal dari lulusan lembaga pendidikan sejarah. Ia dibekali dengan bekal metodologi dan teori-teori ilmiah bidang ilmu sejarah. Sementara itu, ada juga sejarawan dari disiplin lain atau sering disebut sejarawan amatir, mereka adalah sejarawan yang bukan lulusan dari lembga pendidikan sejarah. Mereka dapat berasal dari lulusan bidang hukum, eksakta, atau agama, namun meminati bidang sejarah, dan sejarawan dari masyarakat pada umumnya.[26]

Menurut Azyumardi Azra, dengan mengutip pendapat Carl Becker, ada persamaan antara sejarawan akademik (*academic historian*) dengan "sejarah tinggi" dan sejarawan informal (*informal historian*) dengan

[24] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal*…, hlm. 13-14.

[25] *Ibid*.

[26] M. Yakub, "Historiografi Islam Indonesia: Perspektif Sejarawan Informal," MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013, hlm. 169.

"sejarah rendah." Sejarah tinggi adalah sejarah yang menghendaki berbagai kemampuan sejarawan dan peneliti sejarah untuk mengungkapkan dan menjelaskannya kepada publik. Sementara pengertian "sejarah rendah" memberikan pengertian sejarah secara sangat atau paling longgar. Dalam pandangan Azra selanjutnya, bahwa yang dikatakan sebagai sejarawan akademik atau sejarawan profesional (*historian by profession*) adalah orang yang mampu membaca perkembangan-perkembangan dalam ilmu sejarah yang tidak hanya menguasai teori dan metode sejarah saja, tetapi juga bidang-bidang keilmuan lain. Sejarawan dan peneliti sejarah tidak cukup lega hanya menghabiskan waktu meneliti arsip, dokumen, dan sumber sumber sejarah lain, mereka harus pula menggulati sumber-sumber lain di luar bidang sejarah.[27]

Hanya saja, pendikotomian antara sejarawan amatir dan sejarawan profesional tampaknya tidak perlu dalam konteks pengkajian sejarah lokal. Pada dasarnya, historiografi sejarah lokal yang ditulis para amatir dapat memberikan wawasan yang berharga bagi sejarawan profesional tentang komunitas yang mungkin tidak mereka temukan di tempat lain. Penulisan dan narasi suatu tempat oleh sejarawan amatir dapat memberikan dasar historiografi yang penting untuk studi akademik sebuah komunitas. Akan tetapi, seringkali banyak sejarawan profesional (sejarawan sosial) telah mengkritik sebagian besar sejarah lokal amatir karena dianggap kurangnya analisis dan topik-topik yang dipilih tidaklah menarik.[28] Kritik semacam itu tentu saja tidak dapat disalahkan, tetapi bukan berarti hasil karya dari sejarawan amatir tidak ada manfaatnya sama sekali, dan justru sebaliknya banyak hal yang dapat diperoleh dari historiografi hasil kerja sejarawan amatir.

Semestinya hasil karya para amatir ini tidak perlu berkembang menjadi kecurigaan yang berlebihan. Kecurigaan yang berlebihan tentu akan mengurangi gairah para peminat sejarah di tingkat lokal. Sebaliknya, kegairahan pada studi sejarah lokal perlu dipupuk. Sejarawan profesional seyogianya ikut mendorong berdirinya kelompok-kelompok pencinta sejarah lokal. Selanjutnya, bagaimana kelompok-kelompok itu dapat dipererat hubungannya dengan organisasi sejarawan profesional.[29]

---

[27] *Ibid.*

[28] Stephanie Pasternak, "A New Vision …, hlm. 16.

[29] I Gde Widja, *Sejarah Lokal …*, hlm. 6.

Pada dasarnya, sejarawan profesional sangat banyak dibantu oleh para amatir, antara lain melalui koleksi-koleksi pribadi yang telah mereka kerjakan. Terlepas dari kelemahan metodologis yang terdapat pada karya-karya sejarah amatir, namun hasil karyanya patut dihargai. Sejarawan profesional, misalnya, banyak berhutang budi kepada sejarawan amatir terutama dalam konteks menyediakan bahan-bahan dasar bagi penelitian. Ketika merujuk pada sejarah masa kolonial di Indonesia, maka penulisan sejarah lokal kebanyakan ditangani oleh pejabat-pejabat kolonial yang bertugas di daerah, dan mereka bukan sebagai sejarawan profesional. Pejabat-pejabat kolonial ini telah menghasilkan karya-karya sejarah lokal yang tidak kalah pentingnya bagi kajian yang lebih profesional.[30]

[30] *Ibid.,* hlm. 8-9.

BAB II
SEJARAH DAN PENELITI SEJARAH

A. PENGERTIAN SEJARAH

Sejarah adalah aktualitas masa lalu yang mencakup segala hal yang terjadi di dunia, baik alam maupun dunia manusia, sedangkan dalam arti yang lebih terbatas, sejarah hanya mencakup peristiwa manusia. Ketika berbicara, misalnya, tentang sejarah Indonesia, Malaysia, Thailand, atau sejarah Inggris berarti sejarah adalah kompleksitas peristiwa manusia di negara-negara yang disebut. Dalam pengertian yang lebih umum seseorang dapat berbicara tentang sejarah bumi, dengan memahami perubahan geologis bumi yang telah lewat. Yang perlu dicatat adalah, bahwa konsepsi sejarah apa pun selalu berbicara tentang gagasan perubahan.[31]

Arti kata sejarah dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai hasil penelitian dan penulisan manusia. Sejarah sebagai peristiwa mencakup semua yang pernah dirasakan, dibayangkan, dikatakan, dan telah dibuat manusia yang saling berhubungan satu sama lain, baik dengan lingkungannya maupun sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah berarti, bahwa umat manusia telah mengalami perubahan-perubahan secara bersama, baik dalam arus sejarah lokal, daerah, nasional, regional, maupun internasional. Sejarah sebagai hasil penelitian atau sejarah ilmiah diukur setelah sejarawan menghasilkan karya tulisan yang beraneka ragam dari zaman ke zaman, yang disebut sebagai historiografi. Sejarah

[31] Cilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide to Historical Method,* New York: Fordham University Press, 1957, hlm. 4.

ilmiah ditulis melalui keseluruhan proses-proses intelektual, kritis, dan konstruktif. [32]

Sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai hasil penelitian dapat disebut juga sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Penting ditegaskan, bahwa kejadian itu adalah sekali terjadi dan tidak dapat diulang atau terulang lagi. Jadi, objektif adalah dalam arti tidak memuat unsur-unsur subjek (pengamat atau pencerita). Sementara itu, sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Disebut subjektif tidak lain karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek (pengarang, penulis). Jadi, baik pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang. Oleh karena itu, mau tidak mau cerita sejarah itu memuat sifat-sifat pengarang atau penulis, baik dari gaya bahasanya, struktur pemikirannya, pandangannya, dan lain sebagainya.[33]

Cerita sejarah itu semestinya memang subjektif, yaitu menurut pandangan penyusunnya. Namun, subjektif dalam konteks ini bahwa lukisan sejarah yang diciptakan penyusun adalah lukisan jiwa yang mempunyai kepribadian yang kuat. Subjektif dalam arti yang sebenarnya adalah berdasarkan kejujuran, hajat dan tekad tidak akan berlaku curang, tidak menipu, dan menyatakan sesuatu sebagai konsekuensi keyakinannya.[34]

Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi dari hasil penelitian. Akan tetapi, sejarah bukanlah merupakan kumpulan fakta-fakta belaka, tetapi fakta-fakta itu telah disusun melalui proses sintesis sebagai satu kesatuan yang direncanakan. Sementara itu, pembuatan sintesis akan dipermudah oleh alat-alat analitis seperti konsep-konsep dan teori-teori. Sartono mengungkapkan, bahwa sejarah sebagai konstruk sesungguhnya tidak pernah dimaksud sebagai potret yang memuat secara

[32] Abdurracman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi,* Jakarta: Yayasan Idayu, 1979, hlm. 112.

[33] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 14-15.

[34] R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia,* Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 63.

lengkap segala sesuatu dari objek yang difoto, akan tetapi sejarah lebih mendekati lukisan. Dalam lukisan tercermin cara pelukis melihat objek, teknik penggarapannya, pandangannya, dan gayanya. Demikian pula, dalam penulisan sejarah tercakup pandangan, pendekatan, metode, dan gaya bahasa penulis sejarah (sejarawan). Namun berbeda dengan pelukis, sejarawan ketika menceritakan kejadian yang sebenarnya tidak terlalu bebas dalam mengekspresikan diri karena dia terikat pada fakta-fakta. Peneliti sejarah adalah mirip dengan saksi di pengadilan. Dia wajib mengungkapkan fakta-fakta sedemikian rupa dengan logis (diskursif) dan imajinatif sehingga orang umum atau pembaca mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. [35]

Perlu ditegaskan bahwa peristiwa sejarah yang dijadikan kajian adalah peristiwa yang disengaja, yaitu suatu perbuatan dan tindakan. Secara praktis dan metodologis, bukan filosofis, sejarah haruslah diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Oleh karena itu, segala peristiwa di hari lalu pada diri masing-masing tidak bisa dianggap sejarah. Letupan-letupan atau kepingan-kepingan peristiwa baru bisa dianggap sejarah apabila masing-masing terkait atau bisa dikaitkan dalam suatu konteks historis. Artinya, masing-masing keping itu merupakan bagian dari suatu proses atau dinamika yang sedang menjadi perhatian sejarawan. Jadi, unsur seleksi telah ikut menentukan. Tidak semua peristiwa tindakan manusia pada masa lalu itu bisa dimasukkan dalam "konteks historis."[36]

Sementara itu, untuk menentukan bahwa peristiwa itu penting dan barkaitan dalam konteks historis diperlukan rumusan pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Dalam usaha mencari jawaban terhadap pertanyaan pokok itulah ukuran penting atau tindaknya bisa didapatkan. Misalnya, ketika pertanyaan yang telah dirumuskan itu menyangkut masalah peralihan kekuasaan, sudah jelas bahwa proses pembentukan berbagai kekuatan politik mendapat tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jelas secara teoritas dapat dikatakan bahwa "fakta sejarah" itu belum ada sebelum pertanyaan dirumuskan.[37]

---

[35] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu …*, hlm. 18-19.

[36] Taufik Abdullah, "Sejarah dan Historiografi," dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomiharjo (peny.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif,* Yogyakarta: Ombak, 2016, hlm. xi-xiii.

[37] *Ibid.,* hlm. xiv.

Dalam penelitian sangat diperlukan kemampuan untuk mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber, sehingga mana yang dianggap fakta sejarah yang secara historis benar, bisa ditemukan. Sedangkan dalam penulisan diperlukan kemampuan menyusun fakta-fakta, yang bersifat fragmentaris itu ke dalam suatu uraian yang sistematis, utuh dan komunikatif. Proses ini bagaimanapun memerlukan kesadaran teoritis yang tinggi serta imajinasi historis yang baik. Dengan beginilah sejarah yang dihasilkan itu bukan saja akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer yang terkait pada pertanyaan pokok tentang "apa, siapa, di mana, dan apabila," tetapi juga mengenai "bagaimana serta mengapa dan apa jadinya." Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan elementer dan mendasar itu adalah fakta sejarah dan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan adanya sejarah. Sementara itu, jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" adalah suatu rekonstruksi yang berusaha menjadikan semua unsur itu terkait dalam suatu diskripsi yang disebut "sejarah."[38]

B. EPISTEMOLOGI SEJARAH

Epistemologi berasal dari kata *episteme* (bahasa Yunani) yang berarti "pengetahuan" atau teori pengetahuan. Jadi epistemologi adalah ilmu yang menanyakan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana memahami kenyataan. Dalam epistemologi ditanyakan pula apa saja sumber-sumber pengetahuan, bagaimana sumber-sumber itu dipergunakan, dan dengan apa pengetahuan tentang kenyataan itu diukur. Jika konsep epistemologi ini digunakan dalam ilmu sejarah, maka untuk mendapatkan cerita atau narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pertanyan-pertanyaan teori pengetahuan sebagai acuan. Dalam hal ini perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana pengetahuan sejarah itu diperoleh dan bagaimana kenyataan sejarah itu dipahami. Perlu dijawab pula, apa saja sumber-sumber pengetahuan sejarah yang harus digunakan dan alat apa yang dapat digunakan untuk mengukur kenyataan sejarah itu.

Sejarah itu sendiri termasuk ilmu empiris, yaitu pengetahuan yang didapatkan berdasar pada pengalaman.[39] Jadi, pengetahuan sejarah

[38] *Ibid.*

[39] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 46.

dibangun berdasarkan pada pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Misalnya, pengalaman itu direkam dalam dokumen-dokumen atau memori-memori yang terdapat pada pelaku dan saksi sejarah (sumber lisan). Dokumen-dokumen dan memori-memori itulah yang kemudian diteliti oleh sejarawan untuk menentukan fakta. Fakta itu selanjutnya diinterpretasi, dan dari interpretasi atas fakta, barulah muncul tulisan sejarah.

Mestika Zed menegaskan, bahwa sejarah adalah disiplin empiris. Penalaran ini bisa dijelaskan dengan pemahaman tentang konsep objek ontologis (ilmu tentang hakikat kenyataan atau sesuatu yang ada) sejarah. Ada dua kategori objek sejarah yang keduanya saling berkaitan, yaitu objek formal (masa lampau) dan objek material (data konkrit). Memang pengkajian tentang gejala masa lalu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya data konkrit. Jadi, objek formal sejarah adalah keseluruhan masa silam umat manusia. Sementara itu, objek material sejarah adalah semua bukti nyata dari gejala masa lalu. Bukti-bukti tersebut merupakan kesaksian sejarah yang dapat dilihat dan bisa dijadikan data (sumber sejarah), yang memuat fakta sejarah, dengan segala macam jenisnya. Tegasnya, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau memiliki bukti-bukti berupa dokumen atau jenis peninggalan lainnya. Hal inilah yang memungkinkan studi sejarah mengklaim dirinya sebagai studi empirik.[40]

1. Arti Penting Filsafat Sejarah Spekulatif dan Kritis

Sebelum mengungkapkan pendekatan multidimensional untuk penulisan sejarah dalam dataran praksis, maka penting pula untuk menjelaskan dalam dataran teori dasar-dasar membangun historiografi. Oleh karena itu, penulis sejarah harus memahami perkembangan pemikiran sejarah yang terkait dengan filsafat sejarah spekulatif dan filsafat sejarah kritis. Filsafat sejarah spekulatif sendiri adalah suatu perenungan filsafati mengenai tabiat atau sifat-sifat proses sejarah. Ia mencari struktur yang terkandung dalam proses sejarah dalam keseluruhannya. Dalam hal ini ada tiga macam pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu pola atau irama seperti apa yang dapat diamati dalam

[40] Mustika Zed, "Beberapa Catatan Tentang Epistemologi Sejarah," dalam Sunaryo Purwo Sumitro (peny.), *Dari Samudra Pasai Ke Yogyakarta: Persembahan Kepada Teuku Ibrahim Alfian,* Jakarta: Yayasan MSI dan Sinergi Press, hlm. 48-49.

proses sejarah?, apa motor yang menggerakkan sejarah?, dan apa sasaran terakhir yang dituju oleh proses sejarah?[41]

Dalam sejarah pemikiran, filsafat sejarah spekulatif pada kenyataannya telah mempengaruhi perkembangan cara berpikir manusia modern. Khususnya di Barat, pemikiran filsafat sejarah telah mempengaruhi cara berpikir manusia dalam memhami masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.[42] Filsafat sejarah spekulatif berusaha mencari pemahaman dan pengetahuan mengenai sejarah melalui perenungan rasional dan "demokratik" terhadap peristiwa sejarah "secara keseluruhan," yang tidak dapat diakses oleh aturan-aturan formal disiplin ilmu sejarah. Sejarah spekulatif merenungkan muatan aktual sejarah "sebagai keseluruhan" *(history as a whole)* dan ia dapat diterangkan dan sekaligus bermakna.[43]

Ada banyak tokoh pemikir yang dapat dimasukkan dalam filsafat sejarah spekulatif ini, dan di antara mereka, misalnya Karl Marx, Spengler, A. Toynbee, dan Ibn Khaldun. Pola sejarah ala Marx itu sendiri dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap primitif, tahap antik, dan tahap Abad Pertengahan dan dunia borjuis-kapitalis. Motor penggeraknya adalah pertentangan kelas, sedangkan tujuannya adalah terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Bagi Spengler (1880-1936) dan A. Toynbee, pola sejarah adalah melingkar (siklis) dan selalu terulang kembali. Teori ini menyebutkan bahwa sejarah dapat dibagi ke dalam sejumlah lingkaran kebudayan atau peradaban yang semuanya melintasi suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan kemudian mengalami kemunduran.[44]

Sama seperti Spengler dan A. Toynbee, Ibn Khaldun mengembangkan filsafat sejarah yang lazim disebut *cylical history* (siklus). Pola sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, mernurut Ibn Khaldun, diawali dengan adanya kebangkitan, kemudian pertumbuhan, dan diakhiri dengan keruntuhan. Sebuah negara berbudaya, misalnya, terbentuk melalui pembangunan atau penaklukan kota-kota oleh masyarakat

---

41 F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah,* terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 17.

42 Misnal Munir, "Ide-Ide Pokok dalam Filsafat Sejarah," Jurnal Filsafat Vol. 22, Nomor 3, Desember 2012, hlm. 273.

43 M.H. Nurul Huda, "Filsafat Sejarah Spekulatif Abdurrahman Wahid," http://www.gusdurian.net/id/article/headline/FILSAFAT-SEJARAH, diakses 9 April 2019.

44 F.R. Ankersmit, *op. cit.,* hlm. 17 dan 19.

"primitif" yang memiliki *ashabiyyah* yang kuat. Tujuan pembentukan negara adalah untuk mewujudkan keinginan-keinginan alamiyah, dan mengaktualisasikan potensi-potensi dan kesempurnaan hidup. Seperti halnya pada aspek-aspek lain kebudayaan yang berperadaban, begitu negara berbudaya tercipa, maka niscya ia mengkuti hukum alam tentang pertumbuhan, kedewasaan, dan akhirnya kemerosotan. Oleh karena itu, hukum alam yang berlaku bagi perkembangan negara ini sering diibaratkan dengan siklus kehidupan manusia, yaitu bayi, anak-anak dan remaja, dewasa, tua, renta, dan akhirnya mati.[45]

Dalam bangunan pengetahuan sejarah, di samping filsafat sejarah spekulatif sebagaimana yang teleh diuraikan, dikenal pula filsafat sejarah kritis. Keberadaan sejarah kritis sendiri berawal dari munculnya sejumlah sejarawan profesional yang kecewa dengan sejarah aliran Ranke dan Neo-Ranke pada akhir abad ke-19. Salah satu pengkritik paling vokal adalah Karl Lamprecht. Dia mengecam lembaga sejarah Jerman yang terlalu menitikberatkan pada sejarah politik dan orang-orang terkenal saja.[46] Sementara itu, di Prancis, dekade 1920-an adalah dasawarsa gerakan "sejarah jenis baru" yang dipimpin oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre yang mengkritik tajam sejarawan tradisional dan menentang dominasi sejarah politik. Ambisi mereka adalah ingin mengganti sejarah politik dengan sejarah yang lebih luas dan lebih manusiawi, yaitu suatu sejarah yang berbicara tentang semua kegiatan manusia. Mereka kurang berminat kepada penceritaan kejadian, dan sebaliknya bagaimana "analisis struktur" dikedepankan dalam penulisan sejarah. Analisis Struktur adalah sebuah istilah yang sejak itu menjadi favorit para sejarawan Prancis, dengan julukan "Mazhab Annales."[47]

Masalah utama yang ditekankan filsafat sejarah kritis adalah sejauh mana pengetahuan yang benar mengenai masa silam dapat diperoleh, dan bagaimana sifat pengetahuan itu. Namun, seorang ahli sejarah tidak hanya membatasi diri pada pernyataan-pernyataan yang benar mengenai masa silam, ia juga berusaha menerangkannya.[48] Oleh karena itu, studi

[45] Azymardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 414.

[46] Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial,* terj. Mustika Zed dan Zulfami, Jakarta: Obor,2002, hlm. 20.

[47] *Ibid.,* hlm. 22.

[48] F.R. Ankersmit, *op. cit*., hlm. 71.

sejarah kritis dimulai dari kesangsian terhadap memori atau sesuatu yang diingat karena memori bisa mengalami pengurangan sehingga tidak akurat, miskin nuansa, dan menyesatkan. Studi sejarah kritis tidak puas hanya menghasilkan sejarah sebagaimana adanya (sejarah sebagaimana dikisahkan), tetapi bagaimana sejarah sebagaimana yang seharusnya (sejarah sebagaimana terjadi) dapat diperoleh. Metode sejarah kritis merupakan bentuk keraguan atau kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan dan dikumpulkan. Memang, sejarawan seharusnya selalu bersikap kritis terhadap semua sumber meskipun pemerolehannya sangat sulit dan memerlukan waktu yang panjang, serta mengorbankan biaya yang besar.[49]

Studi sejarah kritis merupakan sarana yang dapat melahirkan karya-karya sejarah yang disebut sejarah kritis. Dalam konteks ini, pengkaji sejarah kritis tentu harus menguasai masalah teknis ilmu sejarah yang diterapkan dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Secara teknis sejarawan harus menguasai metode sejarah sehingga ia disebut sebagai sejarawan teknis. Sejarawan teknis akan menghasilkan sejarah non-naratif atau sejarah *neoscientific* yang terfokus pada masalah tetapi tidak mengabaikan aspek naratif. Untuk itu, sejarawan teknis akan menghasilkan karya sejarah yang disajikan dengan cara deskriptif-naratif-analitis-sintesis.[50]

Aliran falsafah sejarah kritis berpegangan kepada analisis terperinci dan uraian lengkap atas ide logis pemikiran sejarah. Ia merupakan teori dalam disiplin akademik sejarah yang berkaitan dengan persoalan tentang sifat bukti-bukti sejarah dan sejauh mana keobjektifannya dalam menerangkan peristiwa masa lalu. Dalam konteks ini, persoalan tentang kualitas sumber sejarah sangat ditekankan. Umumnya ia lebih mengacu kepada kajian konsep atau teori dan metodologi sejarah secara sistematik. Pendekatan sejarah kritis lebih memberikan fokus kepada masalah dalam metodologi, khususnya ide-ide logik dan epistemologi. Filsafat sejarah kritis merupakan usaha ahli filsafat untuk melihat bagaimana sejarawan itu bekerja.[51]

---

[49] Sugeng Priyadi, *Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2015, hlm. 95-96.

[50] *Ibid.,* hlm. 97.

[51] Habids Mohd, "Critical Philosophy of History": Bagaimanakah Ia Berbeza Daripada Pendekatan Sejarah Spekulatif ?, https://www.academia.edu/12010131/Perbezaan_Falsafah,

Pada dasarnya memang, sama seperti ilmu lain, sejarah juga mempunyai teori pengetahuan (sering disebut filsafat sejarah kritis). Teori pada umumnya berisi suatu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Dalam filsafat disebut epistemilogi (ilmu tentang pengetahuan). Objek sejarah adalah manusia dan waktu, artinya objek sejarah adalah membahas "pengetahuan" tentang manusia dan waktu. Bagi sejarah penjelasan tentang waktu adalah penting. Sejarah bertanya bagaimana pengetahuan waktu itu diperoleh, pengetahuan itu mutlak atau relatif, cara-cara mengukur kebenaran itu, dan bagaimana model-model penjelasan sejarah.[52]

Sejarah juga dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan dikarenakan objeknya adalah manusia. Akan tetapi, sama-sama membicarakan tentang manusia, kajian sejarah berbeda dengan, misalnya, antropologi. Lebih dari segalanya, objek dari sejarah adalah waktu. Jadi, sejarah mempunyai objek sendiri yang tidak dimiliki ilmu lain secara khusus. Sejarah adalah membicarakan waktu manusia, sehingga dalam padangan sejarah, waktu tak pernah lepas dari manusia.[53]

Selanjutnya dalam praktik penerapan sejarah kritis, agar kebenaran sejarah dapat ditemukan, maka dalam proses penelitian sejarah sangat diperlukan kemampuan untuk mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber, sehingga diperoleh "fakta sejarah" yang secara historis benar. Kemampuan selanjutnya adalah dapat menyusun fakta-fakta yang diperoleh dan yang bersifat fragmentaris ke dalam tulisan sejarah yang sistematis, utuh, dan komunikatif. Kedua proses itu tentu memerlukan kesadaran teoritis yang tinggi dan imajinasi historis yang baik. Dengan begitu sejarah yang dihasilkan itu bukan saja akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer yang terkait pada pertanyaan pokok tentang "apa, siapa, di mana, dan apabila," tetapi juga mengenai "bagaimana" serta mengapa dan apa jadinya."[54]

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan elementer dan mendasar itu (apa, siapa, di mana, dan apabila) adalah "fakta sejarah"

diakses 9 April 2019.

[52] Kuntowijoyo, *Pengantar...*, hlm. 47.

[53] *Ibid.*

[54] Taufik Abdullah, "Sejarah dan Historiografi," dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomiharjo (peny.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif,* Yogyakarta: Ombak, 2016, hlm. xiv.

dan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan adanya sejarah. Sementara itu, jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" adalah suatu rekonstruksi yang berusaha menjadikan semua unsur itu terkait dalam suatu diskripsi yang siebut "sejarah." Jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" ini juga bisa memperlihatkan ikatan "fakta-fakta sejarah" dalam suatu proses yang telah dirumuskan dalam pertanyaan pokok. Dari kesemuanya, jawaban terhadap pertanyaan "mengapa dan apa jadinya," yang menyangkut masalah kausalitas adalah hasil puncak yang bisa diharapkan dari suatu studi sejarah, yang dapat juga disebut sebagai puncak studi sejarah kritis.[55]

Taufik Abdullah menambahkan, bahwa dalam menggunakan metode sejarah kritis untuk menemukan kebenaran historis, di samping penghalusan teknik penelitian dan penggunaan ilmu-ilmu bantu baru, terdapat pula dua gejala lain. *Pertama*, ilmu sejarah perlu terbuka terhadap konsep-konsep yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan lain. *Kedua*, makin berkembangnya "cabang-cabang ilmu sejarah" atau "disiplin perantara," yang menuntut keahlian khusus, di samping ilmu sejarah kritis yang secara konvensional dikenal. Dalam usaha seorang sejarawan untuk mengerti dinamika sosial dari masyarakat tertentu, misalnya, ia akan sangat beruntung kalau mempertimbangkan berbagai penemuan serta teknik yang telah dikembangkan ilmu lain, seperti sosiologi.[56]

Untuk itu, dalam konteks dekonstruksi historiografi kolonial, misalnya, yang harus dilakukan adalah dengan kajian sejarah yang kritis dan struktural bukan dengan Indonesiasentrisme yang teoritis-spekulatif. Bahasa yang lain adalah merubah dari sejarah mistis menjadi *scientific*. Untuk keperluan dekonstruksi historiografi kolonial ini diperluakan teori serta metodologi dari sejarah sebagai disiplin, yang akan memperlengkapi sejarawan dengan alat-alat analitis untuk menggarap sumber-sumber dan kerangka konseptual untuk menyusun sintesa dari konstruksi sejarah.[57]

Namun demikian, dalam konteks tertentu sejarah spekulatif sangatlah dibutuhkan. Misalnya, dalan penelitian sejarah, ada kenyataan

[55] *Ibid.*

[56] *Ibid.,* hlm. xvii-xviii.

[57] Sri Margana, "Historiografi Tanpa Tradisi," Epilog dalam Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2014, hlm. 379-380.

bahwa sejarawan analitik yang bergantung secara ketat pada sumber *(evidence)* sejarah, mungkin saja ia menemukan banyak "*blank spots*" yang tidak diketahui tetapi mempengaruhi sejarah secara signifikan. Dihadapkan kekosongan yang misterius itu, sejarawan biasanya secara otomatis tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menjatuhkan inferensi berdasarkan asumsi-asumsi, yang pada gilirannya menciptakan ruang bagi spekulasi. Spekulasi biasanya tidak hanya berlaku pada sejarah secara umum tetapi juga sejarah yang sifatnya partikular.[58]

2. Pendekatan Multidimensional dalam Historiografi

Penting ditegaskan bahwa dalam menyuguhkan tulisan sejarah harus berasaskan keadilan. Artinya, pendekatan yang digunakan dalam penulisan sejarah adalah "sejarah total." Selain perlu menggunakan berbagai pendekatan ilmu-ilmu yang lain dalam pengungkapan peristiwa sejarah, historiografi yang disuguhkan juga harus berkeadilan, yaitu sejarah tentang seluruh aspek kehidupan masyarakat; tidak hanya berkisar pada bidang yang dianggap penting-penting. Historiografi yang berkeadilan semestinya membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perkembangannya. Sejarah total adalah sebuah ilmu yang bertujuan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi struktural yang tersembunyi dan dalam. Seorang sejarawan total dituntut harus berusaha mengumpulkan, dengan menggunakan seluruh disiplin ilmu sosial (politik, ekonomi, antropologi, etnografi, geografi, dan lain-lain), sebanyak mungkin data dengan menggali dan menyaring seluruh "warisan" masyarakat-masyarakat masa silam.[59]

Menurut Bambang, persoalan historiografi tidak hanya sekedar berkembang bersama dengan tradisi pedekatan ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada tradisi empirik dalam penelitian sejarah, tetapi bagaimana memahami secara kritis perbedaan antara sejarah sebagai sebuah realitas objektif masa lalu dengan sejarah sebagai sebuah hasil proses intelektual kekinian. Di samping itu para sejarawan juga melupakan sebuah kenyataan penting bahwa sejarah sebagai realitas objektif yang terjadi di masa lalu merupakan tindakan apa saja yang

[58] M.H. Nurul Huda, *op. cit.*
[59] Azyumardi Azra, *op. cit.,* hlm. 11-12.

bersifat sangat manusiawi, bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia secara normatif.[60]

Pada saat yang sama, sejarah sebagai sebuah peristiwa hanya dikaitkan dengan sesuatu yang penting secara sosial. Bagi peristiwa yang dianggap tidak memiliki arti penting secara sosial, yang sebagian besar merupakan sejarah masyarakat kebanyakan, maka seolah-olah tidak ada sejarah didalamnya. Oleh karena itu, sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat tidak mendapat perhatian. Akibatnya, kajian sejarah sejenis *subaltern* atau *anderside* belum mendapat tempat yang memadai dalam sejarah Indonesia yang ditulis oleh sejarawan Indonesia.[61] Untuk itu sejarah Indonesiasentris dengan pendekatan multidimensional semestinya tidak terjebak hanya pada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting saja dan secara tidak adil mengganggap peristiwa yang kecil-kecil dan biasa-biasa saja bukanlah suatu sejarah.

Bukankah pada dasarnya pendekatan multidimensional dimunculkan dikarenakan adanya visi terhadap permasalahan atau objek pengkajian yang harus didekati dari pelbagai segi atau aspek dan perspektif dari semua peristiwa sejarah tanpa kecuali. Pendekatan multidimensional diperlukan karena semakin luasnya kesadaran bahwa pelbagai gejala tidak dapat lagi dipandang secara sederhana tetapi bersifat kompleks. Oleh karena itu, kompleksitas itu hanya dapat dikupas dan dianalisis dengan pelbagai unsur atau aspeknya dan dengan pendekatan dari pelbagai perspektif, misalnya perpektif ekonomis, sosial, polotik, kultural, dan lain sebagainya.[62] Untuk memperkuat ilmu-ilmu tersebut maka diperlukan kerja sama dan koordinasi interdisipliner yang lebih erat dan sistematis. Universitas seharusnya mendorong mahasiswa sejarah untuk juga mempelajari ilmu-ilmu tersebut, atau sebaliknya mahasiswa yang mempelajari ilmu-ilmu sosial harus diberi kesempatan mempelajari sejarah secara lebih banyak.[63]

---

[60] Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!,* Jakarta: Ombak, 2006, hlm. 41.

[61] *Ibid.*, hlm. 42.

[62] Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 95.

[63] Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. xxvii.

Dalam konteks ini, maka multidimensionalitas gejala sejarah perlu ditampilkan agar gambaran menjadi lebih bulat dan menyeluruh sehingga dapat dihindari kesepihakan atau determinisme, yang menyebabkan narasi sejarah menjadi kurang akurat. Konsekuensi dari pengungkapan berbagai dimensi tersebut berimplikasi kepada metodologis yang memerlukan pendekatan yang lebih kompleks, atau pendekatan multidimensional. Bagi sejarawan yang akan menerapkan metodologi ini, maka dia, misalnya, perlu menguasai pelbagai alat analisis yang dapat dipinjam dari ilmu sosial.[64]

Sejarawan, menurut Mohammad Ali, harus sadar akan tidak memadainya pengetahuan sejarah, sifatnya yang sementara, serta subjektivitasnya berkaitan dengan sifat multidimensi dari realitas sejarah. Selain itu, sejarawan juga dituntut untuk tidak membatasi pemikirannya pada hakikat pengetahuan sejarah dan pada studi sejarah sebagai pencarian kebenaran semata-mata, tetapi juga yang mencakup pemikiran tentang implikasi filosofis dari disiplin ilmunya maupun soal makna dari apa yang sedang ia lakukan dalam hubungannya dengan masyarakatnya dan dengan situasi di mana ia berada. Ia kemuadia akan menyadari bahwa studi sejarah hanya dapat dan hanya mungkin memiliki arti jika proses sejarah dipandang sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak pasti dan terbuka bagi partisipasi manusia secara sadar di dalamnya.[65]

Demikian pula, Susanto Zuhdi[66] mengkritisi praktik penulisan sejarah yang katanya Indonesia-sentris, tetapi tidak seperti anjuran penggagasnya, Sartono Kartodirjo. Menurutnya, anjuran Sartono dalam penerapan multidimensional ini banyak tidak dilakukan oleh generasi penerusnya, dan yang lebih banyak dianut adalah "Indonesia-sentris"nya. Itu pun dengan pandangan yang sempit, dalam arti hanya membalik pandangan dari kolonial ke nasional, dari pemberontak dalam pandangan kolonial menjadi pahlawan dalam pandangan nasional. Menjadi akut lagi masuknya terminologi "pahlawan nasional" tidak dibedakan mana yang

---

[64] *Ibid.,* hlm. 87.

[65] Soedjatmoko, "Sejarawan Indonesia dan Zamannya," dalam Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 366.

[66] Susanto Zuhdi, "Metodologi Strukturistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif," dalam Djoko Marihandono (peny.), *Titik Balik Historiografi di Indonesia,* Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008, hlm. 11.

untuk kepentingan ideologis negara-bangsa dan mana yang akademis (ilmu sejarah). Semestinya adalah bagaimana dengan pendekatan multidimensional penulisan sejarah dapat mengungkap proses-proses sosial yang mendasari proses politik, tata hubungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks, pendekatan sruktural terhadap sejarah Indonesia akan dapat memberi sorotan jelas mengenai pelbagai segi masyarakat Indeonesia dan pola perkembangannya. Inilah pentingnya pendekatan multidimensi dalam pengungkapan dasar bagi proses sosial dan politik mengenai masyarakat.

Karena dengan pendekatan struktural dalam banyak karya sejarah belum mampu menyingkirkan hujatan terhadap kolonial, yang intinya adalah belum menemukan kebenaran sejarah, maka Susanto menawarkan pendekatan strukturistik dalam metodologi sejarah. Menurutnya, tema sentral metodologi strukturistik adalah bagaimana melihat peran manusia sebagai agensi di dalam proses-proses penstrukturan sosial. Gagasan tentang agensi adalah perhatian pokok dalam metodologi strukturistik dan erat dengan ide realisme sosial. Sementara itu, konsep agensi memiliki dua arti, yaitu *pertama,* kekuatan otonomi relatif sebagai keseluruhan atau sebagian sistem yang menghasilkan agen perubahan. *Kedua,* kekuatan orang untuk bertindak atas nama orang lain menurut aturan atau instruksi yang berupaya membawa hasil yang diinginkan.[67]

Sisi lain, Bambang juga mengkritisi bagi mereka yang terlalu terbuai oleh pendapat bahwa keilmiahan sejarah hanya bisa dicapai melalui sejarah empirik, sejarah sruktural, prinsip deskriptif analitis, dan penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah.[68] Terlepas dari yang menyangkut tuntutan terhadap kebenaran empirik dan komitmen terhadap interseubjektivitas pada rekonstruksi masa lalu, pada tingkat metodologis, historisisme baru telah mendorong munculnya kesadaran dekonstruktif bahwa kehidupan sehari-hari juga merupakan bagian yang intergral dari proses sejarah. Pengkajian sejarah mulai bergerak dari sejarah makro yang didasarkan pada tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial menjadi sejarah mikro yang didasarkan pada pengalaman kehidupan sehri-hari orang kebanyakan. Jika sejarah yang didasarkan pada pendekatan ilmu-ilmu sosial menghalangi aspek kualitatif dari

[67] *Ibid.,* hlm. 12-13.
[68] Bambang Purwanto, *op. cit.,*, hlm. 1.

masa lalu, maka sejarah mikro menampilkan wajah manusiawi dari masa lalu. Menurut pendapat ini, yang hanya terpaku pada pendekatan ilmu-ilmu sosial gagal merekonstruksi dan memahami aspek kemanusiaan dari fakta-fakta sejarah yang ada. Akibatnya, sejarah hanya dijelaskan sebagai realitas hubungan antara struktur yang rasional dan logis, sebaliknya mengesampingkan sejarah sebagai hasil dari tindakan atau perilaku manusia yang tidak selalu seragam, rasional, dan logis.[69]

Memang dalam perkembangan di dunia akademik, tradisi Indonesiasentris itu dikembangkan bersama-sama dengan tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam historiografi Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah persoalan intersubjektivitas yang menjadi ciri penting dari historiografi kolonial dapat diatasi oleh historiografi pascakolonial yang Indonesiasentris. Sejak awal perkembangannya, historiografi Indonesiasentris ternyata cenderung menjauh dari sejarah objektif karena berkembangnya prinsip dekolonialisasi historiografis yang bersifat ultranasional dan lebih mementingkan retorika.[70]

Terlepas dari alternatif-alternatif dalam menemukan kebenaran penulisan sejarah tersebut, kedudukan pendekatan mulitidimensi yang bercirikan pendekatan struktural tetap penting keberadaanya dalam suatu metodologi. Ia juga bagian dari metodologi alternatif yang dapat menemukan kebenaran dalam sejarah, akan tetapi dengan catatan "tepat dalam pengunaannya." Analisis struktural dalam historiografi pada dasarnya adalah ingin menyuguhkan bagaimana tulisan sejarah yang dihasilkan itu minimal dapat mendekati objektif jika tidak dapat mendapatkan objektif seratus persen. Dengan analisis struktural, hasil narasi sejarah dapat dianalogikan bagaikan struktur bangunan yang utuh dan menyeluruh yang ditopang dengan elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuknya. Sebagaimana diungkapkan Kuntowijoyo,[71] bahwa unsur-unsur dari sebuah struktur tunduk kepada hukum yang mengatur keseluruhan sistem itu. Unsur-unsur itu tidak berdiri sendiri secara terpisah, walaupun masing-masing mempunyai hukum tersendiri, tetapi menjadi milik sebuah struktur.

---

[69] *Ibid.,* hlm. 8-9.

[70] *Ibid.,* hlm. 11.

[71] Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esa Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental,* Bandung: Mizan, 2001, hlm. 21.

Dalam kajiannya Sartono diterangkan bahwa unsur-unsur yang membentuk struktur bangunan cerita sejarah adalah ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Secara aplikatif dapat dijelaskan, bahwa teori-teori dan konsep-konsep yang tepat yang terdapat dalam ilmu sosial dapat digunakan untuk menganalisis fakta-fakta sejarah sehingga tulisan sejarah yang dihasilkan tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan konteks sosial-kulturalnya. Pendeknya, tulisan sejarah yang disuguhkan adalah hasil dari analisis secara mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.[72]

Epistimologi pendekatan multidimensional dalam suatu kajian memang menghindarkan pengkaji terhindar dari deterministik yang sempit. Pendekatan ini mencoba menyuguhkan hasil kajian yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, tidak hanya kajian sejarah, dalam ilmu lain semisal dalam kajian agama pun dituntut untuk mengunakan pendekatan multidimensinal jika suatu kesempurnaan ingin dicapai. Amin Abdullah mengungkapkan, bahwa dalam studi agama di Indonesia perlu pendekatan agama yang berwajah ganda, yakni pendekatan yang bersifat teologis-normatif dan sekaligus pendekatan yang bersifat historis-kritis. Kedua pendekatan itu tidak terpisah antara satu dan lainnya, melainkan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, ibarat sekeping mata uang logam di mana antara kedua permukaannya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh.[73]

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, dengan melihat kondisi objektif masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamannya serta membandingkannya dengan berbagai situasi dan kondisi politik di luar negeri, studi agama di Indonesia terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan. Studi dan pendekatan agama yang bersifat komprehensif, multidisipliner, interdisipliner dengan mengunakan metodologi yang bersifat historis-kritis, melengkapi penggunaan metodologi yang bersifat doktriner-normatif, adalah pilihan yang untuk masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamannya dan kepercayaannya.[74]

[72] Sartono Kartodirdjo, *op. cit*., hlm. 2.

[73] M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 4.

[74] *Ibid.,* hlm. 7.

C. MENJADI PENELITI SEJARAH

Tanpa mengesampingkan arti penting peran sejarawan amatir atau sering juga disebut sejarawan informal, bahwa yang dimaksud peneliti sejarah dalam konteks ini adalah sejarawan formal, profesional atau akademisi. Dalam menghasilkan tulisan sejarah, sejarawan informal umumnya tidak menggunakan konsep dan metodologi sejarah sebagai ilmu. Kebanyakan terdapat pula faktor subjektivisme yang tinggi dan rendahnya kredibilitas sumber yang digunakan. Berbeda dengan sejarawan informal, sejarawan akademik dilatih dengan wawasan teoritik, apapun jenis teori yang dipilihnya, menerapkan metodologi dan penggunaan sumber yang beragam dengan metode kritik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejarawan akademik juga menerapkan prinsip yang selalu ditekankan dalam bengkel kerja sejarah, yaitu menguasai keterampilan dalam heuristik, kritik, dan penerapan teori dan metodologi yang tepat, sehingga hasil penelitiannya (historiografi yang dihasilkan) dapat dipertanggungjawabkan.[75]

Sementara itu, Abdurracman Surjomihardjo[76] mengingatkan bahwa tipe penulis sejarah (sejarawan profesional) ada dua, yaitu sejarawan yang bersemangat (sejarawan kupu-kupu) dan ada sejarawan teknis (bergaya ulat). Bagi sejarawan kupu-kupu, ia tidak percaya akan kemungkinan maupun harapan dapat menulis sejarah yang lengkap dan sempurna. Seleksi pokok uraian maupun fakta-fakta merupakan suatu keharusan, yang hanya penting setelah diseleksi untuk menemukan dasar-dasar umum. Sebaliknya, sejarawan bergaya ulat menempatkan penemuan fakta-fakta baru sebagai yang utama dan membiarkan tafsiran timbul dengan sendirinya. Bagi sejarawan teknis, kebenaran murupakan hasil pengalamannya dalam proses penelitian dan penulisan yang memakan waktu dan ketekunan, dan sebaliknya bagi sejarawan yang bersemangat kebenaran merupakan interpretasi (sering kali interpretasi yang berlebihan) justru karena ia kurang melakukan penelitian yang mendalam atau karena tergesa-gesa membuat penyajian yang berkompromi dengan pandangan politik mutakhir yang kebetulan sedang dominan.

---

[75] Susanto Zuhdi, "Metodologi Strukturistik …, hlm. 4.

[76] Abdurracman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi,* Jakarta: Yayasan Idayu, 1979, hlm. 111.

Lepas dari semunya, sebagaimana diingatkan oleh Budiawan,[77] bahwa sejarawan "profesional" sebaiknya memosisikan dirinya dalam situasi di mana penafsiran masa lalu telah terbebas dari monopoli penguasa dan masa lalu bukan lagi eksklusif urusan sejarawan. Namun, yang perlu diingat pula adalah bahwa kerja sejarawan bukanlah kerja "pertukangan," yang seakan-akan netral dalam arti bebas nilai. Tidak ada sejarah yang bebas nilai. Setiap narasi sejarah, sadar atau tidak sadar, niscaya berangkat dari suatu perspektif; dan perspektif itu dibentuk oleh berbagai faktor. Salah satunya, dan ini barangkali yang paling utama, adalah nilai-nilai keutamaan yang hendak diperjuangkan oleh sejarawan. Kalau tidak ada narasi sejarah yang bebas nilai, maka setiap sejarawan jelas harus sadar dengan nilai-nilai keutamaan yang menjadi komitmennya. Dengan demikian narasi sejarah yang dihasilkannya bukanlah demi sejarah itu sendiri, tetapi demi suatu keutamaan yang diyakini akan membawa kemaslahtan publik.

Sejarah tidak pernah demi sejarah itu sendiri, tetapi ada adalah sejarah-untuk. Ini berarti menulis sejarah adalah sebuah tindakan yang melibatkan diri ke dalam moralitas, dalam arti berangkat dengan pilihan-pilihan etis. Sejarawan dengan demikian berperan sebagai seorang moralis, yang artinya senantiasa menunjukkan niai-nilai moral, tetapi tidak boleh mengaku sebagai penjaga moralitas. Sebagai moralis, sejarawan lalu menjadi mirip seorang penyair, sebagai pembuat kata-kata baru, pembentuk bahasa-bahasa baru, dan pembuat dunia-dunia baru. Sejarawan menjadi semacam "provokator" untuk membantu membukakan hal-hal yang mungkin, yang sebelumnya barangkali tak terbayangkan. Dalam konteks inilah masa lalu senantiasa perlu terus menerus ditinjau-ulang tak lain untuk membuka berbagai masa depan yang mungkin.[78]

Oleh karena itu, sikap peneliti sejarah haruslah jujur. Sementara itu, jujur itu hanya mungkin apabila teropong pendirian itu diperlengkapi dengan lensa kejujuran dan disertai alat yang lain, yaitu "mikroskop penelitian" untuk menelaah, meneliti, dan menggali dengan sesempurna, seteliti, sehalus, dan setajam mungkin, tetapi dengan

[77] Budiawan, *Sejarah Sebagai Humaniora*, Yogyakarta: Ombak, 2014, hlm. 3.
[78] *Ibid.,* hlm. 4.

maksud mendapatkan fakta yang sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya.[79]

Untuk itu dalam penelitian sejarah, agar diperoleh narasi yang benar, maka peneliti sejarah, *pertama*, harus mengumpulkan fakta-fakta yang sebanyak-banyaknya. Penulis cerita sejarah tidak boleh merasa puas dan bangga dengan fakta-fakta yang dipandang belum lengkap. *Kedua*, peneliti sejarah harus mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang bersifat utama, kurang utama, primer maupun sekunder, tersier dan sebagainya dengan sesempurna mungkin. Mengumpulkan bahan-bahan berupa catatan, buku, wawancara, dan sebagainya, serta menyusun dasar penelitian berupa sumber, bahan yang kuat, sehat, benar, dan terpercaya berdasarkan metode ilmiah yang shahih. *Ketiga*, peneliti sejarah harus mempelajari, mencari, menguasai teknik-teknik penyelidikan, yaitu metode-metode atau cara-cara penyelidikan yang tepat, dan mempergunakan teknik-teknik ini.[80]

Sebagai peneliti sejarah, maka yang harus dipahami adalah bahwa sejarah itu hadir dalam tiga aspek, yaitu aktualitas masa lalu, catatan, teknik atau metode penyelidikan. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia adalah sejarawan terlatih, berarti dia adalah seorang praktisi yang terampil dalam seni sejarah. Seni sejarah berkonotasi dengan kemahiran penguasaan metode, teknik, dan seluruh proses yang terlibat dalam pembuatan rekaman. Ketika kita mengatakan tentang seseorang bahwa dia adalah sejarawan terlatih, maka bukan bermaksud bahwa dia hanya tahu banyak fakta tentang masa lalu, meskipun ini mungkin terjadi, tetapi dia tahu dan dapat menerapkan teknik yang tepat dalam mencari tahu fakta.[81]

---

[79] R. Moh. Ali, *Pengantar …*, hlm. 65.

[80] *Ibid.*

[81] Cilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide to Historical Method,* New York: Fordham University Press, 1957, hlm. 18.

BAB III

KAJIAN SEJARAH LOKAL DAN MASALAH METODOLOGI

A. METODOLOGI SEJARAH

Metodologi mengandung arti ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Adapun dalam penggunaan penelusuran dengan tata cara tertentu untuk menemukan kebenaran ini tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Jadi, metodologi adalah ilmu yang tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi berasal dari bahasa Yunani "*metodos*" dan "*logos*," kata *metodos* terdiri atas dua suku kata yaitu "metha" yang berarti melalui atau melewati dan "hodos" yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan dan logos artinya ilmu.

Dalam praktiknya, metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya mencakup pembentukan konsep, proposisi (ungkapan yang dapat dibuktikan kebenaran atau kesalahannya), model, hipotesis, teori, dan termasuk metode itu sendiri. Jadi, metodolog adalah pemahaman mengenai metode bukan metode itu sendiri. Metodologi menggali pengertian bahwa dalam ilmu pengetahuan, dalam hubungannya dengan penelitian, yang memegang peranan penting adalah filsafatnya, yang kemudian dijabarkan ke dalam cara-cara yang praktis, sebagai metode. Metodologi adalah sebagai cara-cara yang mengatur prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, sekligus pelaksanaannya terhadap masing-masing ilmu secara khusus.[82]

[82] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 41.

Jadi, metodologi adalah membahas aturan-aturan tertentu terkait dengan prosedur intelektual dalam komunitas ilmiah termasuk di dalamnya pembentukan konsep-konsep, membangun model-model, memformulasikan hipotesis-hipotesis, dan menguji teori-teori. Dalam lingkup pengkajian sejarah metodologi dapat disebut dengan "Filsafat Sejarah Formal" atau "Filsafat Sejarah Kritis." Persoalan yang dibahas dalam filsafat sejarah kritis adalah mencakup sejarah dan bentuk-bentuk pengetahuan yang lain, kebenaran dan fakta dalam sejarah, objektivitas sejarah, eksplanasi dalam sejarah, masalah pemahaman sejarah, masalah sebab-sebab dalam sejarah, dan determinisme sejarah.[83]

Metodologi bukanlah metode, bukan pula seperangkat metode, dan bukan pula deskripsi mengenai metode-metode. Metode adalah teknik riset atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan metodologi adalah falsafah mengenai proses riset. Oleh karena itu, metodologi berkaitan erat dengan teori yang dalam disiplin sejarah seringkali disebut dengan "kerangka referensi." Kerangka referensi dapat berarti hipotesa yang menjelaskan faktor atau faktor-faktor yang menentukan terjadinya suatu situasi sejarah. Kerangka referensi dapat juga disebut dengan "kerangka analisis" yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dalam kajian sejarah.[84]

Jika metode lebih merupakan cara bagaimana orang memperoleh pengetahuan, sedangkan metodologi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari pada metode, karena metodologi adalah mengetahui bagaimana harus mengetahui. Metode dianalogkan dengan kemampuan seorang tukang batu yang memasang batu dengan campuran semen saja, sedangkan metodologi jauh lebih luas, yaitu ibarat seorang arsitek yang merencanakan sejak awal pembuatan bangunan, kekuatan, arsitektur, dan kenyamanannya.[85]

Secara operasional diketahui bahwa perkembangan suatu ilmu pengetahuan berhubungan erat dengan halusnya atau sempurnanya prosedur dan teknik penyelidikannya. Tentu saja orang yang semata-

[83] Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah," dalam T. Ibrahim Alfian dkk (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hlm. 410.

[84] *Ibid.,* hlm. 412-413.

[85] Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 11.

mata mengumpulkan dan menyusun naskah-naskah lengkap dari dokumen-dokumen sejarah dengan urutan kronologis tidak terlalu banyak memerlukan metodologis daripada seorang peneliti sejarah yang menyusun sebuah cerita berdasarkan fakta-fakta yang disaring dari sumber-sumber sejarah.[86] Untuk itu, metodologi sebagai pokok dari pengkajian ilmu (sejarah) perlu diketengahkan apabila penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya (kausalitas), kondisi lingkungannya, dan konteks sosial-kulturalnya. Intinya, secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.[87]

Ketika volume fakta-fakta yang tersimpan dalam sumber-sumber begitu besar dan banyak, ditambah lagi tuntutan-tuntutan penelitian dalam ilmu sejarah, maka kecuali konsepsi-konsepsi teoritis serta filosofis, diperlukan pula perlengkapan alat-alat metodologis dan teoritis dengan potensi tinggi untuk mengorganisasikan penelitian bahan-bahan sejarah. Dengan demikian, penelitian sejarah dapat memberikan gambaran sejarah yang lebih terperinci dan lebih mendalam.[88]

Metodologi berkaitan erat dengan masalah teori. Teori dalam disiplin sejarah seringkali juga disebut "kerangka referensi" atau "presuposisi" atau personal "equation," yaitu suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti, dalam menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh dari analisis sumber, dan juga mengevaluasi hasil penemuannya. Teori dapat juga disebut dengan "kerangka analisis" atau "kerangka konseptual" untuk menjelaskan pendekatan yang dipakainya.[89]

Secara sederhana arti konsep dapat didefinisikan sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk memahami, menafsirkan, menganalisis, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial-budaya yang dipelajari. Banyak

[86] Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2014 hlm. 91.

[87] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 2.

[88] *Ibid.,* hlm. 90.

[89] Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah…, hlm. 412-413.

sekali contoh konsep dalam ilmu sosial-budaya, seperti masyarakat, kebudayaan, pendidikan, sekolah, konflik, suku bangsa, dan sebagainya.[90]

Konsep menduduki posisi yang sangat penting dalam dunia ilmiah. Boleh dikatakan bahwa segala sesuatu didasarkan pada konsep-konsep. Konsep adalah pikiran-pikiran, pandangan-pandangan dari manusia yang bisa diwujudkan dan dinyatakan. Sebuah konsep dalam ilmu sosial-budaya bisa diberi definisi atau batasan berbagai macam. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada definisi yang paling benar, karena setiap konsep dapat diberi definisi dari sudut pandang tertentu dan dengan cara tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah definisi sebuah konsep memungkinkan peneliti mempelajari, memahami dan menjelaskan gejala yang diteliti dengan baik. Oleh karena itu, sebelum merumuskan sebuah definisi seyogianya peneliti melakukan kajian pustaka yang cukup komprehensif agar dapat memperoleh berbagai definisi yang teleh dibuat oleh para ilmuwan lain berkenaan dengan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya.[91]

Dalam penulisan sejarah, analisis adalah hal yang penting dilakukan jika tulisan yang ingin dihasilkan berupa sejarah kritis. Sementara itu, dalam melakukan analisis pengkaji memerlukan alat-alat yang dibutuhkan untuk memudahkan analisis itu. Alat-alat analisis itu harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat berfungsi secara operasional, yaitu relevan dan cocok dengan objek yang dianalisis. Oleh karena itu, langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi, yang relevan, yang mencakup pelbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis.[92]

Perlu ditegaskan, bahwa teori tidak dapat memberikan "jawaban" kepada peneliti, akan tetapi teori dapat membekali peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukannya terhadap fenomena yang hendak ditelitinya. Misalnya, ketika Sartono Kartodirdjo menjelaskan tentang "Gerakan Protes di Pedesaan Jawa," dia menggunakan sebagian kerangka analisis yang pernah dikemukakan oleh Henry A. Landsberger

[90] Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Paradigma, Epistimologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pemetaan," *Makalah*, Disampaikan dalam Pelatihan "Metodologi Penelitian," diselenggarakan oleh CRCS-UGM di Yogyakarta, 12 Februari – 19 Maret 2007, hlm.13.

[91] *Ibid.,* hlm. 14-15.

[92] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial* …, hlm. 2.

dalam "*The Role of Peasent Movements and Revolt in Development: An Analitical Framework*" untuk memahami asal-usul, perkembangan, dan akibat-akibat pergerakan yang bersifat protes sosial. Sebuah pendekatan lain adalah dengan pendekatan eklektik dalam buku T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (1987). Pendekatan ini mempergunakan teori pakar sosiologi Amerika, Neil J. Smelser, yang dikemukakan dalam bukunya Theori *of Colective Behavior* (1962).[93]

Dalam pengerjaannya dan dalam perumusan sasaran pokok sejarah lokal, yang dengan jelas memberi pembatasan geografis dari ruang lingkupnya, seringkali berkaitan erat dengan sejarah sosial. Secara pokok yang ideal dari sejarah sosial ialah struktur dan proses dari tindakan dan interaksi manusia. Jadi, jika pendekatan sejarah sosial ini digunakan, maka suatu sejarah lokal harus memperhitungkan dengan baik ikatan struktural, yaitu jaringan peranan-peranan sosial yang saling bergantung, terhadap aktor sejarah. Dalam usahanya untuk mengerti dinamika sosial tertentu seorang ahli sejarah lokal tentu akan mencoba menjawab pertanyaan "apa kaitan dari peristiwa atau gejala yang ditelitinya dengan struktur sosial kebudayaan dan ekonomi?" Jika ia sedang memperhatikan suatu atau serangkaian peristiwa, maka ia tidak akan puas, dalam menerangkannya, hanya dari sudut hubungan kausal (sebab-akibat) dengan peristiwa-peristiwa lain. Lebih dari itu, ia akan menerangkan pula dari sudut kerangka sosial-kultural tempat peristiwa itu terjadi.[94]

B. KORELASI SEJARAH LOKAL DENGAN SEJARAH STRUKTURAL

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lokasi yang kecil atau lokal tertentu dapat sangat menarik dikarenakan mengungkapkan soal-soal kemanusiaan secara khusus, atau terdapat di dalamnya pola-pola kelakuan yang merupakan bahan perbandingan dengan kasus lain. Sejarah naratif mengenai peristiwa kecil atau lokal dapat bermakna dengan syarat belbagai fakta ditempatkan dalam suatu konteks atau mengandung struktur, pola, atau kecenderungan tertentu. Di sini ada

[93] *Ibid.,* hlm. 414.

[94] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, hlm. 20-21-

titik pokok yang memungkinkan perbandingan dengan fakta dari sejarah lokal lain.[95]

Dengan demikian, unsur sejarah lokal bermakna karena dihubungkan dengan konteks makro serta dapat dicakup dalam generalisasi, misalnya, sebarapa jauh suatu kasus lokal itu representatif bagi gejala umum tingkat nasional, antara lain dalam rangka proses inovasi atau transformasi. Proses ini biasanya membawa dampak, antara lain konflik sosial antara beberapa golongan elite. Mengenai proses semacam ini bukan tingkat kejadiannya yang penting, tetapi mengenai kualitasnya sama pentingnya. Kriterianya bukanlah dampaknya, melainkan strukturnya.[96]

Dalam penulisan sejarah lokal sumber yang cukup lengkap dibutuhkan karena ia berupa sejarah mikro, yaitu suatu jenis sejarah yang menuntut metodologi khusus, yang mempunyai kerangka konseptual cukup halus agar dapat melakukan analisis yang tajam, sehingga pola-pola mikro dapat diekstrapolasikan. Sartono menegaskan, bahwa sejarah naratif mengenai peristiwa kecil atau lokal tidak terlalu menarik. Baru mulai bermakna kalau pelbagai fakta ditempatkan dalam suatu konteks atau mengandung struktur, pola, atau kecenderungan tertentu.

Jadi, sejarah lokal baru memperoleh relief apabila ada pendekatan struktural. Misalnya, ada masalah tentang struktur agraris, struktur kekuasaan, struktur sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan strukturallah yang mampu menempatkan peristiwa unik ke dalam kerangka konseptual, sehingga dapat dibuat generalisasi, yang berarti penuh makna. Dengan demikian, dalam pengungkapan sejarah lokal tidak tengelam dalam naratif rinci, yang dalam perspektif makro tidak bermakna sama sekali.[97]

Berbeda dengan sejarah prosesual yang menggambarkan kejadian sebagai proses, yang dicakup dalam uraian naratif atau cerita, maka sejarah struktral adalah pengungkapan aspek struktural dari kejadian-kejadian, yang biasanya dengan menggunakan analisis. Jadi, sejarah struktural mau tak mau menjadi sejarah analitis, meskipun tidak semua sejarah analitis tidak dengan sendirinya adalah sejarah struktural, antara lain apabila yang diungkapkan terutama unsur-unsur suatu entitas atau faktor-faktor yang menjadi kausalitas kejadian. Misalnya, ketika

[95] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial* …, hlm. 73.
[96] *Ibid.*, hlm. 74.
[97] *Ibid.*, hlm. 75.

mengkaji sejarah kota berdasarkan perspektif struktural, maka sejarawan akan membagi *lay-out* kota menurut golongan sosial yang menghuni daerah-daerah tertentu. Dapat dilacak pula pola perkembangan berdasarkan pertumbuhan ekonominya serta transportasinya. Demikian pula, dapat dibeda-bedakan distrik perusahaan, perkantoran, pendidikan, pemukiman, dan lain sebagainya. Sementar itu, untuk mengekstrapolasikan struktur bacaan dokumen atau pengematan gejala diperlukan peralatan analitis (*analytical tools*) yang terdiri atas konsep-konsep, teori-teori dan sebagainya.[98]

Jadi dengan sejarah struktural atau sejarah analitis diharapkan mempunyai kemampuan mengungkapkan pelbagai aspek atau dimensi gejala sejarah baik secara makro maupun mikro. Menurut Sartono, sekarang ini ada kebutuhan mendesak untuk mengadakan pengkajian sejarah yang lebih mendalam seperti apa yang dilakukan oleh ilmuwan dari sosiologi, antropologi, dan politikologi. Oleh karena itu, kiranya akan memadai apabila sejarawan mengenal konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial untuk dipergunakan dalam melakukan analisis.[99]

Ketika kajian sejarah lokal mengemukakan tema-tema pokok seperti: (1) Dinamika masyarakat pedesaan, (2) Pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan integrasi sosial, (3) Interaksi antara suku bangsa dalam masyarakat majemuk, (4) Revolusi nasional di tingkat lokal, dan (5) Biografi tokoh lokal, maka sejarawan sebenarnya telah menunjukkan semangat interdisipliner yang menggunakan teori dan konsep-konsep ilmu sosial, misalnya, sebagai alat analitis. Sementara itu, kesadaran dalam penggunaan teori dan konep-konsep ilmu-ilmu sosial telah melahirkan tulisan-tulisan yang sanggup menjelaskan sejarah secara struktural dalam pola-pola sosial dan dinamika-dalam yang terdapat di lokalitas yang dibicarakan. Menerangkan perubahan sosial dan peristiwa sejarah dengan cara ini ternyata telah memberi gambaran betapa kaya sebenarnya sejarah lokal di Indoensia. Tentang kausalitas sejarah, penulis kebanyakan telah mampu melihat arus bawah yang mendasari peristiwa, lebih dari gejala-gejala di permukaan.[100]

---

98 *Ibid.*, hlm. 110-111.

99 *Ibid.*

100 Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Tiara wacana: 1994, hlm. 121.

C. SEJARAH LOKAL DAN PENDEKATAN MULTIDEMENSIONAL

1. Pendekatan Sosiologi dalam Penulisan Sejarah

Peter Burke mengungkapkan, bahwa sebenarnya secara intelektual sejarawan dan sosiologiwan adalah tetangga dekat, artinya praktis kedua disiplin itu (seperti antropoligiwan) sama-sama menaruh perhatian pada masyarakat secara keseluruhan beserta seluruh aspek perilaku manusia. Sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang masyarakat manusia, dengan titik berat pada generalisasi struktur masyarakat serta perkembangannya. Sementara itu, sejarah lebih cocok didefinisikan sebagai studi tentang masyarakat manusia dalam arti jamak, dengan titik berat pada perbedaan-perbedaan antar-masyarakat dan perubahan-perubahan masing-masing masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarawan dan teoritis sosial sebenarnya dapat menghilangkan berbagai bentuk pengkotak-kotakan. Sosiologiwan dan sejarawan satu sama lain dapat melihat kelemahan dalam dirinya masing-masing dengan meminjam kacamata lawan.[101]

Ada beberapa arti penting pendekatan sosiologi bagi kajian sejarah diantaranya:

a. Pengungkapan unsur-unsur sosial dalam suatu deskripsi dapat dijalankan secara lebih canggih dengan bantuan konseptual dari sosiologis, misalnya tentang struktur sosial, sistem politik, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kelakuan, dan sebagainya.
b. Kerangka teoritis dari sosiologi akan meningkatkan kejelian terhadap pelbagai permasalahan, sehingga lebih banyak tema dapat dijadikan fokus pengkajian sejarah.
c. Perspektif sosial (sosiologis) meningkatkan kemampuan untuk mengekstrapolasikan berjenis-jenis aspek sosial masyarakat atau gejala sejarah yang dikaji, seperti adanya pelbagai golongan sosial, jenis-jenis kepemimpinan, macam-macam ikatan sosial, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, sejarawan yang menguraikan struktur-struktur sosial dari masa tertentu, misalnya, semestinya banyak memakai konsep-

[101] Peter Burke, *History and Social Theory,* Cambridge: Polity Press, 1992, hlm. 2-3.

konsep sosiologi, seperti stratifikasi sosial, kelas sosial, elite, struktur kekuasaan, dan lain sebagainya.

Pendekatan sosiologis berguna dalam memberikan tafsiran baru yang lebih jelas mengenai fakta-fakta yang teleh diketahui umum, atau dalam memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa sejarah yang diabaikan atau tidak tampak. Dalam beberapa hal, perangkat konseptual baru dikembangkan oleh para sosiolog dalam mempelajari masyarakat Indonesia. Konsep "kemiskinan bersama" yang diuraikan oleh Geertz dan "kebudayaan mestizo" yang diciptakan oleh Wertheim, merupakan contoh dari hal tersebut. Yang sangat penting adalah usaha Geertz untuk mengembangkan konsep "involusi" dari Goldenweiser sebagai alat yang berguna untuk memperoleh pemahaman tentang proses meningkatnya kekakuan masyarakat Jawa. Demikian pula, usaha Geertz untuk menggunakan "pendekatan fungsional yang lebih dinamis" untuk mempelajari masyarakat Jawa daripada yang biasa dilakukan oleh kalangan antropolog sosial, untuk membuat analisis proses-proses perubahan sosial yang lebih baik.[102]

2. Metode Antropologi dalam Penulisan Sejarah

Menurut Koentjaraningrat, bahwa semua metode yang digunakan dalam historiografi suatu bangsa berusaha "mengisi" sebanyak ungkin latar belakang setiap peristiwa yang muncul dalam sumber sejarah. Dalam usaha "mengisi" ini, menurutnya sejumlah metode antropologi terutama yang berasal dari kategori pendekatan generalisasi, mempunyai banyak manfaat. Tujuan pendekatan generalisasi (yang juga disebut pendekatan sinkronik) di dalam ilmu etnologi adalah mencari pengertian tentang prinsip-prinsip dasar kebudayaan manusia dalam kerangka kebudayaan-kebudayaan yang hidup dewasa ini.[103] Adapun beberapa metode tersebut adalah:

[102] W.F. Wertheim, "Pendekatan Sosiologis dalam Historiografi Indonesia, dalam Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 312-313.

[103] Koentjaraningrat, "Penggunaan Metode-Metode Antropologi dalam Historiografi Indonesia", dalam Soedjatmoko dkk. *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, terj. Mien Djubhar, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 265.

a. Prinsip Integrasi dan Prinsip Fungsi

Prinsip integrasi dan prinsip fungsi ini adalah terkait dengan kontak kebudayaan. Dari sekian banyak masalah kontak kebudayaan, ada beberapa yang berkaitan dengan proses adaptasi serta asimilasi unsur kebudayaan asing. Di dalamnya termasuk masalah mengapa unsur-unsur kebudayaan asing dengan mudah diasimilasikan ke dalam kebudayaan lokal, sedang yang lain hanya bisa diasimilasikan dengan kesulitan besar; dan tentang masalah mengapa beberapa unsur budaya asli diganti dengan susah payah dan beberapa lainnya bisa digantikan dengan mudah oleh unsur-unsur asing. E.C. Parsons, misalnya, mengajukan teori bahwa "sejumlah unsur kebudayaan asing bisa diterima dalam keseluruhannya hanya apabila itu bisa disesuaikan dengan bentuk perilaku lama dan cocok dengan sikap-sikap emosional yang ada pada saat itu.

b. Metode Fungsional dalam Studi Masyarakat

Menurut konsep ini, ketika mendeskripsikan suatu kebudayaan, peneliti cenderung untuk kian membatasi diri pada sekelompok manusia yang tinggal di suatu daerah yang dipandang sebagai entitas yang lengkap dan sistematis, dan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin data dari daerah yang bersangkutan. Adapun, masyarakat sebagai suatu entitas yang sistematis, dapat dipandang dari berbagai segi. *Pertama,* komunitas dapat dipandang sebagai suatu sistem ekologi, dengan memandang aktivitas manusia di dalam komunitas itu pada saat mereka membentuk kehidupan dari kekuatan-kekuatan alam yang membentuk lingkungan masyarakat.

Kedua, sebagai suatu sistem hubungan antar-pribadi dalam masyarakat, komunitas dapat dipandang sebagai sistem sosial. *Ketiga,* sebagai suatu sistem cara pandang yang digunakan oleh anggota komunitas untuk menginterpretasikan lingkungan dan dunianya, komunitas dapat dipandang sebagai sistem pandangan hidup. *Keempat,* sebagai suatu sistem perasaan dan sikap mental manusia ketika dihadapkan pada lingkungannya, komunitas dapat dipandang sebagai suatu sistem penyesuaian kepribadian.

c. Metode Fungsional dalam Analisis Tentang Mitologi

Sebuah metode yang sering digunakan oleh para antropolog di dalam menganalisis mitologi didasarkan pada anggapan bahwa cerita gaib berisi ide, pemikiran, pandangan hidup, dan sebagainya, yang menjadi sumber motivasi dari kegiatan fisik dan spiritual masyarakat yang bersangkutan. Itulah sebabnya prinsip-prinsip yang mendasari cerita gaib menjadi kunci dalam memahami prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sebagian besar masyarakat dan kebudayaan yang memiliki mitos.

d. Metode Silsilah

Metode ini adalah suatu metode wawancara. Tujuan awal dari metode ini adalah melakukan pengumpulan terminologi kekerabatan dalam bahasa tertentu guna menganalisis sistem kekerabatan para pemakai bahasa itu. Wawancara semacam ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang banyak unsur, gejala dan peristiwa lain yang terjadi di sekeliling individu yang diwawancarai. Di samping itu, metode silsilah ini dapat juga menghasilkan keterangan tentang peristiwa yang terjadi dua, tiga, dan kadang-kadang empat generasi sebelumnya.

3. Pendekatan Politik dalam Penulisan Sejarah

Sering dikatakan bahwa "politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau." Memang bahwa sejarah adalah identik dengan politik sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usaha memperoleh "apa, kapan, dan bagaimana." Kini pengaruh ilmu polik dan pengaruh ilmu sosial sungguh besar dalam penulisan sejarah politik yang lebih tepat disebut dengan sejarah politik gaya baru.

Yang pokok adalah, bahwa ilmu politik dan ilmu sejarah saling membutuhkan dan melengkapi. Politik tentu saja membuat sejarah, dan hampir semua sejarah adalah peristiwa politik. Penyelidikan sejarah selalu dimaksudkan sebagai studi untuk mengenal diri sendiri, untuk menemukan kepribadian sendiri atau untuk mengambil pelajaran dari zaman lampau, agar dapat menarik pelajaran-pelajaran tertentu dari pengalaman sendiri. Ilmu politik memperkaya materinya dengan

peristiwa-peristiwa sejarah. Sejarah merupakan gudang persediaan data bagi ilmu politik.[104]

Sebaliknya, ketika sejarah membutuhkan narasi yang terkait dengan peristiwa politik, maka konsep-konsep dan teori ilmu politik sangat penting artinya sebagai alat analisis sejarah. Jadi, terkait dengan kajian sejarah maka konsep-konsep atau teori yang dimiliki ilmu politik dapat digunakan sebagai alat analisis, misalnya *political culture*, organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, *bargaining*, birokrasi, kharisma, *patron-clien*, kepemimpinan, konflik, dan korupsi.

Konsep konflik, misalnya, dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam proses politik. Suatu hal yang lumrah terjadi, bahwa dalam proses politik berbagai kelompok dan individu dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah sehingga menjadi bagian dari keputusan politik. Sementara itu, aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda dan bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Aspirasi dan kepentingan pegawai negeri, misalnya, dalam banyak hal berbeda (bahkan bertentangan) dengan aspirasi dan kepentingan pedagang. Yang pertama menghendaki harga barang yang rendah dengan mutu barang yang baik, sedangkan yang kedua justru menghendaki harga yang relatif tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian pula antara majikan dan buruh, antara masyarakat pers (yang menghendaki kebebasan menyebarluaskan informasi kepada khalayak) dan aparat keamanan (yang menaruh perhatian besar pada pengaruh informasi untuk stabilitas politik dan keamanan) terdapat perbedaan kepentingan dalam banyak hal. Oleh karena itu, konflik merupakan gejala yang serba-hadir dalam setiap masyarakat. Karena konflik merupakan gejala serba-hadir maka ia tidak mungkin dihilangkan, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya.[105]

4. Pendekatan Psikologi dalam Penulisan Sejarah

Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental, yakni berupa tingkah laku dan proses

[104] F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1995, hlm. 86.

[105] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hlm. 18

atau kegiatannya. Dalam cerita sejarah aktor senantiasa mendapat sorotan yang kuat, baik sebagai individu maupun sebagi partisipan dalam kelompok. Aktor dalam kelompok menunjukkan kelakuan kolektif, suatu gejala yang menjadi objek khusus studi psikologi sosial. Dalam berbagai peristiwa sejarah kelakuan kolektif sangat mencolok, antara lain sewaktu huru hara, masa mengamuk, gerakan sosial, atau gerakan protes (gerakan revolusioner), yang kesemuanya menuntut penjelasan motivasi, sikap, dan tindakan kolektif. Peranan, sikap, dan tindakan radikal membuat situasi masak untuk meledak. Yang diperlukan sebagai "sebab peledakan" itulah peristiwa yang provokatif. Dalam hal ini, tentu saja konsep atau teori motivasi dan agitasi haruslah dimiliki.

Konsep psikologi sosial, misalnya, dapat digunakan sebagai alat analisis untuk melihat perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Interaksi sosial manusia di masyarakat baik itu antar individu, individu dan kelompok ataupun antar kelompok memiliki respon kejiwaan. Reaksi kejiwaan seperti sikap, emosional, perhatian, kemauan. Kemudian juga motivasi, harga diri dan lain sebagainya tercakup dalam psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses pekembangan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal yang meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial. Sementara itu, konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu sosial dapat mencakup emosi terhadap objek sosial, minat, perhatian, kemauan, motivasi, penghayatan, kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, kesadaran, harga diri, sikap mental, dan kepribadian.[106]

D. RUANG LINGKUP KAJIAN SEJARAH LOKAL

Subdisiplin sejarah lokal dapat meliputi sejarah sosial, sejarah pedesaan, sejarah kota, sejarah ekonomi. Keempatnya sangat erat dengan kajian sejarah lokal, karena tema-tema banyak yang dapat disangkutkan peran khusus daerah-daerah.

[106] "Psikologi Sosial: Pengertian, Teori, Ruang Lingkup dan Konsepnya," https://dosenpsikologi.com/psikologi-sosial, diakses 5 Juli 2019.

1. Sejarah Sosial

Dalam pengerjaannya dan dalam sasaran pokok sejarah lokal, yang dengan jelas memberi pembatasan geografis dari ruang lingkupnya, sering sekali berkaitan dengan sejarah sosial. Bahkan, dalam beberapa aspek terpenting dapat dianggap sebagai peletak dasar dari sejarah sosial. Sasaran pokok yang ideal dari sejarah sosial adalah "struktur dan proses dari tindakan dan interaksi manusia sebagaimana terjadi dalam konteks sosial-kultural di masa lampau yang tercatat." Jika memakai pendekatan sejarah sosial, maka suatu sejarah lokal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan baik ikatan struktural, yaitu jaringan peranan-peranan sosial yang saling bergantung terhadap aktor sejarah. Dalam usahanya untuk mengerti dinamika sosial tertentu, seorang ahli sejarah lokal akan mencoba melihat apakah kaitan dari peristiwa atau gejala yang ditelitinya itu dengan struktur sosial kebudayaan dan ekonomi. Dengan demikian, ketika peneliti sedang memperhatikan suatu atau serangkaian peristiwa maka ia tak akan puas untuk menerangkannya hanya dari sudut hubungan kausal, sebab-akibat, dengan peristiwa-peristiwa lain. Ia akan menerangkan pula dari sudut kerangka sosia-kultural, di mana peristiwa itu terjadi. Ia akan menjadikan kerangka sosial-kultural itu sebagai wadah dari peristiwa.[107]

Dalam perkembangannya, sejarah sosial mendapat konotasi, yaitu sebagai sejarah perjuangan kelas pada umumnya, pertentangan kelas antara golongan yang dieksploitasi dengan golongan yang mengeksploitasi. Berdekatan dengan arti tersebut ialah sejarah sosial sebagai sejarah gerakan sosial, antara lain mencakup gerakan serikat buruh, gerakan kaum sosialis, gerakan kaum nasionalis, gerakan emansipasi wanita, gerakan anti perbudakan, dan sebagainya.[108]

Hingga tahun 1960-an, istilah sejarah sosial lebih banyak dipahami dalam empat hal, yaitu (1) sejarah terkait dengan problem-problem sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, kejiwaan, dan penyakit. Dalam hal ini, sejarawan antara lain memberi perhatian terhadap problem-problem tersebut terutama menyangkut lembaga-lembaga sosial yang memberi perhatian terhadap masalah sosial, (2) sejarah tentang kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan juga di masyarakat,

[107] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal*, hlm. 20-21.
[108] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial*…, hlm. 50.

(3) sejarah masyarakat biasa (kelas bawah), kaum buruh, dan pekerja yang secara umum tidak pernah diperhatikan dalam sejarah gerakan-gerakan politik, dan (4) sejarah kaum pekerja atau buruh yang biasanya menyangkut kondisi ekonomi dan sosial, tradisi kemandiriannya, dan juga perjuangannya dalam upaya peningkatan kondisi dan derajat para pekerja atau kaum buruh.[109]

Namun demikian, sejarah sosial terus berkembang. Sejak tahun 1980-an, cabang sejarah sosial berkembang pesat dan tidak lagi dipandang sebelah mata, bahkan mendapat perhatian lebih ketimbang cebang-cabang sejarah yang lain. Bidang garapan sejarah sosial pun berkembang. Sejak saat itu, sejarah sosial mengupas terutama hal-hal menyangkut struktur sosial, mobilitas sosial, mobilitas individu dan kelompok baik mobilitas ke atas, ke bawah, maupun mobiltas ke samping dan juga hubungan-hubungan sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, sejarah sosial mulai kemudian membidangi bidang garap yang amat luas dan kompleks. Dalam konteks demikian, sejarah sosial mulai menempatkan dirinya seperti "sejarah tentang masyarakat" (*hirtory of society*) dalam pengertian yang amat luas.[110]

Bidang garapan sejarah sosial yang demikian luas mengandung implikasi dalam penelitian sejarah. Oleh karena itu, muncul kemudian satu pemahaman tentang tidak diperlukannya tema yang spesifik. Tugas utama para sejarawan adalah untuk menangkap secara dalam kehidupan manusia secara totalitas dalam segala aspeknya, dan itulah kemudian yang disebut dengan sejarah yang bersifat totalitas. Pada proses awal, *total history* diimplementasikan, misalnya, dalam kajian satu wilayah (negara) tertentu. Dalam praktiknya, penelitian ini mencakup semua aspek yang terkait, seperti aspek fisik dan non-fisik dari wilayah tertentu, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial, struktur politik, dan seterusnya. Namun dalam perkembangannya disadari bahwa penelitian yang mencakup semua aspek tersebut amat sulit dalam implementasinya. Keadaan ini mendorong lahirnya apa yang disebut dengan *local history* (sejarah lokal), yakni penelitian yang mencoba membatasi wilayah atau daerah

[109] Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2011, hlm. 39.

[110] *Ibid.*, hlm. 40.

garapannya. Dalam konteks ini kemudian dipahami hubungan logis antara *total history* dengan *local history*, dalam arti *local history* adalah upaya membatasi wilayah atau daerah garapan penelitian, tetapi pada waktu yang sama, semua yang ada dan keterkaitan antara semua yang ada pada wilayah yang terbatas tersebut harus dikaji secara mendalam dan secara totalitas.[111]

2. Sejarah Pedesaan

Sejarah pedesaan merupakan kajian yang terdekat dengan sejarah sosial dan sejarah lokal. Dikatakan bahwa antara sejarah sosial, sejarah lokal, dan sejarah pedesaan tentu saja saling berbauran dalam pengertian, suatu penelitian, dan permasalahannya. Sejarah pedesaan adalah sejarah yang secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Jadi untuk membedakan sejarah pedesaan yang menggarap masyarakat petani dengan sosial, sejarah pedesaan harus selalu dapat mengembalikan permasalahan sejarah kepada desa dan pedesaan, atau kepada ekonomi agraria.

Demikian pula ekonomi agraris tentu saja menjadi bagian dari sejarah pedesaan. Perubahan-perubahan yang terjadi di desa dan di dalam masysrakat petani biasanya menyangkut perubahan ekonomi *subsistence* ke ekonomi *exchange*. Sebuah perkebunan *rural industrial estate,* atau ranah yang berada di desa dan mempunyai pengaruh dalam kehidupan ekonomi desa, dapat dimasukkan ke dalam sejarah pedesaan. Sepanjang *exchange economy* itu mempengaruhi desa dan petani, sejarah pedesaan dapat pula menjadikannya sebagi bidang garapan, tentu saja dengan penekanan kepada lingkungan desa dan petani.

Kajian sejarah pedesan bisa mengungkapkan sebuah dinamika kemajuan masyarakat pedesaan, sebagaimana dilakukan Masyhuri.[112] Misalnya, dia menceritakan bagaimana kondisi Desa Pejaten yang berada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali yang awalnya sebagai desa terbelakang menjadi desa yang maju dalam berbagai hal. Sampai tahun 1969-an, Desa Pejaten ini masih merupakan desa yang miskin dan sangat terbelakang. Tingkat kesehatan penduduk sangat rendah,

[111] *Ibid.*, hlm. 41.

[112] Lihat Masyhuri, "Ðinamika Masyarakat Pedesaan: Pejaten Tahun 1950-1988," *SEJARAH 2,* Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jakarta 1992.

dan sering terjadi wabah penyakit. Sekitar 80% jaringan jalan desa tidak berfungsi. Pendidikan yang diselenggarakan ala kadarnya. Anak didik duduk di lantai beralaskan daun. Kemiskinan merupakan gambaran umum kehidupan desa.

Akan tetapi tahun 1970-an sampai 80-an Desa Pejaten menampakkan wajah yang berbeda. Desa ini berhasil membangun dirinya. Kehidupan sosial-ekonomi warga desa berkembang. Toleransi dan gotong-royong dapat dihidupkan dan ditingkatkan. Perekonomian masyarakat berkembang dengan pesat, dan demikian pula tingkat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Desa Pejaten menjadi desa baru, menjadi desa swasembada, dan lebih dari itu Desa Pejaten terpilih menjadi desa percontohan dan pusat pertumbuhan. Yang perlu ditegaskan, bahwa keberhasilan itu semua tidak terlepas dari keberhasilan dalam merumuskan kembali kebersamaan hidup yang sudah mentradisi di kalangan mereka. Desa Pejaten berhasil mengomunikasikan nilai-nilai kebersamaan tradisional "banjar" ke dalam sistem sosial desa.

3. Sejarah Kota

Dalam kajian mengenai kota, batas administratif adalah yang sering dijadikan dasar strategi penelitian, terutama jika menyangkut masalah kependudukan. Untuk penelitian sejarah, batas wilayah kota tentu saja mengikuti perkembangan kota itu sendiri, tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan administratif. Sering terjadi pemukiman-pemukiman penduduk yang secara sosiologis bisa disebut urban, tetapi terletak jauh dari kota induk sehingga menjadi kota satelit. Mereka yang tinggal di kota-kota satelit itu kebanyakan secara ekonomis, sosial dan kultural termasuk dalam lingkungan kota induknya, tetapi secara administratif masuk daerah lain.

Sejarah kota adalah bersifat lokal, karena kota merupakan institusi yang kecil yang berada di bawah institusi negara dan provinsi. Oleh karena itu, pembabakan sejarah kota tentu saja berbeda dengan pembabakan sejarah nasional. Perubahan-perubahan dalam konteks negara ada yang berdampak terhadap kota dan ada pula yang tidak, sehingga pembabakan sejarah kota harus mandiri, tidak perlu tergantung pada pembabakan sejarah nasional. Misalnya, pembabakan kota dapat dikaitkan dengan era kota tradisional atau sering disebut kota prakolonial, era kolonial

(kota-kota yang terletak di negara yang pernah dijajah atau di bawah kolonialisme), dan era kota pascakolonal.[113]

Kota tradisional yang berada di Inondesia adalah perkembangan kota ketika di bawah kekuasaan penguasa lokal, seperti raja dan bupati sebelum kedatangan bangsa penjajah di kawasan tersebut. Kota tradisional ini secara fisik memiliki ciri yang khas yang berpusast di seputar pendopo tempat penguasa tradisional tersebut tinggal. Sementara itu, ciri sebagai kota tradisional tidak serta merta menghilang manakala kolonialisme datang menggantikan era tradisional tersebut. Selanjutnya, kota kolonial ditandai ketika kota-kota yang ada itu di bawah kendali pemerintah kolonial atau pemerintah jajahan. Untuk kasus di Indonesia, kota kolonial muncul pertama kali ketika penjajah Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di negeri ini. Belanda mendarat pertama kali di Indonesia di Jayakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia. Setelah kota kolonial adalah disebut kota era pascakolonial. Dalam konteks periodisasi kota-kota pascakolonial di Indonesia adalah kota-kota setelah ditinggalkan oleh penjajah, Belanda dan Jepang. Pascakolonial dimaksud dalam pembabakan sejarah adalah kondisi bangsa Indonesia setelah lepas dari kolonialisme.[114]

Sementara itu, permasalahan yang menjadi bidang kajian sejarah kota sesungguhnya sangat luas, seluas sejarah sosial sendiri. Dari satu segi, sejarah kota dapat dimasukkan ke dalam sejarah lokal; dan dari segi lain dapat dimasukkan ke dalam sejarah lainnya, seperti sejarah ekonomi, politik, demografi, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada berbagai permasalahan yang dapat dijadikan sebagai garapan sejarah kota. Misalnya, *pertama,* perkembangan ekologi kota. Ekologi adalah interaksi antara manusia dan alam sekitarnya, dan perubahan ekologi terjadi bila salah satu dari komponen itu mengalami perubahan. Penggunaan tanah kota untuk berbagai keperluan telah mengubah keadaan alamiah lahan ke dalam bermacam sektor. Ada tanah yang disediakan untuk pemukiman penduduk, untuk perdagangan dan industri, untuk keperluan rekreasi, untuk perkantoran, dan sebagainya. Perubahan ekologi manusiawi terjadi sesuai dengan perkembangan penduduk, secara etnis, secara status, secara kelas, atau secara kultural, sehingga pola pemukiman mengalami pemisahan.

[113] Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota,* Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 7.
[114] *Ibid.,* hlm. 7-9.

Kedua, bidang garapan sejarah kota adalah transformasi sosial ekonomis. Industrialisasi dan urbanisasi bagian dari perubahan sosial. Sebagai lembaga masyarakat, dinamika sosial masyarakat kota berbeda dengan masyarakat pra industri. Ungkapan, *desa mawa cara, negara mawa tata,* dalam bahasa Jawa dapat diartikan bahwa masyarakat pra industri atau tradisional sebagai pusat kerajaan mempunyai aturan-aturan sendiri yang berbeda dengan masyarakat desa.

Ketiga, bidang garapan sejarah kota adalah sistem sosial. Kota sebagai sebuah sistem sosial menunjukkan kekayaan yang tak pernah habis sebagai bidang garapan. Kegiatan masyarakat kota, seperti kegiatan domestik, agama, rekreasi, ekonomis, politis, kultural, dan hubungan antar warga secara struktural antara lembaga-lembaga masyarakat, hubungan kategorikal antara kelompok-kelompok etnis, status dan kelas, dan bahkan hubungan personal antara sesama warga kota dapat dijadikan bahan kajian.

Keempat, bidang garapan sejarah kota ialah problem sosial. Perkembangan ekologi, termasuk di dalamnya masalah kepadatan penduduk, mobilitas horisontal, dan heterogenitas dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Di antara masalah itu adalah disparitas dan pemisahan pemukiman secara ekonomis dan sosial, ketimpangan demigrafis, dan masalah lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. *Kelima,* bidang garapan sejarah kota ialah mobilitas sosial. Dapat disaksikan bahwa adanya kemajuan dari golongan kelas menengah pribumi pada awal abad ke-20, seperti bangkitnya kelas ini secara kuantitatif.

Menuru Abdurrachman,[115] kajian sejarah kota dapat melalui pendekatan tiga pranata sosial, yaitu pranata pendidikan, pranata pergerakan nasional, dan pranata pers di tingkat lokal. Dengan mempelajari perkembangan ketiga pranata dalam masyarakat kota diharapkan adanya bahan perbandingan dan pendekatan ilmiah untuk mempelajari jalur-jalur pertumbuhan kota dari segi-segi masyarakat budaya. Berdasarkan pendekatan *textual* (penelitian dokumen arsip) dengan memperhatikan hasil-hasil pendekatan *contextual* (penelitian tentang perilaku perorangan dan kelompok penduduk) dalam masyarakat

[115] Abdurrachman Surjomihardjo, "Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Pranata Sosial," dalam T. Ibrahim Alfian (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hlm. 259-260.

yang sedang mengalami perubahan, maka rekonstruksi sejarah melalui dan dalam konteks tiga jalur perkembangan pranata sosial itu dapat memberikan keterangan tentang latar belakang dan dinamika pertumbuhan historis sebuah kota kolonial.

Memang kota dalam situasi kolonial menarik bagi bidang kajian, karena di dalam awal pertumbuhan kota itu merupakan kota yang semula berada dalam penguasaan bumiputra, tetapi dalam perkembangan selanjutnya diawasi oleh pemerintah kolonial, sehingga dua kekuatan kepentingan bertumbuk di kota itu, yaitu kekuatan tradisional dan kekuatan kolonial. Akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 erat kaitannya dengan proses "Pasifikasi Hindia Belanda" yang menandakan semakin mendalamnya pengaruh politik dan ekonomi kolonial ke daerah pedalaman di Jawa, yang menimbulkan perubahan dan pembaharuan. Kontrak-kontrak politik dengan pemerintah Kolonial dalam sejarah Indonesia yang dikenal dengan *Korte Verklaring* dan *Lange Verklaring* pada akhirnya menentukan kedudukan pemerintah swapraja di seluruh Indonesia.[116]

4. Sejarah Ekonomi

Kuntowijoyo[117] menegaskan bahwa sejarah ekonomi Indonesia memberi kemungkinan dan terbuka untuk studi sejarah mikro, sebagai tipe dari sejarah lokal, karena begitu banyaknya variasi kedaerahan. Variasi kedaerahan ini disebabkan perbedan-perbedaan ekologi, struktur sosial, pengaruh luar, dan budaya setempat. Di setiap daerah pun tidak selalu ada keseragaman tingkat perkembangan ekonomi, seperti banyaknya ekonomi *enclave* di beberapa tempat. Misalnya, di tengah-tengah pertanian tradisional dapat saja terdapat sebuah perkebunan besar atau *ranch*. Untuk beberapa daerah, barangkali tidak cukup menyebut ciri-ciri ekonomi dengan dualitas saja. Ekonomi Indonesia adalah plural, baik dalam tingkat perkembangan maupun kelembagaan, sehingga sukar untuk mengadakan generalisasi secra nasional dan makro.

Sejarah ekonomi sendiri mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Jadi sejarah ekonomi bukanlah interpretasi ekonomis

[116] *Ibid.,* hlm. 263-264.

[117] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 92.

terhadap sejarah, yang termasuk dalam sejarah pada umumnya. Sejarah ekonomi haruslah spesifik, sejarah dari satuan yang konkrit dan khusus. Sejarah ekonomi lokal sangatlah penting sebagai kajian, karena tiap-tiap daerah di Indonesia menempuh jalan sendiri-sendiri dalam dalam perkembangan ekonomi. Perbedaan regional itu disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, ada atau tidak adanya organisasi kenegaraan. Dalam hal ini perbedaan terjadi antara berbagai daerah yang disebabkan oleh corak kerajaan atau organisasi sosial setempat yang berbeda. Daerah kerajaan Kejawen tentu saja berbeda dengan daerah yang disebabkan oleh corak kerajaan-kerajaan atau organisasi sosial setempat yang berbeda.[118]

Termasuk yang harus diperhatikan dalam sejarah ekonomi adalah bahwa satuan waktu sangatlah penting. Dalam sejarah ekonomi, terutama yang mementingkan soal pertumbuhan ekonomi, masalah terhadap perkembangan selalu menjadi perhatian yang utama. Tidak saja dalam skala makro, tetapi dalam skala mikro dapat juga berbicara tentang sistem ekonomi atau cara produksi. Tahapan-tahapan yang berlaku secara nasional, tidak selalu berlaku untuk daerah-daerah. Generalisasi yang menyangkut seluru negara tidak akan mampu menerangkan perkecualian-perkecualian dan kekhususan regional. Hanya dengan pengamatan secara lokal pertumbuhan ekonomi dapat memperhitungkan akibat-akibat dari sebuah kebijakan ekonomi tingkat nasional.[119]

5. Sejarah Politik

Sejarah sudah semestinya mulai ditulis dengan tujuan untuk pencerahan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh kecil di daerah yang memiliki peranan dalam menentang kolonialisme melalui jalan non-politik juga perlu diabadikan melalui penulisan sejarah. Kisah-kisah seperti Nitisemito, seorang Raja Kretek dari Kota Kudus, Jawa Tengah, misalnya, juga perlu diangkat. Nitisemito merupakan pengusaha modern yang hidup pada awal abad ke-20, ketika ekonomi modern mulai dikenal oleh masyarakat pribumi. Industrialisasi awal pada masa itu mengguncang masyarakat dan kebudayaan. Nitisemito merupakan saudagar yang

[118] *Ibid.,* hlm. 94-97.
[119] *Ibid.,* hlm. 99.

ikut memberikan bantuan dana perjuangan untuk mengalahkan Belanda dalam percaturan politik. Nitisemito merupakan pengusaha terkemuka di tahun 1909 yang memiliki pabrik rokok "Tjap Bal Tiga" yang mempekerjakan ribuan buruh hingga mencapai angka 10.000 pekerja. Rokok kretek sebagai salah satu produk industri yang khas, baru berkembang pada 1930, yaitu di Kudus, Semarang, dan Surakarta yang pada zaman kolonial Belanda biasa disebut "*stootjes*," sedangkan perusahaan yang membuatnya disebut "*stootjes fabriek*."[120]

Jadi, sejarah nasional Indonesia sudah seharusnya meninggalkan tradisi penulisan sejarah yang didominasi oleh kisah *big man* dan mulai mengandalkan paradigma pencerahan dalam historiografi. Sejauh ini isi dari keseluruhan historiografi Indonesia masih belum adil dalam memberikan ruang bagi kiprah pahlawan lokal dalam sejarah. Ketika tema-tema tentang tokoh lokal ditulis, perhatian publik tidak begitu besar, sehingga tulisan itu hanya sekali berarti setelah itu ditinggalkan. Kisah-kisah heroisme dari *big man* memang lebih menyenangkan dibaca, karena dalam narasinya, kisah-kisah tersebut memberikan pengalaman yang tidak biasa dan kadang kala lebih menyerupai mitos daripada realitas. Misalnya tentang Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia itu selalu digambarkan sebagai ratu adil, titisan Dewa di muka bumi, mesias di abad modern dan banyak lagi. Semua anggapan itu musnah setelah di akhir hayat, Bung Karno tidak mampu mengendalikan keadaan, dan ia pun jatuh. Seketika pandangan masyarakat berubah, bahwa Soekarno juga merupakan manusia biasa.[121]

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi yang kecil, desa atau kota kecil pada umumnya, tidak menarik karena tidak mempunyai dampak luas. Jadi, tidak penting. Namun ada kalanya sejarah lokal sangat menarik oleh karena mengungkapkan soal-soal kemanusiaan secara khusus. Historiografi Pembebasan dapat menjadi alternatif dalam mengeksplorasi perihal masalah kemanusiaan yang terjadi di masa lalu dalam lingkup lokal. Perspektif ini juga dapat digunakan sebagai kritik atas kemapanan historiografi umum.[122]

---

[120] Ganda Febri Kurniawan, Warto, Leo Agung Sutimin , "Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi Dan Politik Ingatan," *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 41.

[121] *Ibid.,* hlm. 43.

[122] *Ibid.,* hlm.

Demikian pula, historiografi Indonesia belum tuntas membincangkan tema sejarah politik sehingga perlu mengkaji secara mendalam. Hal itu erat kaitannya dengan subtema "Otonomi dan Pemekaran Wilayah Administratif." Pada tingkat lokal, sejarah Indonesia belum banyak menyoroti tentang upaya dinamika pembentukan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga segmentasi pengalaman lokal tidak banyak dihadirkan dalam wacana sejarah nasional Indonesia.[123]

Di sisi lain, politik lokal pasca Orde Baru selalu menarik perhatian. Ini karena politik lokal pada masa itu memberikan dampak yang diametral. Keadaaan ini disebabkan oleh keadaan tarik menarik kepentingan pusat dan daerah, ditambah lagi dengan wujud otonomi daerah dan pemekaran daerah (*redistricting*). Perubahan haluan dari 'politik lama' yang tersentralisasi dan terkontrol kepada 'politik baru' yang terdesentralisasi dan egaliter membawa angin segar bagi politik lokal di Indonesia, setidaknya pada tahun-tahun pertama reformasi. Namun setelah melewati 'bulan madu' reformasi yang sebentar, beberapa sarjana segera menangkap pertumbuhan pesat para broker politik dan *local strongmen* di level lokal, yang mulai mengambil alih kekosongan maupun memperkuat akses kontrolnya terhadap politik lokal. Para broker dan *local strongmen* yang mengambil alih kekosongan pemain dalam arena politik lokal pada Orde Reformasi biasanya adalah 'broker lama' yang pada masa sebelumnya tidak mampu atau tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing dengan *local strongmen* pendukung rezim Orde Baru. Sedangkan, broker dan *local strongmen* yang berhasil menancapkan kukunya lebih dalam lagi pada era reformasi adalah para pemain atau broker lama yang pada masa sebelumnya telah menjadi proksi Orde Baru. Tetapi karena kemampuannya untuk melakukan reorganisasi kekuatan, yaitu selama masa transisi menuju demokrasi, mereka berhasil memanipulasi *state of minds* publik sehingga menempatkan orang kuat lokal menjadi semakin berkuasa dan berpengaruh dibanding masa sebelumnya.[124]

---

[123] Haliadi dan Leo Agustino, "Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah," *CosmoGov, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2, Oktober 2015, hlm. 355.

[124] Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Politik lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik," *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010, hlm. 20.

6. Sejarah Orang Kebanyakan

Asumsi awal yang dibangun dalam sejarah orang kebanyakan adalah bahwa sejarah bukan hanya milik para elite, penguasa, atau kelompok dominan yang memiliki sejarah, melainkan sejarah juga milik kelompok yang dikuasai atau kelompok *subaltern* yang tersingkir dan tidak berdaya.[125] Dengan bangunan asumsi ini, menurut Bambang, konstruksi ataupun pemaknaan terhadap masa lalu akan membawa para sejarawan pada aspek perasaan, pengetahuan, perilaku, atau kesadaran populer dari kehidupan sehari-hari dan orang kebanyakan dengan mengatasi atau keluar dari pembahasan yang berlebihan tentang tema-tema besar dan peran individu atau kelompok dominan.[126]

Hubungan jenis sejarah orang kebanyakan dengan sejarah lokal adalah, misalanya, mengkaji tentang kelompok masyarakat miskin perkotaan yang selama ini memang belum mendapat perhatian. Dalam konteks ini, penulisan sejarah akan membahas tentang masa lalu para gelandangan, pemulung, pengemis, tukang cuci, pelacur, penarik becak, juru parkir, pedagang asongan, penjual bakso, penjual gorengan, calo, pengemudi angkutan umum, tukang ojeg, penjahat atau preman. Begitu juga pembahasan tentang aspek lain dari masa lalu kehidupan sehari-hari seperti kejahatan, korupsi, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, kebiasaan makan dan makanan, atau permainan akan mampu menghadirkan sejarah sosial yang lain.[127]

[125] Bambang Purwanto, "Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta: Memikirkan Kembali Sejarah Sosial Indonesia," dalam Henk Schulte Bordholt dkk. (ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 269.

[126] *Ibid.,* hlm. 272.

[127] *Ibid.*

BAB IV
REKONSTRUKSI SEJARAH LOKAL

A. TEMA SEJARAH LOKAL

Sebagai kajian sejarah yang merekonstruksi dan menjelaskan masa lalu melalui dinamika internal yang unik, sejarah lokal begitu kaya dengan tema-tema yang dapat dibandingkan antara satu lokalitas dengan lokalitas lain melalui pedekata multidisipliner atau antara satu ikatan sosio-kultural dengan ikatan sosio-kultural yang lain. Dimensi ekonomi dari peristiwa yang terjadi di tingkat lokal adalah salah satu tema yang bisa dikaji, di samping dimensi sosial, politik, dan kebudayaan.[128] Jadi, tema penelitian sejarah lokal tidak hanya satu aspek kehidupan saja, tetapi menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan para sejarawan pemula menghadapi kesulitan dalam penemuan topik penelitian adalah kurangnya pengalaman membaca buku-buku hasil penelitian sejarah termasuk hasil-hasil kajian skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam hal ini akan berlaku dalil bahwa tanpa input (membaca) yang cukup, maka output (gagasan dan ide) juga tidak akan dihasilkan dengan baik. Jadi peneliti yang rajin membaca kemungkinan besar akan lebih mudah untuk menemukan topik penelitian dari pada peneliti yang kurang membaca.[129]

---

[128] Bambang Purwanto, "Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia", dalam Sri Margana dan Widya Fitriyaningsing (ed.), "*Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*, Yogyakarta: Ombak, 2010, hlm. 495-496.

[129] Singgih Tri Sulistiyono, "Penulisan Sejarah Lokal di Era Otonomi Daerah: Metode, Masalah, dan Strategi," Makalah disampaikan pada "Seminar Nasional Peningkatan Kompetensi Penelitian untuk Pengajaran Sejarah di Era Sertifikasi dan Otonomi Daerah"

Namun demikian, tidak semua aktivitas membaca akan memunculkan ide-ide baru untuk dijadikan sebagai topik penelitian. Hanya membaca dengan sikap kritislah yang akan banyak memproduksi ide-ide segar untuk dapat diangkat sebagai topik penelitian. Salah satu cara untuk dapat membaca kritis adalah dengan mengembangkan sikap dekonstruktif terhadap setiap statemen dari literatur yang dibaca. Sikap dekonstruktif berkaitan erat dengan sikap untuk tidak begitu saja menerima setiap statemen, deskripsi, dan argumentasi dari bahan bacaan yang dibaca. Pertanyaan-pertanyaan skeptik selalu perlu diajukan, misalnya: benarkah Boedi Oetomo merupakan organisasi kebangsaan yang pertama di Indonesia? Benarkah prajurit Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda hanya menggunakan senjata tradisional? Benarkah Sudirman pernah membuat otokritik? dan sebagainya. Pendek kata pertanyaan-pertanyaan yang skeptik semacam itu akan melahirkan topik-topik segar untuk diteliti. Bahkan sikap dekonstruktif memosisikan sebuah karya sejarah hanya sebagai salah satu sumber sejarah belaka yang harus dikritik, diragukan kebenarannya atau kalau perlu dibongkar. Jadi ada semacam proses konstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi, dan seterusnya.

Mencari topik penelitian memang tidak hanya bisa didapat dari membaca literatur dan sumber sejarah tetapi dapat juga dilakukan dengan cara "membaca" berbagai realitas dan masalah kekinian dengan sikap yang kritis dan skeptis. Realitas ini antara lain dapat diamati secara langsung dan dapat dijumpai di berbagai media massa seperti koran, majalah, televisi, radio, situs internet, dan sebagainya. Berbagai persoalan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia antara lain: hutang negara yang menumpuk, impor berbagai jenis komoditas pangan (beras, gula, jagung, kedelai, dan sebagainya), kebangkrutan berbagai perusahaan negara, otonomi daerah, ancaman disintegrasi, dan sebagainya. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan antara mengapa permasalahan itu dapat terjadi? Bagaimana proses perkembangannya? dan sebagainya. Jika pertanyaan-pertanyaan semacam itu dialamatkan kepada persoalan-persoalan yang lebih mikro dan lebih menyangkut

yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah, Kudus, 20 Maret 2009.

hal-hal yang bersifat "*daily life*" dan/ atau menyangkut kehidupan masyarakat umum (*common people*), maka berbagai topik kajian sejarah akan muncul seperti persoalan banjir, perparkiran, kemacetan lalu-lintas, komunitas tukang becak, pelacur, sejarah keluarga, migrasi, dan sebagainya. Jika hal itu dilakukan niscaya para peneliti pemula tidak akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh topik penelitian sejarah. Bahkan kemungkinan mereka akan kebingungan untuk menyeleksi topik mana yang dipilih.

Kecenderungan terkini tentang pemilihan topik yang sedang dikembangkan oleh sejarawan-sejarawan muda adalah dengan mengambil objek-objek penelitian sejarah yang secara konvensional barangkali tidak dianggap memiliki sejarah, seperti sejarah sebuah gedung, jembatan, stasiun kereta api, sungai, kompleks pemukiman, jalan, alun-alun, pasar, simbol kota, dan sebagainya. Sudah barang tentu hal yang dianggap sepele tersebut masih banyak dijumpai sebagai fenomena sosial dan lingkungan keseharian yang aktual. Jadi dengan demikian orang tidak perlu mencari topik penelitian sejarah dengan '*point of departure*' dari masa lampau saja, tetapi juga dari pertanyaan yang bersifat kekinian. Justru dengan hal demikian itulah hasil penelitian sejarah akan selalu aktual, menjawab persoalan aktual, dan akan memberikan pencerahan (*enlightenment*) kepada masyarakat yang terbelenggu oleh ketidaktahuannya atau kesalahtahuannya tentang masa lampau sesuatu.

Dengan banyak membaca berarti akan memperoleh banyak input. Selanjutnya dengan memperoleh input yang banyak berarti akan memiliki kans untuk dapat mengeluarkan output lebih banyak. Artinya dengan banyak membaca berarti secara potensial akan memiliki kemampuan untuk memproduksi gagasan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Selain itu, dengan banyak membaca para peneliti pemula juga akan dapat dengan mudah menempatkan karya mereka dalam geneologi hasil-hasil penelitian sejarah. Topik-topik yang menjadi kajian dari peneliti yang rajin membaca juga akan mudah diposisikan dalam kerangka dialog intelektual dalam konteks perkembangan historiografi. Sebaliknya, topik-topik penelitian yang bukan dihasilkan oleh proses tersebut akan terlepas dari konteks dialogis dalam perkembangan penelitian sejarah. Seolah-olah topik penelitian sejarah semacam itu muncul begitu saja

dari sebuah kekosongan wacana intelektual dalam historiografi. Sudah barang tentu ketika telah muncul banyak ide mengenai topik yang akan digarap, persoalan lain segera menyusul yaitu topik mana yang akan dipilih.

Yang perlu ditegaskan pula, bahwa dalam pemilihan tema atau topik yang akan dikembangkan atau diteliti dalam sejarah lokal dapat mempertanyakan, misalnya, apakah suatu peristiwa yang terjadi pada lokal tertentu itu steril, tidak dipengaruhi ataupun mempengaruhi, peristiwa sejarah di tempat lain. Contonya, suatu peristiwa sejarah sosial di suatu masyarakat yang biasa mengadakan "selamatan" biasanya proses selamatan yang diadakan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya yang terjadi di lokasi tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di lokasi lain. Demikian pula pola kehidupan maupun bangunan rumah masyarakat pedesaan kontemporer. Ada beberapa rumah yang mencolok dengan gaya arsitektur kontemporer. Ternyata rumah tersebut dapat terbangun dengan adanya warga yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.[130]

Kondisi ini membuktikan bahwa sejarah yang terjadi dalam lokasi tertentu bukanlah sesuatu yang terisolasi dari peristiwa yang lebih luas. Peristiwa sejarah tidak ada yang terkucil dari peristiwa yang lebih luas, misalnya tanaman jagung, padi, ketela pohon, makanan yang tersedia, tanaman sengon yang kini banyak tumbuh di pedesaan hingga iklim, gaya dan keyakinan hidup bukanlah suatu peristiwa yang tidak terkait dengan dunia luar. Dengan demikian dimensi detail suatu deskripsi yang unik tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mengkaitkan aspek lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Hal ini perlu ditekankan agar deskripsi yang dikembangkan tidak kehilangan perspektif global atau makro, terutama di era globalisasi saat ini. Namun, harus disadari bahwa peristiwa yang diteliti tetap lebih menekankan pada upaya mendeskripsikan realitas di level lokal secara detail agar dapat menangkap dimensi "emik" dari pelaku sejarahnya. Dimensi luar ikut berpengaruh, tetapi bagaimana masyarakat lokal, pelaku sejarah di level lokal mempersepsikan suatu peristwa sejarah itu yang perlu menjadi fokus utama.[131]

[130] Hariyono, "Sejarah Lokal: Mengenal Yang Dekat, Memperluas Wawasan," *SEJARAH DAN BUDAYA*, Tahun Kesebelas, Nomor 2, Desember 2017, 162.

[131] *Ibid.,* 163.

Keterkaitan peristiwa di suatu lokal tertentu dengan di tempat lain kemudian juga diwarnai oleh pelbagai episode peristiwa sejarah yang mendahuluinya. Dampaknya tidak ada sejarah yang bersifat tunggal. Peristiwa sejarah cenderung bersifat "multisiplitas sejarah-sejarah." Misalnya, banyak peristiwa atau peninggalan sejarah di pelbagai belahan Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh unsur asing. Pada saat bersamaan jejak-jejak tersebut membuktikan bahwa di setiap lokal juga menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mampu memasak, mencernakan dan memproduksi ulang pengaruh asing tersebut. Sejarah sebagai suatu proses maupun sebagai kebudayaan materiil tersebut kemudian tetap dirasakan sebagai perkembangan dari sejarah asli masyarakat yang bersangkutan.[132]

B. SUMBER SEJARAH LOKAL

Dari segi penerapan metode sejarah tidak ada perbedaan yang mencolok antara penelitian sejarah nasional dengan sejarah lokal. Perbedaan yang utama terletak pada cakupan spasial dari kedua kajian tersebut. Sudah barang tentu kajian sejarah lokal yang memiliki cakupan yang terbatas memerlukan teknik-teknik tertentu untuk melakukan eksplorasi sumber sejarah. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa semakin sempit cakupan lokalitas penelitian sejarah, semakin sulit untuk mendapatkan sumber sejarah. Dengan demikian, berbagai jenis sumber sejarah harus mendapatkan perhatian yang menyeluruh dari peneliti sejarah lokal.[133]

Sebagian besar ahli akan mengetahui betapa pengetahuan yang sesungguhnya tentang perkembangan sejarah masyarakat Indonesia hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan yang cukup luas tentang cara hidup dan sejarah daerah dari semua suku Indonesia. Kerja filolog menghimpun data dalam menganalisis naskah yang berisi keterangan sejarah yang berkaitan dengan kelompok-kelompok etnik di daerah setempat sangat bermanfaat dalam usaha mengumpulkan sejarah-sejarah lokal. Banyak juga data yang teleh dihimpun oleh filolog asing, seperti para pegawai pemerintah kolonial dan anggota misi Kristen, yang bermukim dalam jangka waktu yang lama di berbaagai daerah. Sangat

[132] *Ibid.*

[133] Singgih Tri Sulistiyono, "Penulisan Sejarah Lokal …

mungkin bahwa data etnografis yang diperoleh dari berbagai kelompok etnik di Indonesia dapat merupakan sumber keterangan yang sangat berharga mengenai sejarah daerah.[134]

Selain itu, metode silsilah adalah teknik yang berguna terutama dalam usaha pengumpulan data sejarah lokal (daerah). Dalam konteks ini, seorang peneliti bersamaan dengan usaha menghimpun silsilah, kadang-kadang dapat memperoleh beberapa keterangan tentang peristiwa yang terjadi semasa kehidupan para anggota keluarga yang tertera dalam silsilah informannya. Sejarah sebuah masyarakat yang diungkapkan dengan cara ini tentu dapat disokong dengan berbagai data lainnya, seperti dokumen-dokumen tertulis dan keterangan yang terdapat di dalam cerita-cerita rakyat setempat, atau dengan membandingkan bahan-bahan yang diperoleh dari masyarakat-masyarakat yang saling bertentagan.[135]

Sumber sejarah sekunder ialah tulisan atau benda-benda yang tidak semasa, baik yang berasal dari pelaku sejarah itu sendiri maupun yang berasal dari orang lain. Nilai-nilai sumber-sumber sekunder pada pertamanya hanyalah sebagai pembanding dan untuk kelengkapan pandangan sejarawan mengenai peristiwa sejarah yang terjadi.[136] Secara tegas ada beberapa jenis sumber sejarah yang dapat digunakan untuk mengungkap peristiwa-peristiwa lokal:

1. Arti Penting Historiografi Tradisional

Di samping sebagai sumber sejarah yang diharapkan untuk memberikan berbagai kepastian tentang fakta-fakta sejarah, sebagai unsur-unsur peristiwa yang didapatkan melalui proses kritik sumber, historiografi tradisional dapat pula dipakai sebagai alat untuk memahami berbagai pola perilaku kesejarahan dari masyarakat penganutnya. Ketika sejarah kritis ingin ditulis, maka masalah pertama yang harus dihadapi ialah mencari "fakta" di belakang historiografi tradisional, yang

---

[134] Koentjaraningrat, "Penggunaan Metode-Metode Antropologi dalam Historiografi Indonesia,"dalam Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 281-282.

[135] *Ibid.*, hlm. 282.

[136] Abdurracman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi,* Jakarta: Yayasan Idayu, 1979, hlm. 124.

memantulkan "kewajaran sejarah," dan tradisi lisan, yang merupakan "*mirage of reality*."[137]

Semua sumber baik lokal maupun asing harus diperlakukan sama, yang penting adalah perlu diterapkannya kritik sejarah yang normal dan kritis terhadap sumber-sumber itu. Seluruh sejarah adalah sejarah intelektual, maka dapat dikatakan bahwa karya-karya sastra sezaman tidak hanya merupakan potret dari berbagai realitas sosial melainkan juga refleksi intelektual dari masyarakat ketika karya sastra itu ditulis. *Serat, suluk, babad*, atau *hikayat* sebagai karya-karya sastra adalah refleksi dari sebuah tradisi yang menyejarah, sebagai "pancaran dari kesadaran tentang segala hal yang wajar" di masa lalu. Karya-karya sastra tersebut dan dokumen dinasti lainnya dapat dipakai sebagai alat untuk memahami berbagai pola perilaku kesejarahan dari masyarakat penganutnya.[138]

Misalnya, historiografi tradisi merupakan ekspresi kultural dan sekaligus pantulan dari keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial yang menghasilkannya. Karya-karya di dalam historiografi tradisi tidak bisa dipisahkan begitu saja dari realitas masa lalu itu sendiri. Karya-karya satra tradisi Jawa itu tidak hanya sebagai ekspresi intelektual para pengekor setia atau loyalis melainkan juga merupakan "pemberontakan yang sopan" dari para pujaga, atau sebagai cara paling selamat yang ditempuh oleh para demagong.[139]

Ringkasan *Pararaton* dan *Hikayat Raja-raja Pasai* ternyata sebagiannya tidak masuk akal atau setidaknya kebenarannya diragukan. Namun demikian, ceritanya termasuk dalam penulisan sejarah karena dikeramatkan tradisi atau memuaskan orang lain dari segi kebudayaan. Tambo Minangkabau, ceritanya digunakan untuk menjelaskan perubahan masyarakat dan kebudayaan yang rumit, dan juga untuk mewariskan adat kepada generasi yang berikut. Dalam jenis penulisan sejarah demikian, keterangan-keterangan yang mengandung fakta boleh jadi teranyam bersama bahan-bahan yang bersifat dongengan.[140]

---

[137] Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris", dalam Sunaryo Purwo Sumitro (peny.), *Dari Samudra Pasai Ke Yogyakarta: Persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, Jakarta: MSI dan Sinergi Press, 2002, hlm. 146

[138] Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!,* Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 95-97.

[139] *Ibid.*, hlm. 100-101.

[140] William H. Frederick dan Soeri Soeroto (peny.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi,* Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 87.

Dalam menyikapi sejarah Tradisional seperti babad, hikayat, tambo, silsilah, atau lainnya, bukanlah terletak pada *evident* atau peristiwa "fakta" yang diajukan dari sudut "sejarah sebagai mana ia terjadi" dan bukanlah tentang harus diterima atau tidaknya "fakta" tersebut sebagai gambaran yang "sah" dari kelampauan. Yang perlu dipersoalkan ialah sikap peneliti terhadapnya bagi keperluan penelitian. Corak tulisan ini tidaklah dapat dianggap sebagai karya yang selesai, jadi sebagai sumber sekunder. Ia adalah bahan, sumber primer, yang memerlukan penelaahan yang mendalam dan hati-hati.[141]

Historiografi tradisional atau disebut juga sastra bersejarah sering cenderung untuk mengaburkan dua macam realitas sejarah, yaitu realitas yang objektif terjadi dan realitas yang riil dalam diri. Terkabur di dalamnya antara fakta yang merupakan pengalaman yang aktual, dengan fakta yang berupa penghayatan kultural kolektif. Di samping keharusan adanya pengerjaan kritik intern yang biasanya dikerjakan oleh para ahli filologi, dan ekstern, yang merupakan bagian-bagian terpenting dari penelitian sejarah (*heuristik*), maka sangat pula diperlukan kesadaran dan pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang kultural dari masyarakat yang menghasilkan sastra bersejarah atau historiografi tradisional itu. Bahkan dengan pengetahuan ini kemungkinan untuk membersihkan "fakta" yang disampaikan berdasarkan perbendingan sumber-sumber ekstern, seperti Tiongkok, Belanda, dan sebagainya atau sumber dari tradisi lain, lebih terbuka. Historiografi tradisional pada umumnya memperlihatkan apa yang disebut "*the myth of concern*" yang berfungsi bagi kemantapan nilai dan tata.[142]

Memang betul bahwa fakta yang ada dalam historiografi tradisional tidak selamanya dapat digunakan sebagai fakta sejarah. Dan, apabila kita menggunakan fakta-fakta tersebut harus bersikap kritis, karena uraian atau cerita dari naskah lama, misalnya, banyak dibumbui oleh cerita yang bersifat mistis atau magis religius. Namun demikian, historiografi tradisional sebagai bagian dari perbendaharaan kultural, bukan saja merupakan gambaran dari suatu *weltanschauung* (pandangan dunia),

[141] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia,* Yogyakarta: UGM Press, 1996, hlm. 22.
[142] *Ibid.,* hlm. 23.

yang di dalamnya tempat diri dalam semesta ditentukan, tetapi juga sutu *myth of concern*.[143]

Di wilayah Nusantara, naskah-naskah kuna, sebagai bagian dari historiografi tradisional, sudah banyak yang berusia ratusan tahun. Naskah kuno merupakan sumber informasi kebudayaan daerah masa lampau yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat berarti. Di dalamnya mengandung ide-ide, gagasan, dan berbagai macam pengetahuan alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat yang bersangkutan, ajaran-ajaran moral, filsafat, keagamaan, dan unsur-unsur lain yang mengandung nilai-nilai luhur.[144]

Isi naskah-naskah kuno tersebut tidak semuanya merupakan cerita sejarah akan tetapi bermanfaat pula untuk dijadikan bahan dalam menulis sejarah. Beberapa materi yang menjadi isi kandungan naskah-naskah tersebut misalnya juga tentang ajaran agama, hukum, adat istiadat, filsafat, politik, sastra, astronomi, ajaran moral, mantra, doa, obat-obatan, mistik, bahasa, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan. Hal-hal yang bisa kita kaji dalam naskah-naskah tersebut misalnya tentang sistem kemasyarakatan, nilai-nilai budaya, pelaksanaan ajaran agama, dan lain-lain. Untuk melacak hal tersebut, maka bisa menggunakan naskah-naskah yang berisi tentang ajaran agama, hukum, adat-istiadat, politik, ajaran moral, dan lain-lain.[145]

2. Arti Penting Sumber Lisan Untuk Sejarah Lokal

Salah satu akibat dari pemikiran-pemikiran yang memisahkan secara tegas historiografi tradisional dengan historiografi modern di dalam tradisi historiografi Indonesiasentris adalah rendahnya pengakuan terhadap sejarah lisan dan segala sesuatu yang tidak tertulis yang ada pada masa lalu. Sebagian besar sejarawan Indonesia cenderung menghubungkan konsep kesejarahan dengan segala hal yang bersifat tertulis. Oleh sebab itu, batasan antara sejarah dan bukan sejarah adalah tulisan, dan dalam konteks sumber sejarah maka sumber tertulis dihargai

[143] Taufik Abdullah, "Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis," dalam T. Ibrahim Alfian dkk (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 237.

[144] Agus Mulyana dan Darmiasti, *Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis,* Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 32.

[145] *Ibid.*

lebih tinggi dari sumber lisan. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak persoalan pada saat ini, ketika masih banyak dijumpai komunitas-komunitas atau masyarakat yang tidak memiliki tradisi sejarah tertulis, seperti di Irian Jaya, Kalimantan, Nusa Tenggara, Nias, dan di pulau-pulau lainnya.[146] Jadi adanya anggapan bahwa sumber tertulis lebih tinggi dan atama disbanding dengn sumber lisan tampaknya perlu diakhiri. Diskrimniasi terhadap sumber sejarah tidak harus terjadi, dan yang terpenting adalah bagaimana dapat memunculkan narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Demikian pula, tanpa mengesampingkan arti penting sumber tertulis, pada kenyataannya melalui kerja sejarah lisan, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya, seperti hubungan personal di dalam rumah tangga atau kehidupan keluarga dan persepsi subjektif seseorang atau kelompok terhadap sebuah pengalaman historis. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa lalu. Sementara itu, pewawancara mampu memberdayakan setiap individu atau kelompok melalui proses mengingat dan menginterpretasi kembali masa lalu, dengan menekankan pada nilai sebuah proses sama banyaknya dengan prosuk sejarah.[147] Sejarah lisan merupakan alat yang sangat berguna untuk menemukan, mengeksplorasi, dan mengevaluasi ciri-ciri dari proses ingatan sejarah, sehingga dapat diketahui bagaimana manusia mengartikan masa lalunya, menghubungkan pengalaman individu dengan konteks sosialnya, masa lalu menjadi bagian dari masa kini, dan orang menggunakannya untuk menginterpretasi hidup mereka serta dunia sekelilingnya.[148]

Sejarah lisan mempunyai banyak kegunaan. Sejarah lisan sebagai metode dapat digunakan secara tunggal dan dapat pula sebagai bahan dokumenter. Sebagai metode tunggal, sejarah lisan tidak kurang pentingnya jika dilakukan dengan cermat. Banyak sekali permasalahan sejarah bahkan dalam zaman modern yang tidak tertangkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-

146 Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan …, hlm. 147.
147 *Ibid.,* hlm. 152.
148 *Ibid.*, hlm. 153.

kejadian penting menurut kepentingan pembuat dokumen dan zamannya, tetapi tidak melestarikan kejadian-kejadian individual dan yang unik yang dialami oleh seseorang atau segolongan. Apalagi minat dan perhatian sejarawan akan berbeda dengan minat dan perhatian pembuat dokumen, sehingga sejarawan masih harus mencari sendiri cara untuk mendapatkan keterangan, dengan teknik wawancara yang benar keabsahan keterangan-keterangan lisan pun dapat dipertanggungjawabkan.[149]

Yang pokok adalah, ketika terdapat keterbatasan sumber sejarah dalam bentuk dokumen, sesungguhnya sejarawan dapat mencari dan menemukan sumber sejarah lisan. Memang selama ini sumber lisan dianggap menyesatkan, akan tetapi pandangan miring ini di masa mendatang akan segera berubah manakala menghadapi masyarakat tanpa dokumen tercetak karena orang lebih suka menyimpan dokumen dalam bentuk digital. Sumber sejarah lisan akan mengalami kejayaan sebagai penulisan alternatif sejarah manusia modern.[150]

Sejarah lisan sudah lama dipergunakan, juga di Indonesia. Hampir semua penulis sejarah mempergunakan dengan kadar yang berbeda. Dalam penulisan biografi, metode ini sudah sangat banyak dipakai. Sejarawan akademis yang mempunyai kesempatan terhadap bahan-bahan dokumenter dan sumber lisan dapat diharapkan akan menulis biografi dengan corak lain karena perspektif kesejarahan akan sanggup menampilkan pelaku-pelaku sejarah di tengah-tengah masyarakat dan zamannya.[151]

Selain sebagai metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan subtansi penulisan sejarah. *Pertama,* dengan sifatnya yang kontemporer, sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. *Kedua*, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen. Dengan kata lain, dapat mengubah cerita sejarah yang elitis kepada cerita sejarah yang egalitarian. *Ketiga,* sejarah lisan memungkinkan perluasan

149 Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Tiara wacana: 1994, hlm. 22.
150 Sugeng Priyadi, *Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2015, hlm. 95.
151 Kuntowijoyo, *Metodologi …,* hlm. 23.

permasalahan sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis.[152]

Misalnya, ketika Anton E. Lucas menulis tentang sejarah lokal Peristiwa Tiga Daerah, dia banyak bersandar pada sumber lisan karena memang sumber tertulisnya sangat langka. Dia mengakui bahwa koleksi koran daerah maupun tulisan tokoh-tokoh sejarah lokal adalah jarang ditemukan, sehingga sulit mencari sumber sejarah lokal bagi penulisan sejarah Indonesia. Di Arsip Nasional belum tentu ada, sedangkan di arsip pemerintah daerah tidak selalu lengkap. Namun demikian, perlakuan terhadap sumber lisan semestinya juga sebagaimana sumber tertulis, yaitu harus diuji kebenaran dan kecocokannya dengan sumber lain. Dalam menilai keterangan seseorang harus diteliti latar belakang sosial, pendidikan, politik, dan langsung atau tidaknya terlibat dalam kejadian yang diteliti. Demikian pula, seorang peneliti harus cepat bisa menilai kualitas ingatan seorang informan, apakah masih baik atau tidak, dan apakah cenderung menonjolkan diri.[153]

Anton E. Lucas mengakui bahwa kajian sejarah Peristiwa Tiga Daerah, sumber sejarah lisan membentu sekali mengkaji lebih mendalam segi kebudayaan sebuah revolusi. Misalnya, apa makna "merdeka" bagi rakyat pada waktu itu? Dari bahasa simbol di dalam sandiwara-sandiwara revolusioner pada tahun 1945, dapat dilihat bagaimana penghayatan makna revolusi sosial dari persepsi para pelakunya sendiri, yang pada waktu itu sering disebut "pemuda."[154]

3. Tradisi Lisan

Tradisi lisan (*oral tradition*) sebagai *oral testimony transmitted verbally, from one generation to the next one or more*. Dalam tradisi lisan tidak termasuk kesaksian mata yang merupakan data lisan, dan juga tidak termasuk *rerasan* masyarakat yang meskipun lisan tetapi tidak ditularkan dari satu generasi ke genarasi yang lain. Tradisi lisan dengan demikian terbatas di dalam kebudayaan lisan dari masyarakat yang belum mengenal tulisan. Sama seperti dokumen dalam masyarakat yang sudah

[152] *Ibid.*, hlm. 25.

[153] Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi,* Jakarta: Grafiti Pers, 1989, hlm. 5.

[154] *Ibid.,* hlm. 3.

mengenal tulisan, tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam masa lampau. Namun, kesejarahan tradisi lisan barulah sebagian dari isi tradisi lisan itu. Selain itu, tradisi lisan mengandung kejadian nilai-nilai moral, keagamaan, adat-istiadat, cerita-cerita khayali, peribahasa, nyanyian, dan mantra. Tradisi lisan dengan demikian menjadi sumber penulisan bagi antropolog dan sejarawan.[155]

Trdisi lisan terutama penting dalam masyarakat yang belum atau sedikit sekali mengenal kebudayaan tulisan. Hal ini terutama untuk mengisi kekosongan data dari sumber-sumber lain, dan tak kurang pentingnya, untuk mengetahui sikap dan pengertian yang diberikan masyarakat bawahan terhadap peristiwa tertentu. Tradisi lisan adalah bayangan dari realitas, maka kemungkinan munculnya "realitas baru" dalam diri masyarakat yang mengklaimnya sebagai akibat suatu peristiwa menjadi terang. Sebagai suatu "gambaran realitas," tradisi bukanlah identik dengan realitas atau peristiwa itu sendiri, tetapi ia memperlihatkan bagainama peristiwa itu dimengerti oleh masyarakat. Yang dimengerti inilah yang "realitas baru," dan sebagai "realitas baru," ia memberi patokan dalam melihat peristiwa atau situasi yang kemudian.[156]

Para sarjana etnologi dan antropologi yang mempunyai perhatian terhadap sejarah telah membuktikan bagaimana tradisi-tradisi lisan dapat dibandingkan, dicek, dan digunakan untuk tujuan-tujuan sejarah. Tradisi lisan mencerminkan kesatuan-kesatuan sosial dalam masyarakat; desa-desa dan kesatuan-kesatuan garis keturunan memiliki cerita-cerita mengenai masa lampau yang secara khusus berfungsi unuk menghubungkan golongan yang satu dan lainnya, dan yang mengoreksi berbagai versi lokal dan mendukung hubungan-hubungan tersebut. [157]

Dalam menginterpretasikan tradisi lisan, pertama-tama yang harus ditekankan adalah konteks budaya tempat tradisi tersebut ditemukan. Tradisi lisan adalah sebagai kesaksian masa lampau yang dengan sengaja diwariskan dari "mulut ke mulut." Seperti juga dalam hal dokumen tertulis, si peneliti dalam tradisi lisan harus selalu bertanya apa fungsi yang dilakukan oleh tradisi dalam masyarakat kontemporer. Hubungan

[155] Kuntowijoyo, *Metodologi …,* hlm. 21.

[156] Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal …*, hlm. 25..

[157] Bernard S. Cohn, "Sejarah Etnis," dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomiharjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan* Perspektif, Yogyakarta: Ombak, 2016, hlm. 256.

antara tradisi lisan dan struktur politik kontemporer tidak saja berguna untuk menilai masa lampau seperti tercantum dalam tradisi lisan, akan tetapi juga keadaan politik yang sebenarnya pada waktu tradisi lisan tersebut tercatat.

Berbeda dengan sejarah lisan, tradisi lisan merupakan ingatan kolektif atau individu anggota masyarakat tentang masa lalu yang diwariskan melalui lisan secara turun temurun. Produk tradisi lisan berupa pesan lisan yang didasarkan pada pesan-pesan sebelumnya dari generasi tua. Prosesnya menyangkut transmisi pesan itu dari mulut ke mulut melintasi waktu hingga pesan itu tidak jelas. Dengan demikian, pesan lisan tidak bisa diperlakukan sama dengan pesan tertulis yang memiliki bentuk asli dan salinan. Tradisi lisan merupakan kenangan yang luas dan unik dari komunitas sejarah, sedangkan sejarah lisan sebagai metode cenderung pada kesaksian para saksi mata sehingga menjadi kenangan hidup atau kenangan langsung. Sama seperti sumber tertulis, tradisi lisan tetap memiliki bias subjektivitas untuk dijadikan sumber sejarah. Untuk itu diperlukan analisis secara teliti untuk mengkritik dan membandingkan serta menyimpulkan. Harus dipisahkan antara konstruksi logis dan unsur kosmologis/pralogis. Namun, pengakuan tradisi lisan sebagai sejarah turut mewujutkan motif egalitarian sejarah lisan yaitu meruntuhkan anggapan banal Orientalis terhadap masyarakat praaksara yang dianggap *people without history*.[158]

Penulisan sejarah lokal periode pasca kemerdekaan relatif diuntungkan oleh tersedianya sumber yang beragam. Hal ini berbeda dengan penulisan sejarah lokal pra-kolonial yang lebih banyak mengandalkan tradisi lisan dalam bentuk folklore dan naskah-naskah lama, atau masa kolonial yang mengandalkan arsip Belanda. Penulisan sejarah lokal sesudah kemerdekaan dapat memanfaatkan berbagai jenis dokumen/arsip, koran, majalah, memoar, dan pelaku sejarah (sejarah lisan) yang masih hidup. Namun, sejarah lisan seringkali menjadi masalah dalam menuliskan sejarah lokal baik menyangkut daya ingat para informan dan kesediannya memberi informasi secara jujur dan terbuka. Apa yang diingat dan disampaikan para pelaku sejarah tidak

[158] Warto, "Tantangan Penulisan Sejarah Lokal," SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesebelas, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 155.

selalu sama dengan apa yang dikehendaki dalam penulisan sejarah yang telah mengalami glorifikasi ataupun mitologisasi.[159]

4. Sumber- Sumber Terkait Untuk Sejarah Lokal

a. Bahan Dokumen

Sejarah lokal didukung dengan sumber-sumber seperti dokumen pertanahan, dokumen istana, dokumen organisasi rumah sakit dan persaudaraan, dokumen naskah sensus, sejarah dan silsilah lokal yang dipublikasi, peta atlas, dan kamus ilmu bumi. Manuskrip sensus, misalnya, mungkin tidak hanya menolong sejarawan untuk dapat merekonstruksi kehidupan beberapa keluarga masa lalu, akan tetapi dapat juga merekonstruksi suatu kota kecil, bagian daerah pedalaman, suatu kompleks, dan distrik kota. Dari manuskrip sensus, sejarawan mungkin dapat mempelajari bagaimana kondisi orang-orang yang tinggal dalam komunitas, anak-anak yang berada di rumah tempat mereka tinggal, pekerjaan mereka, dan tempat dari mana mereka datang. Dengan data sensus ini, sejarawan dapat mengkalkulasi rata-rata pertumbuhan dan penurunan penduduk dan juga perubahan ras, etnis, atau komposisi ekonomi. Bahkan, untuk beberapa periode data sensus terbuka untuk alasan-alasan rahasia, sejarawan mungkin dapat mengunakan laporan sensus secara keseluruhan untuk tujuan ini.[160]

Demikian pula informasi-informasi (*directories*) lokal memuat suatu kekayaan informasi terkait dengan berbagai ciri-ciri dan keistimewaan kehidupan komunitas. Informasi-informasi itu mencakup iklan yang menawarkan gaya-gaya lokal, citarasa dan kebiasan, praktik medis, ketersediaan barang-barang, pelayanan dan transportasi, jenis pekerjaan orang, dan jenis-jenis bisnis yang berada pada komunitas. Informasi-informasi itu juga bisa menunjuk pada gambar-gambar, foto-foto dan sketsa-sketsa pabrik, toko, gudang-gudang, peristiwa-peristiwa lokal, mesin-mesin, pakaian-pakaian, dan produk-produk pemakai lainnya. Disamping memuat nama-nama, alamat-alamat, dan pekerjaan-pekerjaan

[159] *Ibid.,* hlm. 156.

[160] Alan J. Lichtman dan V. Frenc, *Historian and The Living Past*, Arlington Height: Harlan Davidson,1978, hlm. 175.

warga secara individu, informasi-informasi itu juga memuat peta, alamat bangunan-bangunan umum, tempat-tempat bisnis, tempat-tempat ibadah, dan organisasi-organisasi persaudaraan. Informasi-informasi itu sering menyediakan tentang gambaran pemerintahan lokal, fungsi-fungsi yang dimainkan oleh berbagai kantor, dan prosedur untuk mendapatkan lisensi dan hak-hak lainnya.[161]

b. Surat Kabar

Surat kabar lokal bahkan lebih banyak menyediakan citra rasa kehidupan komunitas lokal. Surat kabar lokal diterbitkan untuk kabupaten, kota kecil, kota kota besar, dan lingkungan sekitar. Surat kabar ini ada yang terbit harian, mingguan, atau bulanan, dan tersedia bagi seluruh komunitas atau melayani audien khusus seperti anggota partai politik, organisasi persaudaraan, atau anggota kebangsaan. Sebagaimana *direktory*, surat kabar lokal ini memuat iklan-iklan dan berbagai jenis gambar yang mewakili. Dari berita-berita dan cerita-cerita utama, sejarawan dapat belajar tentang apa yang menentukan kedudukan sosial dalam komunitas, bagaimana orang-orang dilatih dan dididik, apa yang mereka kerjakan untuk rekreasi, dan bagaimana mereka memilih kepemimpinan politik. Sejarawan juga dapat mengumpulkan informasi tentang tempat tinggal individu, dari laporan-laporan *real estate* seperti fluktuasi harga tanah dan bangunan, dari berita-berita umum seperti jenis-jenis orang yang masuk komunitas, dan dari editorial dan para penulis seperti sumber-sumber yang kontroversial. Sejarawan yang membuka suratkabar mungkin juga mendapatkan berita yang menarik seperti resep makanan, gambar-gambar lucu, kotbah atau wejangan, pembicaraan politik, catatan-catatan kebangkrutan, dan saran bagi para pemuda.[162]

c. Otobiografi

Keterkaitan sumber otobiografi dengan sejarah lokal adalah, bahwa sumber ini dapat digunakan untuk mengungkap tokoh-tokoh lokal. Dalam biografi terekam tentang gambaran perkembangan pribadi seseorang yang mencerminkan situasi sosialnya. Otobiografi

[161] *Ibid.*, hlm. 176.
[162] *Ibid.*, hlm. 156.

Sutadiningrat (bupati Serang), misalnya, mengungkapkan tentang pengalamanya sebagai bupati di Pandeglang yang bersangkutan dengan kedinasan, yaitu uraian tentang perjalanan inspeksi ke daerahnya dengan mencakup pembicaraan tentang keadan pertanian, peternakan, dan ketataprajan pada umumnya. Demikian pula, otobiografi Achmad Djajadiningrat dapat digunakan sebagai informasi potret kondisi lokal Banten. Digambarkan, bahwa pada masa kanak-kanak beliau hidup di tengah-tengah masyarakat tradisional dan ide-ide kolot di kalangan rakyat Banten.[163]

d. *Memoirs*

Pada umumnya *memoirs* ini tidak menyinggung soal pribadi melainkan merupakan uraian soal-soal umum. Kebanyakan dari *memoirs* yang dikarang oleh orang-orang Indonesia adalah kisah perjalanan. Di dalamnya terdapat uraian serta lukisan tentang keadaan negeri, kota, dan daerah. Perhatian pengarang sering dipusatkan pada segi fisik, seperti gedung-gedung, jalan-jalan dan alam sekitarnya. Suatu kisah perjalanan yang ditulis pada awal abad ke-16, oleh seorang Portugis, Tome Pires, di dalam Suma Orienta, dengan cukup jelas memberikan gambaran struktur sosial dari masyarakat kerajaan dan kota pantai, seperti Malaka dan kota-kota di pantai utara Jawa Timur, terutama Tuban.[164]

e. Cerita Roman

Banyak di antara kreasi literer tidak hanya merupakan produksi yang proyektif atau ekspresi dari pengarang, tetapi juga memuat memuat komponen-komponen rekonstrukstif dari lingkungan sosialnya. Produksi literer adalah hasil dari fantasi, imajinasi, serta karya ekspresi dan stilitis dari pengarang, tetapi dalam menulis karyanya secara tidak sengaja mengungkapkan data yang menyangkut keadaan sosial dari periode waktu cerita itu terjadi. Tokoh-tokoh dalam cerita itu tidak dapat bergerak dalam waktu vakum, perlu ditempatkan dalam kerangka dari struktur sosialnya, seperti keluarga, desa, sistem kekerabatan, pemerintah

[163] Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2014, hlm. 133-134

[164] *Ibid.,* hlm. 138-139.

lokal, dan sebaginya. Dengan mengecualikan "science fiction" atau roman utopis, pada umumnya keadaan sosial dalam cerita roman digambarkan secara lebih realitis, artinya lebih mendekati kenyataan sosial dan tidak dilukiskan semata-mata menurut fantasia atau imajinasi yang bebas.[165]

Dalam roman *Max Havelaar* oleh Multatuli, misalnya, bagaimana perilaku pejabat penguasa lokal digambarkan. Digambarkan, bahwa bupati dengan sewenang-wenang dan untuk kepentingannya sendiri mengerahkan orang-orang jauh di atas jumlah "pancen" atau "kemit" yang boleh dikerahkannya. Bupati Lebak juga telah menyalahgunakan kekuasannya dengan mempergunakan secara melanggar hukum tenaga kerja rakyatnya, dan dicurigai telah melakukan pemerasan dengan meminta penghasilan *in natura*, tanpa pembayaran atau dengan pembayaran yang tidak cukup, pembayaran yang ditentukan semena-mena.[166]

C. KRITIK SUMBER: DARI REALITA KE FAKTA DAN DARI FAKTA KE DATA

Fakta yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah adalah benar apabila sumber-sumber itu sendiri benar. Benar artinya dapat dipercaya, tidak palsu, atau sahih, yaitu tidak ada cacatnya, sehat, tidak kurang suatu apa. Sumber-sumber sahih tidak memberikan keterangan-keterangan dan berita-berita yang palsu atau tidak benar; berita-berita yang sengaja dibuat untuk menipu orang. Misalnya, di Arsip Nasional terdapat surat-surat, laporan-laporan, dan keterangan-keterangan yang dibuat oleh pegawai-pegawai VOC pada abad XVII dan sebagainya. Selanjutnya, untuk mengetahui sahih tidaknya sumber-sumber tersebut, diperiksalah: (a) jenis kertas dan tinta yang digunakan untuk menulis huruf; (b) bentuk huruf; (c) bahasa, kata-kata, dan susunan kalimat; dan (d) isi. Jadi, apabila tanggal surat tersebut 1 Januari 1678, maka kertas dan tintanya harus berasal dari tahun itu. Demikian pula, bentuk huruf dan bahasanya harus serupa dengan bentuk huruf dan bahasa surat-surat lain yang berasal dari zaman itu juga.[167]

---

165 *Ibid.,* hlm. 147.

166 Multatuli, *Max Havelaar,* terj. H.B. Yasin, Jakarta: Djembtan, 2005, hlm. 308-309.

167 R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia,* Yogyakarta: LkiS, 2005, hlm. 22.

Realita atau kenyataan dapat didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dianggap ada." Kata 'dianggap' di sini menduduki posisi penting, sebab kata tersebut mencerminkan relativitas. Artinya, apa yang "ada" bagi seseorang belum tentu "ada" yang lain, karena masing-masing meimiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal. "Ada" di sini tidak harus bersifat empiris, atau dapat diketahui lewat pancaindra, sebab banyak hal-hal yang kita anggap ada tanpa kita pernah mengalaminya secara empiris. "Ada" di sini juga bisa berarti ada di dunia, di jagad raya ini, baik secara empiris maupun dalam pikiran kita.[168]

Betul bahwa kenyatan tidak harus bersifat empiris, tetapi dalam penelitian sejarah, kenyataan adalah jejak-jejak sejarah atau sumber sejarah itu sendiri yang memang bersifat empiris. Jadi, sebagaimana diungkapkan bahwa sebagai ilmu, sejarah termasuk ilmu empiris (berdasar pada pengalaman).[169] Jadi, pengetahuan sejarah dibangun berdasarkan pada pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Misalnya, pengalaman itu direkam dalam dokumen-dokumen atau memori-memori yang terdapat pada pelaku dan saksi sejarah (sumber lisan). Dokumen-dokumen dan memori-memori itulah yang diteliti oleh sejarawan untuk menentukan fakta. Fakta itulah yang diinterpretasi, dan dari interpretasi atas fakta, barulah muncul tulisan sejarah.

Fakta seringkali disamakan dengan kenyataan. Akan tetapi, keduanya harus dibedakan. Fakta di sini didefinisikan sebagai pernyataan tentang realita, tentang kenyataan. Seseorang yang menceritakan suatu kejadian pada dasarnya adalah orang yang sedang mengemukakan fakta-fakta, mengemukakan pernyataan-pernyataan tentang suatu kenyataan. Oleh karena itu, suatu fakta selalu bersifat "subjektif," dalam arti bahwa fakta tersebut selalu dihasilkan lewat sudut pandang orang tertentu. Suatu kenyataan yang sama dapat saja dikemukakan dengan cara-cara yang berbeda. Ini terlihat jelas dalam berbagai macam berita mengenai suatu kejadian yang dimuat oleh berbagai surat kabar yang berbeda. Walaupun peristiwa sama, namun berita mengenai peristiwa ini tidak akan pernah sama. Di lain pihak suatu fakta juga dapat dikatakan sebegai

[168] Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Paradigma, Epistimologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pemetaan," *Makalah*, Disampaikan dalam Pelatihan "Metodologi Penelitian," diselenggarakan oleh CRCS-UGM di Yogyakarta, 12 Februari – 19 Maret 2007, hlm. 16.

[169] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 46.

"objektif" karena selalu didasarkan pada kenyataan. Pernyataan yang tidak didasarkan pada suatu kenyataan tidak dapat dikatakan sebagai fakta. Dia lebih tepat disebut sebagai 'karangan' atau hasil dari sebuah khayalan, hasil imajinasi.[170]

Dalam sejarah, fakta merujuk pada benda dan perbuatan yang telah terjadi. Aktivitas manusia, tanggal, tahun, tempat, dan ukuran dari suatu objek adalah fakta. Kebenaran fakta sangat tergantung dari kebenaran bukti empiris sehingga semua orang akan sependapat. Fakta itu memberi gambaran tentang kejadian yang pernah ada, individu, dan kelompok masyarakat. Fakta itu tidak berdiri sendiri tetapi harus berhubungan dengan sesuatu yang bermakna. Sejarawan tidak hanya puas dengan fakta, tetapi fakta itu saling berhubungan maknawi. Oleh karena itu, fakta-fakta harus ditempatkan dalam hubungannya dengan konsep dan generalisasi.[171]

Apabila sumber sejarah merupakan pengabadian sebagian kecil dari keseluruhan kejadian dan peristiwa yang betul-betul pernah terjadi, maka fakta-fakta adalah intisari dari sumber-sumber sejarah; fakta-fakta itu disimpulkan dari sumber-sumber sejarah. Namun, fakta-fakta adalah rangka belaka yang harus diberi daging dan jiwa agar menjadi sejarah.[172] Fakta adalah pernyataan tentang kejadian. Sejarah dalam dalam arti objektif memang tidak lagi diulang atau dialami kembali, akan tetapi bekas-bekasnya sebagai memori dapat diungkapkan atau diaktualisasikan. Bentuk pengungkapan kembali itulah yang disebut dengan fakta atau pernyataan tentang kejadian. Dengan demikian, fakta sebenarnya merupakan produk dari proses mental peneliti sejarah (sejarawan) atau memorisasi. Oleh karena itu, dapat dikaitkan bahwa fakta adalah bersifat subjektif, yaitu memuat unsur subjek.[173]

Bagi sejarawan bahan utama yang digunakan untuk menyusun suatu cerita atau analisis sejarah adalah fakta. Sementara itu, fakta itu pada hakikatnya adalah suatu konstruk yang dibuat oleh sejarawan, sehingga sebenarnya telah mengandung faktor subektif, yaitu unsur-

[170] *Ibid.,* hlm. 17.

[171] Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 14.

[172] R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu …*, hlm. 25-27.

[173] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 17.

unsur subjek, yaitu penulis itu sendiri. Dengan demikian, sukar dipertanggungjawaabkan bahwa fakta adalah fakta yang mencerminkan apa yang sesungguhnya telah terjadi.[174]

Fakta ini dapat menjadi data, tetapi tidak semua fakta adalah data. Data dapat dikatakan sebagai fakta yang relevan, yang berkaitan secara logis dengan (a) masalah yang ingin dijawab atau masalah penelitian, dan dengan (b) kerangka teori atau paradigma yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi, data adalah fakta yang telah dipilih, diseleksi, berdasarkan relevansinya. Misalnya, sebuah buku atau suratkabar memuat banyak sekali fakta. Ada fakta tentang pemilu, tentang pengeboman, tentang demo mahasiswa, tentang hasil lomba, tentang pernyataan kemerdekaan, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak semua fakta tersebut akan menjadi data kita apabila kita melakukan penelitian.[175]

Fakta-fakta adalah intisari dari sumber-sumber sejarah; fakta-fakta itu disimpulkan dari sumber sejarah. Selanjutnya, dapat dipersoalkan: apakah jumlah fakta-fakta yang dapat disimpulkan itu sudah merupakan sejarah? Jawabannya adalah, bahwa fakta-fakta itu belumlah merupakan sejarah dalam arti yang sebenarnya, sebab fakta-fakta itu sebenarnya hanya merupakan bahan mentah yang harus dimasak terlebih dahulu. Jadi, fakta-fakta adalah rangka belaka yang harus diberi daging dan jiwa agar menjadi sejarah. [176]

Penting ditegaskan, bahwa walaupun fakta-faktanya sama, tetapi besar kemungkinan sejarawan satu dengan lainnya berbeda dalam menguraikan. Dalam konteks ini, sebagaimana orang membuat bermacam-macam gedung dengan bahan yang sama: batu, semen, besi, kayu, cat, dan sebagainya. Perbedaan bentuk bangunan disebabkan oleh cita-cita orang yang membuat gedung itu, disebabkan oleh pandangan hidup yang tidak sama. Dalam menguraikan cerita sejarah, fakta-fakta dihubungkan dengan sebab akibat yang tidak selalu jelas. Ketidakjelasan itu dikarenakan suatu kejadian selalu disebabkan oleh jalinan beberapa sebab.[177]

---

[174] *Ibid.,* hlm. 88.

[175] Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Paradigma, Epistimologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pemetaan," *Makalah*, Disampaikan dalam Pelatihan "Metodologi Penelitian," diselenggarakan oleh CRCS-UGM di Yogyakarta, 12 Februari – 19 Maret 2007, hlm. 17.

[176] R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia,* Yogyakarta: LkiS, 2005, hlm. 25.

[177] *Ibid.*, hlm. 28-29.

Jelas, bahwa sejarah serba-objek (objektif) tidaklah dapat ditangkap sama sekali kecuali melalui sumber-sumber sejarah. Akan tetapi, sumber-sumber itu hanya menghasilkan fakta-fakta yang tidak dapat menjamin pengertian tentang sejarah. Sejarah serba-fakta adalah hasil dari penyelidikan sumber-sumber sejarah. Selanjutnya, sejarah serba-fakta itulah yang harus diubah menjadi sejarah serba-subjek (subjektif), yaitu sejarah yang ada artinya. Jadi, wujud dari sejarah serba subjek adalah cerita, yaitu cerita yang menghubungkan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terdapatlah suatu keseluruhan atau kesatuan. Sementara itu, kesatuan fakta-fakta itu dihimpun menurut pendapat penyusun.[178]

D. INTERPRETASI

Sejarah bukan hanya kumpulan fakta-fakta, tetapi lebih daripada itu adalah cerita yang berdasarkan pada fakta-fakta yang telah tersusun sebagai kesatuan seperti direncanakan. Jadi, proses penulisan sejarah sebagai suatu penyusunan sintesis mirip dengan pembangunan suatu bangunan. Perencanan bangunan tertuang dalam desain atau *blueprint* yang memuat *lay out* bangunan yang akan dibangun. Sementara itu, Sartono mengungkapkan, bahwa penyusunan fakta-fakta secara sintesis akan dipermudah oleh alat-alat analisis seperti konsep-konsep dan teori-teori. Sisi lain, dalam merangkaikan fakta-fakta sebagai suatu cerita sejarah sudah barang tentu diperlukan kemampuan berpikir logis dan memiliki imajinasi.[179]

Penulisan sejarah lebih mendekati lukisan dan tercermin dalam lukisan itu bagaimana cara pelukis melihat objek, teknik penggarapannya, pandangannya, dan gayanya. Demikian pula, dalam penulisan sejarah juga tercakup pandangannya, pendekatan, metode, dan gaya bahasa penulis atau pengarang. Namun berbeda dengan pelukis, penulis sejarah tidak terlalu bebas dalam mengekspresikan diri; dia terikat pada fakta-fakta dan bagaimana dapat menyuguhnya cerita sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis atau peneliti sejarah berperan mirip dengan saksi di pengadilan. Dia wajib mengungkapkan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga masyarakat umum (pembaca) mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.[180]

[178] *Ibid.,* hlm. 30.
[179] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu …*, hlm. 18-19.
[180] *Ibid.*

Bagi Kuntowijoyo, secara operasional interpretasi atau penafsiran dibagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan fakta-fakta yang telah dipastikan menjadi fakta sejarah, sedangkan sintesis adalah menyatukan atau mengelompokkan data-data menjadi satu yang selanjutnya dilakukan penyimpulan. Sementara itu, pengelompokkan data hanya mungkin dilakukan ketika pemahaman konsep sudah dipunyai.[181] Dalam konteks ini, erat kaitannya dengan generalisasi sejarah, yaitu penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Generalisasi atau kesimpulan umum (spesifikasi) memang sangat perlu dalam sejarah, karena sejarah adalah ilmu.[182]

Dalam generalisasi sejarah menunjukkan betul bahwa keunikan peristiwa itu hanya sekali terjadi, namun apabila diperhatikan pola, tendensi, dan struktur, nyatalah bahwa memang ada kemiripan antara satu peristiwa dengan yang lain, termasuk pula soal jalannya sutu proses. Misalnya, dalam mengungkapkan suatu konflik ditemukan pelbagai fase gerakan sosial dengan pola yang sama, yaitu adanya mobilisasi, agitasi, akselerasi, polarisasi, dan akhirnya tercetus kekerasan. Demikian pula, jalannya suatu revolusi adalah mirip dengan revolusi lain dalam segi formanya, walaupun dalam segi substansinya setiap revolusi adalah unik.[183] Kuntowijoyo mencontohkan, misalnya, setelah ada data tentang pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, orang-orang mengungsi, penurunan pengibaran bendera, maka ditemukan fakta bahwa hal itu telah terjadi revolusi.[184]

E. HISTORIOGRAFI

Masalah pokok historiografi Indonesia adalah menemukan titik temu antara antara berbagai sejarah lokal dari bangsa Indonesia dengan sejarah kolonial, dan menentukan bagaimana cara mempersatukannya. Oleh karena itu, tugas studi sejarah di Indonesia di antaranya adalah merumuskan kemungkinan sintesis berdasarkan ketentuan-ketentuan teori dan filsafat sejarah, serta berdasarkan sebanyak-banyaknya fakta yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang bertumpuk namun belum

181 Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 78-79.
182 *Ibid.,* hlm. 115-116.
183 Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu …* hlm. 104.
184 Kuntowijoyo, *Pengantar …*, hlm. 79.

diselidiki itu, serta berdasarkan penilaian ulang terhadap data yang sudah ada.[185]

Sejarah di Indonesia ini menunjukkan bahwa sejarah Bangsa Indonesia dengan kekayaan yang beraneka ragam, baru dikenal secara sangat tidak lengkap. Berbeda halnya dengan sejarah kolonial yang sudah ditulis dan yang, biasanya namun tidak selalu, disajikan dengan kebanggaan mereka yang pernah menjajah. Kesimpulan yang dapat dikemukakan ialah bahwa tugas sejarawan di Indonesia adalah mengembangkan metode-metode penelitian yang sesuai dengan jenis sumber-sumber sejarah, serta menyempurnakan pengumpulan, perawatan dan mungkin penerbitan sumber-sumber itu. Pada waktu yang sama, sangat penting untuk menghimpun suatu kepustakaan yang selengkap-lengkapnya mengenai sejarah bangsa Indonesia.[186]

Rekonstruksi sejarah lokal mencakup aspek prosesual dan struktural. Aspek prosesual dalam sejarah berusaha mendeskripsikan kejadian/ deskriptif-naratif yakni menjawab pertanyaan bagaimanakah sesuatu itu terjadi. Urutan kejadian diuraikan secara lengkap dengan fakta-faktanya menyangkut apa, siapa, kapan, dan di mana dalam suatu kesatuan uraian yang menggambarkan perkembangan kejadian. Urutan kejadian secara kronologis, hubungan sebab-akibat, dan motivasi para pelaku merupakan suatu kompleksitas kejadian tersusun untuk menjawab pertanyaan "bagaimana". Setiap karya sejarah harus memuat unsur prosesual ini sebagai esensi uraian sejarah. Di samping itu, perlu juga diuangkap latar belakang kejadian, kondisi dan setting ekonomis, sosial, politik dan kultural yang kesemuanya menunjukkan keadaan "statis" karena bersifat struktural. Misalnya, struktur ekologis, stratifikasi sosial, struktur kekuasaan, orientasi normatif dan nilai-nilai. Kerangka struktural penting diungkapkan agar sejarawan dapat melakukan analisis secara kritis sehingga pertanyaan "mengapa" suatu peristiwa bisa terjadi seperti ini dapat dijawab (Sartono Kartodirdjo, 1992: 114-115). Namun harus diingat, sejarah struktural membawa implikasi metodologis yaitu pendekatan analitis dan multidimensional. Melalui pendekatan seperti ini, kompleksitas perubahan masyarakat dapat dianalisis, misalnya

[185] Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 8.

[186] *Ibid.,* hlm. 12.

perubahan tingkat makro pengaruhnya di tingkat mikro/lokal, atau sebaliknya kejadian mikro merupakan letupan di tingkat makro. Dengan demikian menjadi jelas bahwa penulisan sejarah lokal tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pada prosesual kejadian dan bersifat deskriptif-naratif, tetapi juga harus memperhitungkan aspek struktural suatu kejadian agar sejarah lokal dapat dianalisis secara multidimensional (deskripsi fanalitis).[187]

Lalu bagaimana rekonstruksi sejarah lokal harus dirumuskan. Penulisan sejarah lokal biasanya berangkat dari perspektif nasional atau perspektif para elit penguasa di pusat. Peristiwa lokal atau daerah hanya dianggap penting apabila mempunyai makna nasional atau sejalan dengan perspektif para elit penguasa. Maka seringkali peristiwa lokal hanya diperlakukan sebagai ilustrasi dari masalah di pusat. Bahkan, beberapa peristiwa lokal terpisah atau ditiadakan dari wacana sejarah nasional/pusat. Ada dua "perspektif" atau titik tolak dalam usaha rekonstruksi sejarah yaitu *national concern* dan *local perspective* (Abdullah, 2001: 104). Perspektif yang pertama berkaitan dengan "ide yang menyebar", sedangkan yang kedua berhubungan dengan dinamika lokal yang berhadapan dengan "ide" tersebut. Dinamika lokal bisa merupakan cerminan dari keharusan pusat, tetapi bisa juga bersifat otonom dan otentik, meskipun idenya terpengaruh dari luar. Lokal sama sekali bukan replika pusat tetapi mempunyai dinamikanya sendiri.[188]

F. BEBERAPA CONTOH KAJIAN SEJARAH LOKAL

1. Ibrahim Alfian, "Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912."[189]

   Untuk mengerti Aceh sebagai lokalitas yang unik maka harus memhami struktur dan pola tata kehidupan masyarakatnya. Pertama perlu diketahui bahwa bagi masyarakat Aceh agama dan politik telah dijadikan tak ubahnya sebagai dua sisi dari sekeping mata uang logam. Di Aceh ada dua jenis dasar yang dijadikan pegangan masyarakat secara umum, yaitu adat dan syariat Islam yang keduanya menempati kedudukan yang sama pentingnya. Adat dan syariat adalah sama dan kembar, sehingga tatkala terjadi mufakat

[187] Warto, "Tantangan Penulisan Sejarah Lokal…, hlm. 156.
[188] *Ibid*.
[189] Lihat Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912,* Yogyakarta: Ombak, 2016.

antara adat dengan hukum agama maka negeri itu senang dan tiada huru hara.

Dalam sistem sosial, masyarakat Aceh dipimpin oleh pemimpin adat dan pemimpin agama. Pemimpin adat terdiri dari sultan dan kerabat-kerbat yang membantunya, yakni para *uluebalang* atau raja-raja kecil serta kerabat-kerabat yang membentu mereka. Dalam golongan pemimpin adat ini dapat pula dimasukkan *geuchik-geuchik* atau *peutua-peutua* yang menjadi kepala kampung sebagai penghubung antara rakyat dengan raja-raja kecil atau para *uluebalang* itu. Sementara itu, pemimpin agama adalah para ulama, yaitu guru agama yang mendapatkan penghargaan atas keahlian yang berbeda-beda dan para pejabat agama yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan agama.

Karena masyarakat Aceh begitu kuatnya memegang syariat, maka tidak aneh apabila ideologi perang sabil digunakan untuk memobilisasi rakyat Aceh dalam menentang kedatangan dan penetrasi Belanda sebagai kaum kafir di Aceh. Jadi, tahun 1873 Belanda mendaratkan pasukannya di pantai ujung Barat Nusantara, dan sejak saat itulah tercetus perlawanan rakyat Aceh. Perang melawan Belanda itu bersifat defensif, yaitu jihad untuk mempertahankan diri. Islam sendiri membenarkan umatnya untuk berperang, apabila mereka diperangi. Ideologi perang sabil yang muncul sejak abad ke-17 dihidupkan kembali melalui *Hikayat-Hikayat Perang Sabil* pada pertengahan kedua abad ke-19, ketika negeri Aceh dilanda serangan kaum "kafir." Oleh karena itu, para pemimpin Aceh berusaha mendidik umat dengan berbagai cara agar memiliki motivasi yang padu dalam mengusir Belanda. Akhirnya, mereka menimba nilai dan norma kitab suci Al-Qur'an yang akan dapat menimbulkan kewajiban untuk berperang di jalan Allah.

Proses Perang Aceh dapat dilihat dalam tiga fase. Fase pertama, ketika agresi dilancarkan oleh Batavia, maka terjadilah perang dua Negara, yaitu Belanda dan Aceh yang dipimpin oleh Sultan atau yang mewakilinya. Setelah *dalam* (istana) diduduki dan sultan mangkat, sementara sultan yang baru dinobatkan masih di bawh umur, Perang Aceh menjadi perang-perang dari daerah-daerah di bawah pemimpin para *uluebalang* yang melawan gerak maju tentara Hindia Belanda.

Ketika faktor luar telah berhasil melumpuhkan *dalam, uluebalang-uluebalang* lebih banyak bertindak sendiri daripada menunggu perintah dari Sultan. Inilah fase kedua, ketika para *uluebalang* tampil sebagai pemimpin dan Sultan atau wakilnya dijadikan sebagai unsur pemersatu daripada komando.

Tak begitu lama *uluebalang-uluebalang* terkemuka di sepanjang pantai Timur dapat ditaklukkan. Ada yang tewas dan ada pula yang bersedia menerima pengaturan kekuasaan baru dengan mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Ketika rakyat berkecamuk, maka pada fase inilah para ulama tampil pada tampuk pimpinan. Di bawah pimpinan ulama, perang bukanlah sekedar menyambung nyawa dalam membela negeri. Perang pun disakralkan dan dipersuci. Di bawah pimpinan ulama, ideologisasi perang dilakukan. Mati dalam perang melawan kafir adalah syahid di jalan Allah.

2. Sartono Kartodirdjo, "Pemberontakan Petani Banten, 1888."[190]

Sejarah pemberontakan di Banten tahun 1888 adalah peristiwa lokal atau sejarah mikro. Akan tetapi, peristiwa tersebut tidak terlepas dari setting makro, yang berkaitan dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan suatu periode pergolakan sosial yang menyertai perubahan sosial sebagai akibat pengaruh Barat yang semakin kuat. Pada periode ini dapat disaksikan suatu modernisasi perekonomian dan masyarakat politik yang semakin meningkat. Seluruh proses peralihan dari tradisionalitas ke modernitas ditandai oleh goncangan-goncangan sosial yang silih berganti. Pemberontakan-pemberontakan terjadi di hampir semua karesidenan di Jawa dan di daerah-daerah Kerajaan, dan semua memperlihatkan karakteristik yang sama. Sebagaimana juga di Banten tahun 1888, pemberontakan-pemberontakan itu bersifat tradisional, lokal atau regional, dan berumur pendek. Sebagai gerakan sosial, pemberontakan-pemberontakan itu semuanya tidak menunjukkan ciri-ciri modern seperti organisasi, ideologi-ideologi modern, dan agitasi yang meliputi seluruh negeri. Pemberontakan-pemberontakan petani itu bersifat lokal dan tak mempunyai hubungan satu sama lain.

[190] Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888,* Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Pemberontakan tahun 1888 yang terjadi di distrik Anyer di ujung barat Pulau Jawa, Banten, itu tidak merupakan suatu pemberontakan yang besar. Meskipun pemberontakan berkobar dalam jangka waktu yang relatif singkat, dari tanggal 9 sampai 30 Juli, tetapi untuk melihatnya perlu ditelusuri sampai ke awal tahun-tahun 70-an. Untuk itu, dalam pengkajiannya Sartono memperkenalkan model penulisan sejarah yang dikenal dengan sinkronik (melebar dalam ruang) dan diakronik (memanjang dalam waktu). Pengungkapan secara sinkronik adalah untuk melihat kausalitas latar belakang atau faktor-faktor yang mengakiatkan munculnya pemberontakan petani Banten, yaitu melihat kondisi Banten sebelum terjadinya pemberontakan tahun 1888 yang dinalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan (multidimensional). Jadi, pendekatannya dilakukan melalui pelbagai jalur metodologis atau perspektif teoritis dan yang terpenting adalah jalan atau perspektif ekonomis, sosiologis, politikologis, dan kultural-antropologis. Oleh karena itu, dalam kajian Sartono dibahas secara terpisah-pisah aspek-aspek ekonomis, politis dan keagamaan, yang merupakan faktor-faktor kondisional gerakan itu. Sementara itu, model diakronik adalah untuk mengungkapkan dan menarasikan proses terjadinya pemberontakan, yaitu diskripsi yang mencakup seluruh proses, mulai dari serangan pemberontakan yang pertama sampai kepada tertawannya pemimpin-pemimpin utama pemberontakan.

3. Suhartono, "Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesan Surakarta (1830-1920)."[191]

Lokal Surakarta memang mempunyai ciri tersendiri, yaitu sebagai wilayah erat kaitannya dengan sistem kekuasaan kerajaan. Akan tetapi, sistem politik kerajaan tersebut banyak mengalami perubahan sejak adanya penetrasi kekuasaan kolonial untuk penguasaan ekonomi. Sistem yang ditanamkan kekuasaan kolonial sendiri mencari kekuatan ke bawah guna memperluas penyebaran perusahaan perkebunan ke pedesaan. Dalam rangka perluasan daerah produksi pemerintah kolonial melakukan sistem birokrasi dengan memaksakan berbagai peraturan legal rasional kepada

[191] Lihat Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesan Surakart (1830-1920),* Yogyakarta: Tiarawacana, 1991.

masyarakat desa melalui kepala-kepala mereka. Sejak itulah terjadi perubahan mendasar bagi peranan kepala lokal yang menjadi kunci utama bagi perubahan selanjutnya.

Jadi, Suhartono melihat bahwa perubahan sosial di pedesaan Surakarta erat kaitannya dengan sistem *apanage* dan *bekel* yang berubah. Tanah *apanage* atau tanah lungguh adalah tanah jabatan sementara, sebagai upah atau gaji seorang priyayi atau bangsawan. Sementara keberadaan *bekel* juga erat kaitannya dengan *apanage*, karena setelah adanya tanah apanage diangkatlah seorang bekel yang berfungsi sebagai penebas pajak. Sedikit demi sedikit *bekel* diberi kekuasaan sebagai kepala desa, sehingga kemudian peranannya berubah dari penebas pajak menjadi pemegang kekuasaan desa.

Kajian Suhartono dalam menganalisis tentang perubahan sosial di pedesaan Surakarta menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan politik. Titik tolak pemahaman perubahan sosial adalah ada pada sistem *apanage* (tanah *lungguh*), yang terjadi setelah adanya perluasan perkebunan kolonial yang tumbuh bersamaan dengan pengenalan pajak, keuangan, birokrasi, dan transportasi. Kedudukan tanah *apanage* dan perubahan peranan *bekel* memang erat kaitannya dengan modernisasi kolonial. Proses modernisasi sendiri mencakup berbagai dimensi sehingga perubahan-perubahan itu ditempatkan dalam kaitannya dengan perkembangan politik ekonomi kolonial, khususnya di bidang agro-industri.

Secara makro, di Jawa abad ke-19 memang ditandai dengan makin intensifnya pengaruh Barat. Pengaruh ini di Surakarta berdampak pada runtuhnya sistem *apanage* di satu pihak dan memperlancar terbentuknya sistem agro-industri yang memperkuat peranan *bekel* di pihak lain. Akibat kepentingan pihak kolonial untuk membentuk blok-blok areal perkebunan, maka tanah-tanah *apanage* harus dihapus dan diubah menjadi tanah dengan status hak milik perseorangan yang diberikan kepada petani. Dengan demikian, pemerintah kolonial mempunyai kedudukan kuat untuk memaksa petani untuk menyerahkan tanah dan tehaga kerjanya dengan kontrak bebas. Sementara itu, perluasan perkebunan, khususnya di Surakarta, tumbuh bersamaan dengan pengenalan pajak, keuangan, birokrasi modern, dan transportasi. Sisi lain, peranan *bekel* menjadi

kuat, karena penarikan pajak dan pelaksanaan kerja wajib hanya dapat dilakukan dengan bantuan *bekel*, yang akibatnya selalu memberatkan petani sehingga wajar apabila timbul kerusuhan di pedesaan.

4. Susanto Zuhdi, "Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa."[192]

   Kajian ini mengungkap tentang perkembangan Cilacap yang berkaitan dengan pertumbuhan pelabuhan sebagai pusat dan lalu-lintas kegitan ekonomi, terutama di bidang ekspor. Jika kita melihat isi narasi yang terkadung dalam buku hasil kajian sejarah lokal karya Susanto Zuhdi ini, maka ia dapat digolongkan kepada sejarah sosial-ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang penting unuk diungkapkan terkait dengan pertanyaan, mengapa pelabuhan Cilacap menjadi salah satu tempat kegiatan ekonomi ekspor?

   Pertama, pada dasarnya secara geografis, pelabuhan Cilacap yang terletak di pantai selatan Jawa adalah lokasi yang terisolasi dibanding dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang berada di pantai utara. Hal ini dapat berkembang akibat adanya kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Faktor pendorong kebijakan itu adalah karena *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa), yang dijalankan sejak tahun 1830, khususnya di Jawa Tengah dan bagian timur Jawa Barat, yang memerlukan pelabuhan untuk mengalirkan hasil tanaman ke pasar Eropa. Dalam konteks ini, maka dapat dilihat adanya keterkaitan antara sejarah makro dan mikro. Jadi, sejarah pertumbuhan dan perkembangan lokalitas Cilacap sebagai kota pelabuhan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kondisi makro yang ada di Hindia Belanda. Demikian pula, akibat adanya kebijakan pembukaan jalur kereta api dari Yogyakarta ke Cilacap dan tersambungnya Cilacap dengan Cicalengka (1887-1930), tidak bisa bisa dianggap sepele dalam hubungannya dengan perkembangan pelabuhan Cilacap, karena pada periode inilah kegiatan pelbuhan menjadi meningkat, khususnya di bidang ekspor.

[192] Lihat Susanto Zuhdi, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*, Yogyakarta: Ombak, 2016.

5. Anton E. Lukas, "Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi."[193]

Yang dimaksud tiga daerah dalam kajian ini adalah meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang yang masuk dalam Karesidenan Pekalongan (Jawa Tengah). Sejarah Tiga Daerah penting sebagai peristiwa lokal revolusi Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi sosial dengan ciri khas tersendiri. Dikatakan revolusi dalam revolusi dikarenakan peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang berada dalam masa revolusi Indonesia itu sendiriri, yaitu terjadi antara Oktober sampai Desember 1945.

Revolusi sosial diartikan sebagai suatu revolusi untuk mengubah struktur mayarakat colonial feudal menjadi suatu susunan masyarakat yang lebih demoktratis. Oleh karena itu, seluruh elite birokrat, pangreh praja (residen, bupati, wedan, dan camat), dan sebagian besar kepala desa "didaulat" dan diganti oleh aparat pemerintahan baru yang terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis. Sebenarnya cita-cita ini telah mulai diperjuangkan oleh Sarekat Islam di Pekalongan pada tahun 1918, diteruskan oleh gerakan PKI dan Sarekat Rakyat sampai dengan tahun 1926, tetapi baru tercapai pada bulan Oktober-November 1945. Jadi, yang khas dari peristiwa Tiga Daerah ini adalah bahwa peristiwa ini lebih daripada sekedar protes sosial terhadap eksploitasi Belanda. Kausalitasnya dapat dilihat, bahwa selain latar belakang politik dan ekonomi, revolusi sosial di Tiga Daerah pada tahun 1945 juga harus disoroti kepemimpinannya atau ideologinya dan konteks kebudayaan.

Latar belakang ekonomi dapat dilihat bahwa pada masa kolonial Belanda rakyat pedesaan mengalami kemerosotan kehidupan ekonomi yang disusul dengan kemelaratan hebat di zaman Jepang, sehingga menyebabkan amarah rakyat berkobar melawan elite birokrat dalam aksi-aksi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, keberadaan 17 pabrik gula di Karesidenan Pekalongan sebelum perang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan, khususnya berkaitan dengan kemerosotan ekonomi pedesan. Demikian pula, untuk mengetahui mengapa terjadi Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1945, juga perlu mengetahui

[193] Lihat Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi,* Jakarta: Grafiti, 1989.

sejarah politik daerah tersebut. Pada tahun 1864 diketahui terjadi aksi protes terhadap Tanam Paksa (gula) dab beban kerja wajib (*corvee*) yang menjadi inti dari Sistem Tanam Paksa Belanda. Aksi protes muncul lagi pada tahun 1926, dengan pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal. Kali ini petani melawan beban wajib kerja dengan senjata ideologi modern, yaitu komunis. Golongan inilah yang muncul kembali memimpin badan-badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah struktur pemerintahan di Tiga Daerah pada tahun 1945 itu.

Daftar Pustaka

Abdurrachman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi,* Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.

Abdurrachman Surjomihardjo, "Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Pranata Sosial," dalam T. Ibrahim Alfian (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Agus Mulyana dan Darmiasti, *Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Alan J. Lichtman dan V. Frenc, *Historian and The Living Past*, Arlington Height: Harlan Davidson, 1978.

Amin Abdullah, M., *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ankersmit, F.R., *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah,* terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia, 1987.

Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi,* Jakarta: Grafiti, 1989.

Azymardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 2002.

Bambang Purwanto, "Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia", dalam Sri Margana dan Widya Fitriyaningsing (ed.), "*Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!,* Jakarta: Ombak, 2006.

Bambang Purwanto, "Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta: Memikirkan Kembali Sejarah Sosial Indonesia," dalam Henk Schulte Bordholt dkk. (ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Bernard S. Cohn, "Sejarah Etnis," dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomiharjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan* Perspektif, Yogyakarta: Ombak, 2016.

Budiawan, *Sejarah Sebagai Humaniora,* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Cilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide to Historical Method,* New York: Fordham University Press, 1957.

Ganda Febri Kurniawan, Warto, Leo Agung Sutimin , "Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi Dan Politik Ingatan," *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Gde Widja, I., *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Cilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide to Historical Method,* New York: Fordham University Press, 1957.

Habids Mohd, "Critical Philosophy of History": Bagaimanakah Ia Berbeza Daripada Pendekatan Sejarah Spekulatif ?, https://www.academia.edu/12010131/Perbezaan_Falsafah, diakses 9 April 2019.

Haliadi dan Leo Agustino, "Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah," *CosmoGov, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No.2, Oktober 2015.

Hariyono, "Sejarah Lokal: Mengenal Yang Dekat, Memperluas Wawasan," *SEJARAH DAN BUDAYA*, Tahun Kesebelas, Nomor 2, Desember 2017.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Paradigma, Epistimologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pemetaan," *Makalah,* Disampaikan dalam Pelatihan "Metodologi Penelitian," diselenggarakan oleh CRCS-UGM di Yogyakarta, 12 Februari – 19 Maret 2007.

Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah," dalam T. Ibrahim Alfian dkk (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912,* Yogyakarta: Ombak, 2016.

Imam Syafi'i, "Sejarah Lokal adalah Sejarah Maritim (Nasional) Indonesia?," *SEJARAH DAN BUDAYA*, Tahun Kesebelas, Nomor 1, Juni 2017.

Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1995.

Jacinta Prunty dkk., "The Local History Project: Co-operating North and South," A Report for the Centre for Cross Border Studies, Oktober 2001.

Koentjaraningrat, "Penggunaan Metode-Metode Antropologi dalam Historiografi Indonesia,"dalam Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Tiara wacana: 1994.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esa Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental,* Bandung: Mizan, 2001.

Lapian, A.B., "Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal", *Prisma*, No. 8, Agustus 1980.

Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Politik lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik," *Jurnal Ilmu Politik,* Edisi 21, 2010.

Masyhuri, "Đinamika Masyarakat Pedesaan: Pejaten Tahun 1950-1988," *SEJARAH 2,* Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jakarta 1992.

Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2011.

Misnal Munir, "Ide-Ide Pokok dalam Filsafat Sejarah," Jurnal Filsafat Vol. 22, Nomor 3, Desember 2012.

Moh. Ali, R., *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia,* Yogyakarta: LKiS, 2005.

Multatuli, *Max Havelaar,* terj. H.B. Yasin, Jakarta: Djembtan, 2005.

Mustika Zed, "Beberapa Catatan Tentang Epistemologi Sejarah," dalam Sunaryo Purwo Sumitro (peny.), *Dari Samudra Pasai Ke Yogyakarta: Persembahan Kepada Teuku Ibrahim Alfian,* Jakarta: Yayasan MSI dan Sinergi Press.

Nurul Huda, M.H., "Filsafat Sejarah Spekulatif Abdurrahman Wahid," http://www.gusdurian.net/id/article/headline/FILSAFAT-SEJARAH, diakses 9 April 2019.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial,* terj. Mestika Zed dan Zulfami, Jakarta: Obor, 2002.

Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota,* Yogyakarta: Ombak, 2012.

"Psikologi Sosial: Pengertian, Teori, Ruang Lingkup dan Konsepnya," https://dosenpsikologi.com/psikologi-sosial, diakses 5 Juli 2019.

Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888,* Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,* Jakarta: Gramedia, 1992.

Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Singgih Tri Sulistiyono, "Penulisan Sejarah Lokal di Era Otonomi Daerah: Metode, Masalah, dan Strategi," Makalah disampaikan pada "Seminar Nasional Peningkatan Kompetensi Penelitian untuk Pengajaran Sejarah di Era Sertifikasi dan Otonomi Daerah" yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah, Kudus, 20 Maret 2009.

Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995.

Soedjatmoko, "Sejarawan Indonesia dan Zamannya," dalam Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995.

Sri Margana, "Historiografi Tanpa Tradisi," Epilog dalam Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Stephanie Pasternak, "A New Vision Of Local History Narrative: Writing History In Cummington, Massachusetts," *A Thesis Presented,* Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts

Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS, September 2009.

Sugeng Priyadi, *Sejarah lokal: Konsep, Metode dan Tantangannya,* Yogyakarta: Ombak, 2012.

Sugeng Priyadi, *Historiografi Indonesia,* Yogyakarta: Ombak, 2015.

Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesan Surakart (1830-1920),* Yogyakarta: Tiarawacana, 1991.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Susanto Zuhdi, "Metodologi Strukturistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif," dalam Djoko Marihandono (peny.), *Titik Balik Historiografi di Indonesia,* Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008.

Susanto Zuhdi, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*, Yogyakarta: Ombak, 2016.

Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Taufik Abdullah, "Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis," dalam T. Ibrahim Alfian dkk (ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

Taufik Abdullah, "Sejarah dan Historiografi," dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomiharjo (peny.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif,* Yogyakarta: Ombak, 2016.

Warto, "Tantangan Penulisan Sejarah Lokal," SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesebelas, Nomor 1, Juni 2017.

Wertheim, W.F., "Pendekatan Sosiologis dalam Historiografi Indonesia, dalam Soedjatmoko dkk. (ed.), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Gramedia, 1995.

William H. Frederick dan Soeri Soeroto (peny.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi,* Jakarta: LP3ES, 2005.

Yakub, M., "Historiografi Islam Indonesia: Perspektif Sejarawan Informal," MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013.

BIOGRAFI SINGKAT

Miftahuddin, doktor pada Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNY. Dilahirkan di Pangandaran Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1999. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan M.Hum. di Jurusan Sejarah UGM Yogyakarta.

Pada tahun 2017 berhasil menyelesaikan disertasi Dr. di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Dinamika Komunitas Diaspora Hadrami dalam Gerakan Al-Irsyad di Indonesia, 1945-2007." Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan: Tesis S2 berjudul "Modernisasi di Perkotaan Jawa Abad XX: Sejarah Kota Surakarta, 1903-1930-an," "Peran Organisasi Islam: dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan sampai Masa Perang Kemerdekaan, 1936-1949," "Wujud Nasionalisme Tokoh Tradisionalis dan Modernis: Studi Kontribusi KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Mas Mansyur," "Revolusi Fisik di Sumatera Pada Awal Kemerdekaan: Studi Kasus di Sumatera Barat dan Bengkulu," "Peran Pondok Pesantren Al-Qodir Wukirsari Cangkringan dalam Pengembangan Islam Berbasis Kearifan Lokal, 1980-2007." Karya buku berjudul *Sejarah Perkembangan Intelktual Islam di Indonesia Dari Abad XIX Sampai Masa Kontemorer* penerbit UNY Press Tahun 2017.

YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM
YOGYAKARTA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
uny

Untuk menyampaikan informasi masa lalu yang benar dan falidmemang ini tugas berat yang harus dijalani penulis sejarah. Banyakunsur yang harus dipenuhi penulis sejarah. Selain harus ulet, sabar, jujur,dan tulus, maka penguasaan metodologi tentu saja bagian yang pokokyang harus dikuasai penulis sejarah. Penulisan sejarah yang dilandasidengan penguasan metodologi tentu akan menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika yang ditulis adalah tentang lokalitas tertentu yang dilandasi dengan penguasaan metodologi, makagenerasi yang terdapat di lokal tersebut atau pembaca pada umumnyaakan memperoleh pencerahan.

ISBN 978-602-498-139-6
9 786024 981396

UNY Press
Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp: 0274 - 589346
Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)